



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA (VIRTUAL)
KOMISI XI DPR RI DENGAN MENTERI KEUANGAN, MENTERI
PPN/KEPALA BAPPENAS, GUBERNUR BANK INDONESIA, KETUA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK),
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Virtual)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 30 April 2020
W a k t u	: 11.00 s.d. 16.37 WIB
T e m p a t	: Virtual
Ketua Rapat	: H. Dito Ganinduto, M.B.A. (Ketua Komisi XI DPR RI)
Acara	: Realokasi dan Refocusing APBN 2020 dan Perubahan-perubahan Asumsi Makro
Sekretaris Rapat	: Drs. Urip Soedjarwono (Kepala Bagian Sekretariat Komisi XI DPR RI)
Hadir	: MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI) GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO) KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO) KEPALA BPS (KECUK SUHARIYANTO)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

*Shaloom.
Om swastiastu,
Namo Budhaya.
Salam kebajikan.*

**Yang terhormat kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia beserta seluruh jajarannya,
Yang terhormat Menteri PPN/Kepala Bappenas dan seluruh jajarannya,
Yang terhormat Ketua OJK, Dewan Komisiner OJK dan seluruh jajarannya,
Yang terhormat Ketua BPS dan seluruh jajarannya.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kita pada hari ini dapat melakukan Rapat Kerja secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Dan marilah kita senantiasa memohon ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dan dalam bulan Ramadhan ini kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa ini.

Baik, dalam jadwal kami nyatakan rapat sudah kuorum, ada 8 Fraksi. Apakah disetujui Rapat Kerja ini kita buka dalam keadaan terbuka? Dibuka untuk umum. Setuju?

**(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.00 WIB)**

Setuju ya? Oke.

Baik, dengan demikian Rapat Kerja ini susunannya akan kita mulai dengan Menteri Keuangan yang akan menyampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, SBN. (suara terputus), Bank Indonesia akan menyampaikan inflasi dan kurs rupiah, kemudian dari Menteri PPN mengenai target-target pembangunan, kemudian OJK mengenai makro eh mikro, mikro prudensial dan institusi sektor jasa keuangan dan pengaruhnya dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian BPS akan menyampaikan semua data statistik nasional.

Baik, mengingat waktu, karena hari ini adalah hari PSBB, kita harus selesai jam 16.00 WIB, tapi karena 5 pembicara yang akan memberikan masukan yang banyak, jadi saya kira kita tidak usah terburu-buru. Seandainya sampai jam 16.00 WIB tidak selesai pemaparannya, mungkin kita lanjutkan pada hari Selasa untuk pendalaman, kesimpulan dan lain-lain

sebagainya. Jadi kami persilakan waktunya, tidak usah terburu-buru, kalau tidak selesai kita lanjutkan minggu depan pada hari Selasa.

Sedangkan yang kemarin KSSK yang hari Senin belum selesai, eh yang hari Selasa kemarin, akan kita lanjutkan pada hari Senin, tinggal menjawab, dari Pemerintah tinggal menjawab pertanyaan dari para Pimpinan dan Anggota Komisi XI, dilanjutkan dengan Kesimpulan. Kalau bisa selesai cepat. Dan kalau hari ini tidak selesai, kita masukkan di Senin atau kita masukkan di Selasa.

Baik saya kira ini saja mekanismenya saya kira seperti biasa, tidak ada perubahan. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan dari Bu Menteri Keuangan untuk menyampaikan paparannya, bahkan sudah kami terima, terima kasih.

Silakan Bu, waktu kami persilakan.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Terima kasih Pak Dito.

**Pimpinan Komisi XI, para Anggota Komisi XI,
Dan juga Pak Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, Bappenas atau yang mewakili, kemudian Bapak dari BPS, Pak Kecuk, dan seluruh jajarannya.**

Kami akan menyampaikan paparan menyangkut asumsi-asumsi makro di tahun 2020, dan kemudian kita akan masuk kepada pengaruh dampak itu terhadap postur anggaran 2020. Kemudian kita akan masuk kepada Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang menyampaikan adanya beberapa perubahan di dalam komposisi di dalam APBN 2020 ini. Sekaligus juga ini menjawab beberapa pertanyaan kemarin, yang sebetulnya adalah dalam forum KSSK, Pimpinan, tapi mungkin juga sangat relevan sehingga nanti waktu kita akan melaksanakan pembicaraan terusan pada hari Senin, mungkin sebagian juga sudah bisa kita jawab pada hari ini. Tolong Mas, ditampilkan presentasinya. Karena dari komputer sebelah juga saya lagi *download* agak lama ini. Silakan dari Pusaka atau dari teman-teman.

Jadi Pimpinan, kalau kita lihat Covid-19 yang terjadi, memang mulainya dari RRT, khususnya di Wuhan. Dan itu sampai dengan Januari Februari, masyarakat dunia masih menganggap ini masalah lebih berpusat di RRT. Namun pada akhir Februari mulai melebar ke berbagai negara, dan pada bulan Maret itu adalah puncaknya, di mana puncak penyebaran, artinya jumlah negara yang terkena sudah lebih dari 210 negara di dunia. Dan dampaknya itu begitu sangat meluas, yang mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan sistem keuangan atau sektor keuangan secara simultan. Kalau kita lihat, tolong tayangannya, belum keluar ya? Tadi kayaknya sudah ada kok.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Di tempat kami sudah ada Ibu, mungkin di tempat Ibu agak anu.

MENTERI KEUANGAN (SRI MULYANI):

Tunggu, tunggu, sayanya yang salah berarti. Iya, ya, sayanya yang salah. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, kita masuk, mohon maaf, karena ini di tempat saya belum di-*download* dan di sini saya tidak keluar di layar saya, sekarang sudah keluar.

Jadi kalau kita lihat pandemi Covid-19 ini yang semula adalah merupakan tantangan di bidang kesehatan dan menciptakan krisis kesehatan, telah kemudian menyebabkan dampak sosial, ekonomi dan keuangan. Karena langkah untuk meng-konten atau mencegah pelebaran atau penyebaran dari krisis kesehatan itu yaitu penyebaran Covid-19, menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan keuangan. Yaitu dengan *social distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *lockdown* di berbagai negara, dan banyak menimbulkan putusnya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan juga kegiatan sosial. Inilah yang sekarang dihadapi oleh semua negara di dunia.

Jadi dalam hal ini Indonesia juga tidak terkecuali menghadapi dampak berantai dari masalah Covid-19 ini. *Approach* ini yaitu bahwa dari kesehatan menjadi sosial, menjadi ekonomi dan keuangan, nanti akan menjadi dasar bagi Perpu dan kemudian terutama instrumen APBN, untuk bisa menangani persoalan itu. Jadi selalu bisa dilihat logikanya disini. Ada bantalan kesehatan, ada bantalan sosial, ada bantalan ekonomi, ada bantalan di bidang sektor keuangan. Karena *shock*-nya, kemudian menimbulkan domino efek kepada ke-4 hal tersebut.

Kalau kita lihat dari sisi dampaknya ekonominya Kuartal I, kemarin kita sudah dengar, Amerika Serikat turun (-) 4, baru saja tadi malam kita keluar RRT (-) 6,4. Kalau kita lihat kontraksi itu sedemikian besar, mungkin untuk RRT, bahkan Amerika Serikat ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena Amerika Serikat itu Q1 sudah kontraksi sangat dalam. Padahal dia Januari-Maret masih cukup relatif normal. Jadi ini yang harus menimbulkan kewaspadaan bagi kita semua, begitu dampaknya bisa sangat-sangat dalam dan cukup dahsyat di dalam perekonomian terutama pada Q1. Dan untuk beberapa mungkin kita akan melihatnya di Q2, dan Q3.

Untuk kita, bulan Maret kemarin adalah masa yang sangat luar biasa menantang. Karena eskalasi dan mungkin bahkan disebut "kepanikan" akibat menjalarnya pandemik ini telah menyebabkan reaksi yang sangat irasional, di sektor keuangan. Arus modal keluar dari *emerging market* itu mencapai 100 Billion USD, atau 0,4% dari GDP. Untuk Indonesia, kami, Surat Berharga Negara, di dam oleh pemilik asing sampai lebih dari Rp120 Triliun pada bulan Maret itu sendiri. Dan ini menyebabkan tekanan yang luar biasa, Bank

Indonesia harus mengatasi, dari sisi nilai tukar. Juga dari saham-saham, kita melihat koreksi yang sangat dalam. Ada akibat karena *capital outflow*, ada juga karena kepanikan. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan kalau masa terjadinya *hypertension*, waktu itu kita lihat tahun 2015 dan bahkan kalau kita lihat dampaknya ke ekonomi, ini jauh lebih meluas. Karena ini tadi tantangannya adalah di bidang kesehatan dulu. Jadi keselamatan manusia yang menjadi pertarungan. Kalau krisis keuangan dulu, lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor keuangan yang memiliki *spill over* pada sektor riil.

Dari sisi kegiatan, eh kondisi volatilitas ini juga terekam dari indeks saham untuk *emerging market* maupun maju. Indeks saham MNCI negara maju (-) 16,3 dan untuk *emerging market* sampai dengan kontraksi 20%. Ini *year to date* sampai dengan 24 April kemarin. Kenaikan dari *same heaven asset* seperti dollar indeks, yaitu mencapai 4% dan instrumen yang dianggap berdaya tahan seperti emas, menyebabkan harga emas naik 14%. Distruksi ekonomi global juga melanda di dalam sektor komoditas. Harga minyak global turun sampai (-) 70% *year to date* untuk, sampai dengan 24 April. Bahkan untuk beberapa saat, harga WTI, *West Texas* itu mencapai negatif. Karena jumlah *supply* sudah melebihi dari kemampuan dari untuk penampungan dari stock minyak tersebut, sehingga mereka mengalami yang tekanan luar biasa. Dari hari ini langkah yang dilakukan, baik OPEC maupun non OPEC sudah semakin mungkin terkoordinasi, karena mereka melihat bagaimana dampak harga minyak bisa mencapai negatif, mungkin merupakan *wake up call* bagi negara-negara untuk berkoordinasi. Dari sisi pengurangan *supply shock*-nya.

Kerugian akibat Covid telah mencapai USD 9 Triliun untuk periode 2020-2021, ini akibat kontraksi ekonomi dunia dan berbagai kondisi sosial seperti PHK. Kalau USD 9 Triliun itu setara dengan ekonomi Jerman dan Jepang. Jadi artinya betapa dahsyatnya satu pandemik dan dalam waktu yang begitu singkat, kurang dari 1 kuartal telah menyapu ekonomi dunia secara cepat. WTO telah memprediksi perdagangan global akan mengalami penurunan 13% dan 32% di tahun 2020 ini.

Nah kalau kita lihat dampaknya terhadap sektor riil dan masyarakat, jumlah pengangguran sangat tinggi. Amerika Serikat menunjukkan jumlah pengangguran yang klaim untuk benefitnya mencapai 26 juta dalam waktu hanya 5 minggu, jadi dalam 1 bulan telah terjadi PHK yang begitu luas. *Consumer confidence* hanya 71,2 terendah sejak tahun 2011 dan *retail sales* mengalami kontraksi (-) 6,2%. Di Eropa, PMI mengalami kontraksi, *business confidence* di Jerman juga menunjukkan *report* rendah, dan *retail sales* di Inggris kontraksi 5,8%. Asia dalam hal ini Tiongkok, seperti kami sampaikan, Q1 (-) 6,8 dan ini adalah terendah sejak 1992. Ini nanti di RRT akan terjadi komplikasi karena dibawah Presiden Xi Jinping, sebutnya ingin mendeklarasikan tahun 2020 adalah tahun RRT keluar dari kemiskinan dan masuk sebagai negara yang sejahtera atau *affluence*. *Retail sales* di Tiongkok *drop* (-) 18,9 dan PMI untuk Jepang juga mengalami kontraksi.

Jadi dalam hal ini kita tidak ada yang mempertanyakan lagi, apakah Covid memiliki dampak yang begitu dahsyat di dalam perekonomian suatu negara atau dunia. Sekarang fokusnya adalah bagaimana kita bisa mengurangi, memitigasi, dan tentu masih dalam ketidakpastian karena kita tidak pernah tahu Covid ini akan selesai kapan. Memang beberapa *news* akhir-akhir ini mengenai kemungkinan ditemukannya antivirus itu memberikan harapan. Ini yang menyebabkan sentimen di Dow Jones agak positif dalam satu hari terakhir. Meskipun ada berita kontraksi dari ekonomi Amerika Serikat.

Kalau kita lihat dampaknya kepada Indonesia, pertumbuhan yang akan kita hadapi tentu akan dipengaruhi oleh kondisi Covid. Seperti saya sampaikan pada presentasi sebelumnya, bahwa kondisi kita sampai dengan Januari-Februari sebetulnya ada tanda-tanda positif dari ekonomi kita. Namun kemudian di bulan Maret, mengalami dampak yang sangat besar. Realisasi nominal investasi langsung di kuartal 1, Rp210 Triliun atau 23,7% dari target 2020. Ini ditopang oleh PMDN kita yang mencapai 112,7 atau masih mengalami tumbuh 29,2%. Namun PMA kita mengalami kontraksi 9,2% yaitu sebesar 98,7. Kemudian PMA yang sangat terdampak adalah negara-negara yang memang menjadi salah satu pusat dari Covid ini, yaitu Tiongkok, Singapura yang sampai hari ini jumlah tambahan kasus masih sangat besar dan Jepang. Yang ini Jepang juga sangat *lead*, atau baru telat, baru meningkat pada akhir Maret atau bulan April ini. Ekspor-Impor kita mengalami pertumbuhan ekspor Q1 (+) 2,9, impor (-) 3,7. Untuk ekspor didukung oleh sektor pertanian dan manufaktur, sedangkan untuk impor adalah karena penurunan bahan baku dan barang modal. Inflasi masih terjaga di 2,96. Tekanan berasal dari harga emas yang tadi mengalami lonjakan, dan komoditas pangan. Dampak dari Covid tercermin dari deflasi tarif dari angkutan udara, yang mengalami tekanan yang luar biasa besar dan berdampak langsung, karena Covid mematikan mobilitas manusia sehingga permintaan terhadap angkutan udara dan bahkan darat juga menurun tajam. Indikator *Purchasing Manager Index* kita 45,3, ini adalah berarti sudah di bawah zona normal 50, ini adalah tanda kontraksi dan indeks penjualan *real* kita adalah kontraksi 5,4.

Dari Kementerian Keuangan *forecasting* kita, Q1 masih diperkirakan antara 4,5-4,7. Ini karena kita rekam dari penerimaan perpajakan kita, dan dari berbagai indikator penjualan, sampai dengan Maret minggu ke-1 dan menjelang minggu ke-2 itu masih relatif cukup belum terpengaruh dari Covid. Kecuali mungkin sektor apa, *tourism* yang memang sudah mulai terpukul sejak Januari, akibat mulainya penutupan semua *flight* yang berasal dari RRT.

Nah Bapak dan Ibu sekalian,

Perkembangan indikator dari asumsi makro yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut:

Untuk pertumbuhan ekonomi yang di dalam APBN, kita menggunakan asumsi 5,3%, sampai dengan realisasi Maret, BPS belum keluar. Yang kami sampaikan tadi adalah *forecasting* kita, yaitu antara 4,5 hingga 4,7. Kalau dibandingkan seperti Amerika Serikat, yang dampak Covid-nya juga sebetulnya baru mulai Maret dan mereka juga sudah mengalami kontraksi sangat dalam, kalau kita Insya Allah masih di atas 4, itu adalah sesuatu yang cukup baik, sehingga bisa menjaga dan mengkompensasi kuartal kedua yang kita prediksi memang akan mengalami tekanan yang cukup dalam akibat pelaksanaan berbagai macam langkah-langkah pembatasan sosial.

Inflasi yang di dalam APBN diasumsikan 3,10 sampai dengan hari ini, *end of period*, 0,76 *year on year*-nya 2,96. Nilai tukar, yang dalam APBN menggunakan Rp14.400,00, *end of period*, Rp15.553,00 *year to date* rata-rata adalah Rp14.432,00. Suku bunga kita 5,4% untuk *year to date* di 3,19%. *End of period* 2,5. Dan harga minyak mentah Indonesia yang diasumsikan APBN 63 dollar/barrel, *year to date* 52, *end of period* di 34,23. *Lifting* minyak kita, 755 sampai hari ini terekam 701,6 dan *lifting* gas 1191 ribu barrel setara minyak yang kita catat sampai hari ini, *year to date*, 1048. Ini adalah konteks indikator ekonomi makro.

Kalau dilihat sepintas sampai dengan Maret, mungkin tidak terjadi banyak deviasi, terutama di gross-nya. Gross-nya nanti mungkin ya akan terlihat pada kuartal-kuartal yang akan datang. Tapi kalau sampai Q1 kalau memang benar *forecasting*-nya dari Kementerian Keuangan, masih diatas 4, deviasi itu belum terasa terlihat dan belum terlihat dramatisnya dari dampak Covid ini.

Namun kita juga waspada bahwa dampak Covid mulai terasa pada minggu-minggu terakhir dan pada bulan April-Mei ini akan merupakan puncaknya. Kalau seluruh *modelling* prediksi mengenai Covid itu bisa dipercaya dan benar, kita berharap memang puncak Covid akan terjadi pada Mei dan kemudian Juni atau Juli sudah mulai tapering. Pertumbuhan ekonomi kita akan sangat tergantung kepada *modelling* mengenai dampak Covid atau pengaruh Covid ini kepada sisi kesehatan. Jadi berapa lama dan berapa panjang ini akan mempengaruhi kondisi masyarakat kita. Oleh karena itu membuat proyeksi hari ini merupakan sesuatu yang sangat riskan. Karena memang kita tidak ada yang tahu. Namun kalau ada optimisme bahwa berbagai upaya-upaya dilakukan oleh seluruh negara-negara untuk mencari pemecahannya, mungkin kita bisa berharap akan terjadi anti atau terjadi antivirus yang bisa muncul pada bulan Mei atau Juni nanti.

Proyeksi pertumbuhan kita tentu tadi, sangat tergantung kepada Covid. Saya sampaikan dalam Tabel ini beberapa Lembaga yang membuat prediksi ekonomi Indonesia. IMF memprediksikan Indonesia 2020 hanya tumbuh 0,5. Bank Dunia tahun ini 2,1 *baseline* mereka, tapi *worst case scenario*, (-) 3,5. ADB menggunakan 2,5, Moody's menggunakan 3,0. Kalau Economic Inteligent Units yang tidak dimasukkan di sini yang menyebutkan bahwa dari

G-20 hanya 3 negara yang diprediksi masih positif yaitu RRT, India dan Indonesia. Tapi itupun pada kisaran 1%.

Jadi kalau kita lihat dari seluruh aktivitas ekonomi kita, di mana pertumbuhan ekonomi dari sisi *demand side* sangat tergantung atau banyak sekali dipengaruhi oleh *consumption*. *Consumption* itu mempengaruhi lebih dari 56% sehingga dengan adanya Covid sehingga kita harus melakukan *work from home*, *study from home*, *social distancing* dan bahkan pembatasan sosial, maka terlihat konsumsi mengalami penurunan yang sangat tajam. Itu sudah pasti akan mendorong ke bawah *growth* kita.

Kemudian investasi, karena semua perusahaan mengalami kesulitan, bahkan pada tingkat *survival*, yaitu *cash flow* mereka sekarang dalam situasi kering, maka banyak belanja-belanja investasi pasti akan ditunda dan ini akan mempengaruhi. Yang mungkin masih akan memberikan harapan adalah ekspor, karena kebutuhan pangan pasti meningkat, kebutuhan alat *medical* meningkat. Namun ekspor dari *natural resources* kita pasti akan terpukul. Demikian juga faktor dari *demand*, yang sekarang ini menjadi tumpuan semuanya adalah *government spending*. Makanya Pemerintah melakukan pelebaran defisit. Memang diakui sebagai defisit adalah memang karena penerimaan negara turun. Namun kita juga memberikan insentif di perpajakan dan belanja negara yang meningkat serta dari pembiayaan yang akan digunakan untuk menciptakan *leverage*, untuk mendorong aktivitas ekonomi.

Kalau kita melihat ketidakpastian ini, maka kita lihat beberapa hal. Dari sisi arus modal pasar keuangan Indonesia yang sampai dengan April mengalami (-) Rp159,6 Triliun, ini pasti menekan Surat Berharga kita. *Yield* dari Surat Berharga Negara Indonesia yang fasilitasnya 10 tahun meningkat ke level di atas 8%. Untuk perbandingan saja, kita pernah mengalami kondisi di mana *yield* ini bisa turun sampai dibawah 6%, dalam kondisi yang cukup baik. Sehingga ini adalah suatu beban terhadap pembayaran bunga hutang kita, ke depan. Indeks harga saham yang melemah tajam hingga (-) 27,9% di akhir Maret 2020. Ini juga pasti akan mempengaruhi sektor-sektor perusahaan di dalam mereka mampu untuk melakukan ekspansi, karena dengan nilai saham yang menurun, berarti mereka *leveragenya* juga meningkat. Depresiasi rupiah kita yang mencapai 17,6% *year to date* juga akan mempengaruhi dampak terhadap hutang korporasi. Untuk utang negara, kita relatif masih cukup baik dari komposisinya, meskipun tentu ini juga akan meningkatkan beban dari utang yang berdenominasi non rupiah. *Emerging market capital flow* masih sangat volatile, meskipun mungkin masa terburuk pada bulan Maret yang lalu sudah agak teratasi, kita tidak bisa menjamin bahwa ini akan stabil. Walaupun ini stabil pun mungkin masih stabil pada level yang rendah. Jadi dalam hal ini *capital flow* masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpastian dan gejolak yang harus kita jaga bersama. Bank Indonesia tentu adalah yang paling depan, karena ini langsung berimbas pada nilai tukar dan cadangan devisa kita. Namun Pemerintah juga terpengaruh, karena ini mempengaruhi *yield* dari Surat Utang Negara kita, dan juga dari sisi penerimaan Pemerintah.

Pelemahan nilai tukar dari seluruh mata uang di dunia, itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Nanti mungkin Pak Perry akan lebih banyak bicara mengenai hal ini, saya akan skip saja, supaya tidak ada repetitif.

Yield 3 bulan kami masih di dalam level yang cukup stabil dan rendah. Meskipun tadi kita sampaikan, untuk *yield* yang jangka panjang mengalami pergerakan. Karena sekarang biasanya dengan situasi volatilitas, investor *appetitenya* menjadi ingin memegang Surat Berharga yang sifatnya jangka pendek. Namun pada saat yang sama kita lihat, di dunia internasional, *appetite* terhadap surat dengan tenor yang sangat panjang itu muncul. Makanya waktu itu kami sempat mengeluarkan Surat Utang dengan denominasi eh dengan maturitas yang lewat lebih dari 30 tahun, yaitu 50 tahun. Ini adalah salah satu yang sangat baik dari sisi kemampuan kita untuk memmeratakan *yield profile* dari Surat Utang Republik Indonesia.

Kalau kita lihat pada awal tahun 2020, *yield* obligasi tenor 10 tahun adalah tercatat rendah sejak tahun 2018. Namun kemudian dengan *capital outflow*, maka muncul ketidakpastian, *anxiety*, untuk memegang Surat Berharga dari negara-negara *emerging*. Dan ini menyebabkan *yield* dari obligasi negara 10 tahun mengalami tekanan. Kita lihat, jumlah tidak hanya hanya *yield*-nya tapi juga penawaran yang diterima untuk setiap lelang kita. Untuk lelang 10 tahun, kita lihat sempat mengalami drop, tanggal 17 Maret, penawaran hanya Rp2,6 Triliun, padahal rata-rata biasanya bisa di atas Rp6 Triliun. Dan *yield*-nya naik, dari 6,6 - 6,5 terendah, yang pernah kita dapatkan naik sekarang mendekati bahkan sempat di atas 8 dan sekarang sudah *slightly* di bawah 8.

Untuk SBN kita, kita lihat justru mengalami penurunan dan tapi jumlah penawaran yang masuk di dalam setiap lelang menjadi menurun sangat tajam, hanya lebih dari 1/5-nya. Ini yang menyebabkan pembentukan harganya menjadi tantangan buat kita semuanya. Ini yang juga menjadi penyebab bahwa kita harus hati-hati di dalam memilih instrumen mana. Memang didalam konteks kita nanti *financing* yang menggunakan Bank Indonesia sebagai pembeli di pasar perdana, BI akan tetap mengikuti harga yang di *market* ini. Namun mereka masuk melalui 3 tahapan, yaitu ikut di dalam lelang, kemudian ... atau *private placement*. Namun harganya masih mengikuti harga *market*.

Inflasi dalam hal ini masih dalam konteks tadi masih di 2,9, namun kita mewaspadai terutama karena aspek logistik yang mengalami distruksi dengan adanya pembatasan sosial. Meskipun Presiden sudah meminta kepada Kapolri dan Daerah untuk tidak atau untuk menjaga arus dari logistik. Namun diakui bahwa dengan adanya pembatasan sosial pasti mempengaruhi lalu lintas dari logistik. Dan ini kemudian bisa menimbulkan beberapa mengalami tekanan. Nanti Pak Perry juga akan bicara mengenai inflasi lebih juga, karena memang itu mandatnya dari Bank Indonesia.

Tadi saya sudah menyampaikan mengenai harga minyak. Di mana kalau kita lihat WTI yang merupakan drama yang luar biasa karena sempat mengalami (-) 40 USD, diakibatkan produksi yang tidak lagi, ada yang bisa menampung karena seluruh tempat penampungan minyak telah penuh. Kalau kita harga *future* dari minyak ini adalah yang paling sulit untuk kita prediksi dengan situasi. Pertama, berbagai upaya untuk mengurangi *supply* dilakukan, namun disisi lain *demand* akibat ekonomi seluruh dunia mengalami tekanan, juga akan terus menekan. Inilah yang menyebabkan paling sulit untuk memprediksi bagaimana pergerakan harga minyak pada *medium term*. Kita masih memperkirakan di dalam perhitungan APBN *baseline* baru kita sesudah Covid, adalah kita menggunakan USD 30-40 per barrel. Namun harga minyak mentah ini untuk tahun 2020 hingga tahun 2021, proyeksi dari *Energy International Agency*, adalah di USD 40 untuk WTI, dan *Brent* di 45. Kita nanti lihat, bahkan mereka saja yang memang *dedicated* di bidang energi atau *petroleum*, sering juga tidak bisa membuat akurat dari sisi prediksi mereka. Untuk tahun 2020, EAI membuat prediksi WTI di USD 29,3 per barrel, dan *Brent* USD 33 per barrel. Mungkin kalau kita lihat *rebound*-nya adalah kalau ada optimisme di semester kedua dan langkah konkrit dari produsen, negara produsen untuk bisa melakukan pengurangan produksinya.

Untuk Indonesia, *lifting* minyak kita sudah semakin menurun. Jadi Indonesia adalah impor, importir minyak. Kita tidak lagi menjadi organisasi petroleum yang ekspor, karena produksi kita dibandingkan jumlah permintaan dan konsumsi jauh lebih kecil. Dan kita melihat, ini belum ada tanda-tanda akan terjadi *rebound*. Memang dari SKK Migas mengatakan, di dalam komposisi produksi energi kita, akan lebih banyak di *drive* oleh sektor gas nya. Sementara untuk minyak bumi, trend menurun itu mungkin akan sangat sulit untuk di *be burst*.

Nah dengan situasi ini, Bapak dan Ibu sekalian,

Kami ingin masuk ke dalam postur APBN 2020 yang sangat dipengaruhi oleh kondisi akibat Covid dan proyeksi kita ke depan.

Seperti telah kami sampaikan di berbagai kesempatan, hitungan awal kami untuk Pendapatan Negara, dan ini *based on* seluruh tadi, pertama, instrumen pajak dan perpajakan termasuk Bea & Cukai, yang harus memikul 2 hal dari sisi APBN. Mereka harus tetap meng-*collect* penerimaan, tetapi mereka saya minta untuk mampu memberikan insentif kepada dunia usaha yang mengalami tekanan sangat besar. Jadi mereka mendapatkan 2 mandat yang saling berkomposisi ya. Yaitu satu sisi tetap harus menjaga penerimaan negara, di sisi lain mereka harus mampu untuk mendukung ekonomi dan dunia usaha dan masyarakat yang saat ini mengalami musibah sangat besar.

Dari perhitungan teman-teman di BKF dan Pajak, penerimaan perpajakan akan tumbuh (-) 5,4. Ini berarti hanya 78,3% dari APBN. Ini adalah kombinasi, *negative growth* ini kombinasi dari perlemahan ekonomi yang kemudian diterjemahkan dalam perlemahan sektor korporasi dan masyarakat,

ini termasuk PPh, PPh Korporasi 25, PPh 21, untuk PHK dan karyawan yang mungkin terancam PHK, Pajak Pribadi mungkin akan berpengaruh, dan PPN. Untuk juga kombinasi dari perlemahan ekonomi tadi dari penerimaan. Dan juga disisi lain, Perpajakan kami minta untuk memberikan insentif bagi dunia usaha. Jadi selain melemah, mereka masih mengalami penurunan karena kita memberikan insentif perpajakan. Seperti PPh Pasal 25, cicilan diturunkan 30% untuk pembayaran massanya, dan dalam hal ini PPh 21 yang ditanggung Pemerintah, dan PPN juga sebagian sudah ditanggung Pemerintah. Kemarin Bapak Presiden memutuskan juga untuk PPh Usaha Kecil Menengah, itu juga ditanggung Pemerintah. Tadinya Bapak Presiden mau menurunkan ke nol, kami menyampaikan sebaiknya tidak di-nol-kan, tetap 0,5 tapi ditanggung Pemerintah, karena kalau di-nol-kan, sulit sekali untuk mengembalikan di atas nol. Jadi akhirnya disetujui di Sidang Kabinet.

PNBP kita juga mengalami dampak akibat Covid, karena tadi komoditas yang mengalami penurunan sangat besar. Jadi PNBP kita prediksi mengalami kontraksi 26,9 atau hanya tercapai 81,1% dari target APBN. Ini, karena tadi harga komoditas serta berbagai insentif penurunan harga gas industri yang telah diputuskan dalam Sidang Kabinet.

Dari sisi Belanja Negara, dengan adanya Covid, maka Presiden telah menetapkan 4 prioritas bagi kita untuk menjaga masyarakat sosial, ekonomi dan keuangan:

Pertama adalah melakukan *refocusing* dan re-alokasi. Belanja hanya untuk yang prioritasnya di bidang kesehatan, *social safety net*, dan membantu dunia usaha. Jadi di dalam langkah APBN terjadi *refocusing* dan *realokasi* dari APBN *existing* dan dari penghematan yang kita lakukan untuk seluruh Kementerian/Lembaga, kemudian kita realokasi untuk bidang kesehatan, *safety net* dan membantu dunia usaha. Jadi dalam hal ini untuk penghematan, kita melakukan pemotongan *accross the board*. Saya tahu teman-teman di DPR juga mengalami penurunan, karena ini dilakukan tanpa terkecuali, semua Kementerian/Lembaga dilakukan pemotongan, mendapatkan Rp95, 7 Triliun. Dan transfer ke daerah terutama Dana Alokasi Umum, DAK Fisik, tapi DAK untuk kesehatan tidak kita sentuh, DAK Fisik akan kita turunkan dan juga sebagian dari DBH, maka kita mendapatkan 94,2. Dan kemudian kami masih menambah lagi untuk melakukan penghematan. Karena kita melihat sebetulnya misi kita mengelola APBN, satu adalah merespon terhadap kebutuhan *emergency* itu, di sisi lain kita tetap menjaga APBN dalam jangka menengah panjang. Sehingga Defisit itu tidak kita biarkan kemudian melebar secara tidak terkendali. Pos-pos di dalam APBN kita yang memang akan terpengaruh langsung seperti perjalanan dinas, belanja barang, itu kita potong luar biasa sangat dalam. Dan dalam hal ini Tambahan Belanja untuk Covid-19 sebesar Rp255,1 Triliun. Ini Tambahan Belanja betul-betul. Memang kita memotong, tapi ada Tambahan Belanja 255.

Untuk sisi *below the line*, atau Pembiayaan, kita menambahkan Rp150 Triliun Cadangan. Kalau Bapak dan Ibu menanyakan darimana angka 150, ini

adalah karena kita mengantisipasi, waktu 2008-2009 terjadi suatu tekanan likuiditas di beberapa Bank, dan waktu itu kita putuskan menempatkan beberapa Uang Pemerintah di Bank Himbara untuk bisa mengurangi. Walaupun saya tetap berpedoman, masalah likuiditas Bank itu adalah harusnya dari Bank Indonesia yang melakukan. Namun dalam hal ini Pemerintah sering harus ikut turun tangan. Tentu kita berharap, ini akan dilakukan dengan secara hati-hati dan tidak terlalu membebani Pemerintah, karena ini adalah tujuannya adalah sebagai katalis. Bukan mengatasi masalah likuiditas. Masalah likuiditas adalah yang bisa mencetak uang memang Bank Indonesia. Kalau Pemerintah, dari sisi setiap belanja dan pembiayaan itu berarti kita yang mampu adalah mencetak utang.

Oleh karena itu dalam kondisi ini, postur APBN 2020 dengan *baseline* tadi, *growth*nya masih di 2,3%, kami memperkirakan Defisitnya di 5,07%, dan inilah yang dituangkan di dalam Perpres 54 Tahun 2020. Kemarin dari beberapa pertanyaan Fraksi di dalam sesi sebelumnya menanyakan detailnya. Dan kami ingin sampaikan hari ini, tentu kami melakukan ini dalam situasi bulan Maret lalu, di mana kondisi Covid berjalan luar biasa cepat perkembangannya, dan Presiden dan Kabinet dalam tekanan untuk harus melakukan respon secara cepat. Kami tidak mengklaim bahwa ini adalah desain yang *perfect*, tapi kita mencoba untuk meng-cover kebutuhan Pemerintah.

Satu hal yang ingin kami tekankan, tidak ada dan tidak boleh ada alasan bahwa kita tidak bisa melakukan langkah-langkah pengamanan kesehatan karena tidak ada uang. Makanya kami membuat keputusan-keputusan bahwa anggaran kesehatan langsung dinaikkan angka itu dari mana kita letakkan, tapi itu akan tetap kita jaga dan monitor untuk penggunaannya. Juga *social safety net*, karena dengan kemudian masyarakat tidak bisa berjualan, *work from home*, *social distancing*, maka kita langsung meletakkan jumlah anggaran untuk *social safety net* meningkat secara drastis.

Kemudian juga untuk dukungan dunia usaha dalam bentuk insentif-insentif. Kami ingin memberikan detail sebagai berikut: penerimaan pajak yang tadi kami sebutkan, turun adalah sebagai berikut: pendapatan negara akan kita prediksi mengalami selisih 472 dari yang tadiya kita perkirakan di dalam APBN 2020. Artinya, untuk Pendapatan Negara sampai akhir tahun hanya akan tercapai Rp1.760,9 Triliun atau *negative growth* 10% dari tahun sebelumnya.

Penerimaan Perpajakan, kita akan mengalami *short* Rp403,1 atau mengalami *negative growth* 5,4. *Tax ratio* akan tertekan di 9,14 dalam pengertian definisi luas.

Dari Direktorat Jenderal Pajak, selisih penerimaan dari target adalah sebesar Rp388,5 Triliun atau hanya akan terkumpul Rp1.254,1 Triliun, dibandingkan 1.642,6. Ini artinya tumbuh negatif 5,9%. *Short fall*-nya 388,5.

Ini kita hitung secara sudah cukup detail, namun tentu dalam hal ini yang tidak bisa kita antisipasi adalah *growth* atau kondisi dari perekonomian sendiri. Teman-teman Pajak berdasarkan penurunan ekonomi ini adalah berdasarkan penurunan *baseline* yang tadi kita sampaikan. Namun kita sudah memasukkan di dalam penghitungan ini, fasilitas pajak yang diberikan secara luas, kemudian yang pengurangan tarif PPh, dari 25 ke 22, seperti diatur di dalam Perpu, itu akan menurunkan Penerimaan Rp20 Triliun tapi pasti akan membantu dunia korporasi. Dan antisipasi penurunan deviden akibat mungkin perusahaan-perusahaan atau individu akan melakukan penundaan deviden karena mereka mengharap akan di dalam Omnibus Law, deviden itu akan dibukukan atau di-nol-kan, sehingga mereka menunggu tahun depan. Ini bisa sampai terjadi Rp9,1 Triliun.

Bea & Cukai akan mengalami *negative growth* 2,2% adalah memperhitungkan stimulus dari pembebasan bea masuk, untuk 19 industri. Untuk PNBP, turun 26,9% akibat adanya migas yang turun 74% dari target. Ini tadi menggunakan asumsi masih minyak di 30, tentu kalau minyak di bawah itu, turunnya akan lebih rendah. Dan SDA non migas turun di 4%, eh di Rp4 Triliun. Namun kita mendapatkan ekspektasi untuk surplus BI Rp21,1 Triliun. Deviden kita perkirakan mungkin relatif masih sama, meskipun ada indikasi dari Pak Erick, kemungkinan akan sedikit meleset dibandingkan yang ditargetkan awal.

Untuk Belanja Negara, yang akan mencapai 2613,8, ini memang yang kemudian dimunculkan ada salah satu bekas Menteri menyampaikan, "Oh Belanja Negara hanya tambah 74, Pemerintah bilangnya 400", ini karena kebingungan membaca APBN. Kalau kita bicara mengenai stimulus, itu tidak hanya diukur dari Belanja saja. Net kita tadi mengatakan stimulus itu bisa berasal dari penerimaan, yaitu dengan melakukan *revenue for gone* atau tidak meng-*collect* pajak, stimulus bisa berasal dari Belanja, melalui Tambahan Belanja, dan stimulus bisa berasal dari Pembiayaan, yaitu dengan melakukan tadi, pencetakan Surat Berharga yang kemudian bisa ditempatkan di sektor usaha. Belanja Pemerintah memang hanya naik 73,4. Dan ini karena kita memang melakukan realokasi, *refocusing* untuk Belanja-belanja K/L yang kita anggap tidak lagi menjadi prioritas dalam menghadapi Covid. Maka terjadi pemotongan K/L Rp95,7 Triliun untuk seluruh Kementerian/Lembaga, terutama Belanja Barang yang turun Rp52 Triliun, pemotongan Perjalanan Dinas Rp33,7 Triliun dan Belanja Barang Lain 18,2, pemotongan Belanja Modal Rp42,6 Triliun. Untuk pemotongan Belanja Modal ini kami ingin sampaikan, dilakukan tetap dengan hati-hati, karena kami meminta terutama dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, agar proyek-proyek tidak mengalami mangkrak, tapi mereka melakukan apa yang disebut *slowing down*, atau perlambatan saja di dalam eksekusinya atau melakukan *multiyear*, untuk dilakukan di tahun selanjutnya. Sehingga proyeknya itu tidak terhenti dan menjadi mangkrak.

Bansos naik Rp22 Triliun dari 103 menjadi 125, dan ini melalui juga realokasi dari Cadangan PBI dan kami masih Tambahan Realokasi Belanja

Lain untuk K/L 0,6% eh Triliun. Untuk Belanja non K/L, dan ini karena kemudian masuk semuanya di dalam non K/L, Tambahan Belanja yang akan sudah kita potong. Untuk Belanja Pegawai turun 3,4, ini untuk tahun ini tidak ada kenaikan tunjangan dan lain-lain, kita coba untuk menahan. Pembayaran Bunga Utang kita naik Rp40 Triliun, ini karena tadi, *yield*-nya naik dan juga untuk nilai tukar. Subsidi energi kita mengalami penurunan 27,9, subsidi non energi turun 2,4 terutama untuk subsidi pupuk, ada penghematan Rp2,1 Triliun. Belanja hibah kita naik Rp2 Triliun. Kemudian Belanja lain-lain adalah turun (-) 23. Belanja lain-lain yang 23 itu termasuk Realokasi Cadangan PBI menjadi bansos sebesar Rp22 Triliun.

TKDD mengalami penurunan 94,2 berasal dari DBH (-) Rp27,8 Triliun karena sesuai dengan Pendapatan Negara yang mengalami penurunan. DAU, turun 42,7, ini akibat penerapan 90% dan alokasi DAU turun Rp42,7 Triliun karena Penerimaan Domestik kita juga turun. DAK Fisik turun 18,1 ini karena eksekusi dan penyerapan diperkirakan 75% karena adanya kendala Covid. DAK non Fisik turun Rp1,5 Triliun, ini dengan asumsi penyerapan hampir 99% dan kita sudah memperhitungkan tambahan biaya operasional kesehatan terutama untuk insentif tenaga medis yang bisa mencapai Rp3,7 Triliun. DID kita turunkan 1,5, dengan asumsi penyerapan 90%. Dan Otsus dan dana khusus untuk DIY turun Rp1,9 Triliun dengan asumsi penyerapan untuk tambahan infrastruktur di dalam Otsus ini 95% dan dana desa kita akan sedikit turun 0,8 terutama ini akibat asumsi penyerapan yang mencapai 98,9%.

Belanja Tambahan Covid Rp255 Triliun dalam hal ini diluar dukungan pembiayaan yang sebesar Rp150 Triliun yang ada di dalam *below the line*. Jadi dalam hal ini berbagai penurunan ini kemudian kita tambahkan Rp255,1 Triliun *on top of* berbagai pengurangan. Dengan postur ini, keseimbangan primer kita akan mencapai 517,8 atau mengalami pemburukan yang cukup dalam, dibandingkan dengan rencana awal kita yang sebetulnya mengharapkan keseimbangan primer kita sudah mendekati nol. Defisit Anggaran kita juga mengalami penurunan sangat dalam, yaitu Rp307,2 Triliun menjadi 852,9 atau dalam hal ini 5,07% dari GDP. Itulah beberapa pos-pos. Mungkin nanti kalau kita tanya di kesehatan untuk membeli apa saja, nanti kita akan coba sampaikan, apa yang sudah, dan apa yang sedang dalam.

Ini adalah postur *i-account* kita, di mana Pendapatan Negara (-) 10%, Pendapatan Dalam Negeri-nya akan mengalami kontraksi 5,4 eh untuk Perpajakan 5,4 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak kontraksi 26,9. Hibah kita akan mengalami penurunan juga. Belanja kita akan naik 13,4%, terutama untuk Belanja K/L dalam hal ini masih akan mengalami penurunan karena tadi ada pemotongan. Namun Belanja non K/Lnya mengalami kenaikan. Kenapa ini dilakukan? Karena berbagai tadi pemotongan kita masukkan dalam Belanja Non K/L, sehingga dia bisa melakukan respon yang sangat cepat. Jadi seperti Keputusan kemarin sesudah pertemuan dengan Presiden, pertemuan dengan Kepala-kepala Daerah, kemudian dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, minta ada Bansos Tambahan. Itu semuanya ada

dibelanjakannya melalui Belanja non K/L, karena itu adalah masuk di dalam tadi yang kita sebutkan Rp250 Triliun yang dicadangkan untuk Covid.

Untuk Transfer ke Daerah, tadi sudah saya sampaikan, adanya penurunan. Dana Desa relatif hampir sama, dan untuk Tambahan Belanja Covid Rp255,1 Triliun. Ini adalah postur yang saya sampaikan tadi. Nah dengan adanya Defisit yang meningkat, pembiayaan APBN menjadi salah satu tantangan kami yang cukup besar, terutama tidak hanya dalam situasi yang sangat tidak normal, di mana *appetite* dan juga keinginan untuk memegang Surat Berharga Negara menjadi berubah. Maka, menurut Perpu, kami melakukan berbagai langkah-langkah untuk melakukan mobilisasi pembiayaan, semuanya dengan perhitungan untuk menjaga keamanan komposisi maupun *sustainable* ke depan.

Sumber Pembiayaan non Utang kita adalah dari dana-dana yang selama ini memang sudah ada. Pertama dari SAL kita, Sisa Anggaran Lebih, yang selama ini ada di dalam *account* kita di BI, kita gunakan Rp70 Triliun sendiri. Pos Dana Abadi, dalam hal ini bukannya kita akan menghabiskan, tapi kita akan melihat pos-pos yang selama ini memang belum digunakan di dalam Dana Abadi. Jadi kalau ada pemikiran bahwa oh kita menggunakan ini kemudian hanya untuk semuanya habis, tidak juga. Namun memang kita akan melakukan pengetatan, supaya tidak ada lagi serupiah pun yang dianggap menganggur. Kita akan optimalkan untuk Pembiayaan di dalam rangka Defisit *Financing* tahun ini. Juga dana-dana yang berasal dari BLU, kita sisir secara sangat detail, agar dana-dana yang ada di dalam BLU yang selama ini dipegang dalam bentuk *cash*, oleh BLU bisa kita gunakan sebagai sumber Pembiayaan Defisit. Kedua, kita melakukan pinjaman tunai, melalui para Multilateral dan Bilateral. Kita sampaikan di sini bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh mereka *relatively* tidak terpengaruh oleh sentimen *market*, sehingga dari sisi *rate* cukup baik. Dan juga dari sisi *conditionality* mereka dalam situasi Covid, mereka melakukan relaksasi. Sehingga semuanya tujuannya adalah untuk membantu *emergency spending* dari negara-negara seperti kita juga.

Jadi dalam hal ini *development partner* kita seperti Bank Dunia, ADB, EFD, KFW, JICA, IDIC dan IIB, termasuk Islamic Development Bank yang kemarin Presidennya juga menyampaikan pada saya untuk melakukan realokasi dari forum mereka supaya bisa dijadikan sebagai *defisit financing* dalam bentuk *budget support*.

Ketiga, tentu tidak terhindarkan, kita harus menambah *issuance* dari Surat Berharga Negara. Melakukan *up size* penerbitan dari Surat Berharga Domestik kita maupun yang dalam bentuk valas. Yang valas ini juga karena Pak Perry dalam situasi yang tertekan, Cadangan Devisa kemarin tergerus secara sangat besar, sehingga Beliau selalu menanyakan kapan Kementerian Keuangan meng-*issue* Surat Berharga ke *global bond*, karena itu akan langsung menambah Cadangan Devisa, tempatnya Bank Indonesia. Jadi 4,3 Billion yang kemarin kita issued itu langsung bisa menambah Cadangan

Devisa, Pak Perry, dan itu kemudian akan menambah *confidence*. Jadi kita dari sisi Surat Berharga Domestik dan Surat Berharga Valas, semuanya di *upsized* dari penerbitannya. Makanya lelang kita per minggu sekarang, sudah mulai meningkat. Dan inilah letaknya bagaimana Bank Indonesia untuk bisa ikut berpartisipasi sebagai salah satu pembeli di pasar perdana. Kami akan mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara melalui mekanisme market, termasuk tetap akan melakukan secara retail antara Rp50-70 Triliun. Kita juga memberikan kesempatan kepada beberapa institusi yang memiliki dana besar yang dalam manajemen mereka, melalui *private placement*, ini seperti LPS yang memiliki dana Rp125 Triliun, Badan Pengelola Haji dan yang lain-lain, mereka bisa melakukan *private placement*. Ini adalah *pure investment*, jadi kita tidak melakukan dan tidak meminta mereka, ini adalah *pure* keputusan investasi mereka. Dan Bank Indonesia sebagai pembeli di Surat Berharga Negara di Pasar Perdana adalah sebagai *tasks top* atau *last resort*.

Rincian *Outlook* Pembiayaan Utang kita dengan Rp852,9 Triliun dan adanya Pembiayaan Investasi Rp153 Triliun ini adalah termasuk apa yang disebut atau sering disebut *Pandemic Bonds*, yaitu surat berharga yang kita keluarkan atau kita terbitkan di dalam rangka untuk pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid ini. Ini adalah sebesar Rp150 Triliun yang disebutkan *below the line*. Ini yang sering juga tidak dilihat sebagai stimulus dari APBN.

Pembiayaan Utang Netto adalah Rp1006 Triliun, utang jatuh tempo kita ada Rp433 Triliun, dan Pembiayaan Bruto kita sudah mencapai Rp1439 Triliun. Kalau kita lihat uraiannya, sumber Pembiayaan Utang kita Rp1439 Triliun, dari Pinjaman adalah Rp150 Triliun, penerbitan SBN yang terbesar Rp1289 Triliun, di mana Realisasi kita sampai dengan akhir Maret adalah Rp221 Triliun. Untuk program pemulihan ekonomi, Rp150 Triliun dan penurunan GWM Perbankan yang disampaikan oleh Pak Perry itu berkontribusi sekitar Rp105 Triliun dari 1289. Jadi masih cukup banyak yang harus kita *depend*, atau kita tergantung dari market. Sehingga kita akan menerbitkan SBN, tersisa 812,9. Penerbitan SBN untuk Kuartal I eh Kuartal II sampai dengan IV, diperkirakan akan mencapai Rp856 Triliun. Sisa Penerbitan itu, 856 ini akan dipenuhi melalui Lelang di pasar domestik, SBN retail dan juga melalui *private placement* serta kita masih akan melihat kemungkinan penerbitan SBN Valas. Tentu akan sangat tergantung. Kemarin seperti Penerbitan 4,3 Triliun eh Billion itu, kita benar-benar memanfaatkan *window* yang sangat-sangat kecil. Dan kita mendapatkan *rating*, walaupun kita adalah *triple B positif* dibandingkan oleh Surat Berharga yang diterbitkan oleh Qatar, satu hari sesudah kita, yang mereka adalah *ratingnya AA*, adalah kita mendapatkan yang lebih bagus dari mereka, terutama untuk yang jangka waktu 10 tahun. Ini yang kami gambarkan, bahwa kami terus-menerus akan melihat *opportunity* yang terjadi, untuk mencari Penerbitan Surat Berharga dengan harga yang paling kompetitif.

Dan reputasi ini menjadi penting sekali. Indonesia dari sisi fiskal pruden, *fiscal credibility*, dan komunikasi kita yang luar biasa intensif, baik di internal maupun luar, sehingga kita tidak pernah menyembunyikan informasi. Tidak ada versi, oh ini pembicaraan Kementerian Keuangan dengan DPR beda dengan *rating agency*, beda dengan domestik, beda dengan internasional. Kredibilitas dan *track record* inilah yang memposisikan kita dalam posisi yang sangat baik, sehingga setiap saat kita melihat ada *opportunity*, kita akan coba *capitalize*. Inilah yang menyebabkan kenapa dalam kehati-hatian menjaga APBN, kita menekankan transparansi dan juga *sustainability* dari APBN serta kredibilitas. Karena itu menjadi sangat penting, terutama dalam suasana yang sangat kritis dan sangat menghadapi situasi di mana volatilitasnya sangat tinggi. *Track record* menjadi sangat penting bagi mereka untuk melihat kemampuan suatu negara meng-*issue bonds*. Jangan lupa dalam situasi hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, tekanan yang kita hadapi itu tidak hanya berasal dari pandemik. Faktanya seperti Argentina yang mengalami *default* dalam beberapa tahun dan sekarang baru mereka meng-*declare* tidak bisa membayar, itu pasti akan menimbulkan dampak negatif kepada *emerging market* yang lain. Jadi dalam situasi seperti ini, kenapa *track record* itu penting sekali, kenapa komunikasi kita secara detail menjadi penting tentang postur APBN. Jadi kalau ada yang mempersepsikan Perpu itu menyebabkan APBN kita tidak transparan, saya menolak dengan sangat keras. Karena selama ini justru kekuatan APBN kita adalah pada sisi transparansi dan konsistensi kita di dalam menyampaikan kepada seluruh publik, dan siapa pun saja *stakeholder*-nya, tidak ada perbedaan. Bahkan di dalam *tracking* kita yang terakhir, kita dari sisi indikator transparansi APBN kita, kita menghadapi eh kita mendapatkan evaluasi yang baik. Ini menggambarkan bahwa kita tetap sama di dalam mengelola APBN.

Nah kami ingin melaporkan kepada Komisi XI sebagai mitra kami di DPR yang melakukan supervisi, monitoring dan juga evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah, kami dengan Bank Indonesia sudah membuat SKB Menteri Keuangan dengan BI dari sisi implementasi Perpu untuk Pembiayaan Defisit melalui Pasar. Dalam hal ini BI dapat membeli SBN kita yang sifatnya jangka panjang dan kredibel di Pasar Perdana. Metode yang dilakukan adalah pertama, BI bisa ikut Lelang yang sifatnya *non competitive bids*, kemudian dalam hal ini BI juga akan mendapatkan, apabila mereka mendapatkan Hasil Lelang di mana mereka bisa mendapatkan, itu tetap *pure* berdasarkan *market mechanism*. Kemudian apabila Pemerintah membutuhkan indikasi pembiayaan setiap lelang itu tidak terpenuhi melalui lelang tersebut, maka kita akan melakukan Lelang Tambahan. Itu dilakukan apabila target penjualan lelang belum memenuhi volume yang dibutuhkan untuk pembiayaan kita. Dan walaupun itu belum memenuhi, baru kemudian *private placement* kita tawarkan. Inipun tidak hanya oleh untuk BI saja, tapi juga kepada lembaga-lembaga yang tadi kami sampaikan. Meskipun namanya *private placement*, jangan diperkirakan atau jangan dilihat bahwa ini adalah seolah-olah persetujuan, kongkalikong, yang tidak transparan. *Private placement* adalah *pure* menggunakan hasil lelang referensinya. Sehingga mereka dalam hal ini berkompetisi untuk bisa melakukan *private placement* tanpa adanya apa yang

disebut sinyal-sinyal tersembunyi mengenai *yield* maupun volumenya. Ini kredibilitas ini kita akan jaga terus di dalam menjaga Lelang Surat Berharga Negara kita.

Jumlah maksimal pembelian *non competitive* Bank Indonesia juga dijaga. Untuk SUN, maksimalnya 25% sedangkan untuk Surat Berharga Syariah adalah 30%. Nah MoU ini atau SKB ini telah mulai dilaksanakan tanggal 21 April 2020. Ini mungkin Pak Perry akan memberi hadiah saya untuk Hari Kartini. Sehingga lelang SBN kita tanggal 21 April itu yang kita memberikan target maksimal Rp14 Triliun, BI menyampaikan *non competitive*-nya yaitu Rp4,2 Triliun karena ini SBSN yaitu 30%, dan dimenangkan hanya Rp1,72 Triliun. Total *award bids* kita adalah Rp9,98 Triliun sehingga kita mengalami kekurangan sebesar Rp4,02 Triliun. Maka sesuai dengan SKB ini, BI masuk di dalam *greenshoe* atau lelang tambahan tanggal 22 April. Total *incoming bids* untuk *greenshoe* ini sebesar Rp6,3 Triliun, yang terdiri dari BI masuk Rp4 Triliun dan selain BI sebesar Rp2,3 Triliun. Kita memberikan *award* untuk lelang *greenshoe* ini sebesar Rp4,02 Triliun dari Rp6,33 Triliun *incoming bids*-nya. Dan dalam hal ini BI hanya mendapatkan Rp2,09 Triliun dan non BI Rp1,09 Triliun.

Mengingat target dari maksimal telah terpenuhi, yaitu Rp14 Triliun, maka kami tidak melakukan *market placement*. Jadi dalam hal ini *total awarded bids* dari BI dari lelang reguler sebesar Rp1,72 Triliun, dan melalui *greenshoe* adalah sebesar Rp2,93 Triliun. Sehingga Bank Indonesia memegang Surat Berharga Syariah Negara melalui lelang tanggal 21 dan *greenshoe* 22 adalah sebesar Rp4,65 Triliun. Ini contoh pelaksanaan SKB pada saat tanggal 21 April yang lalu yang merupakan lelang pertama, di mana SKB sudah dijalankan.

Untuk Perpres 54, penghematan Belanja K/L yang terus dilanjutkan, dan *refocussing* juga terus dilakukan untuk mendukung langkah-langkah, kami ingin sampaikan beberapa hal. Penghematan lanjutan kita tambahkan di atas, yang Rp90 Triliun itu, adalah Rp50 Triliun. Jadi total penghematan dari Kementerian/Lembaga adalah mencapai Rp145,7 Triliun. Ini karena kita mengantisipasi kalau Belanja dari berbagai kebutuhan Covid ini masih belum mereda. Karena kita lihat saja, dari Bansos kan setiap kali selalu ada tambahan-tambahan. Kemarin tadinya diputuskan PKH 10 Juta, kita lakukan juga untuk Bansos sembako, ada engga di sini ya? Saya lihat untuk Cadangan Belanja. Mungkin saya, nanti saya sampaikan saja kalau sudah sampai di bidang itu. Kemudian kita juga akan terus melakukan dana atau anggaran yang dihemat tadi, kemudian dikeluarkan lagi, untuk berbagai penanganan Covid. Kemarin ada yang menanyakan, bagaimana ada Rp75 Triliun anggaran untuk kesehatan, tapi ada APD yang belum terpenuhi. Masalah APD, ventilator, itu bukan masalah uang. Ada masalah pengadaannya atau jumlahnya di seluruh dunia. Waktu kita lihat di berbagai berita saja, di Inggris bahkan sempat orang menggunakan plastik sampah sebagai APD. Karena mereka tidak mendapatkan APD di seluruh dunia. Jadi dalam hal ini, pelaksanaan untuk pengadaan memang tergantung dari Gugus

Tugas maupun Kementerian Kesehatan. Kita mendorong terus, tapi point saya adalah tidak ada alasan bahwa tidak ada anggaran untuk melakukan itu. Yang sekarang menjadi *bottle-neck* besar adalah *supply side* nya. Jadi persis yang dikatakan kemarin dalam pertemuan kita dengan Komisi XI, beberapa Anggota mengatakan bahwa Covid ini adalah *shock* di sisi *demand* dan di sisi *supply*. Jadi dalam hal ini *market*-nya *collaps*. Maka uang memang bisa membantu, tapi dia tidak akan bisa jalan sebelum kita bisa memulihkan sektor keuangan, eh sektor sisi *supply*-nya maupun sisi *demand*-nya. Dan ini kadang-kadang membutuhkan waktu dan kompleksitas. Karena kalau operasi untuk memproduksi APD di dalam pabrik-pabrik manufaktur juga harus mengikuti PSBB. Jadi ini juga menimbulkan komplikasi untuk bisa menyampaikan kepada para Anggota Komisi XI yang kemarin menanyakan, bahwa kok di satu sisi pengumuman mengenai adanya anggaran Rp75 Triliun kesehatan namun kok masih ada kekurangan dari sisi APD. Jangan lupa bahwa Perpu ini baru diterbitkan pada akhir Maret, sehingga sebelumnya baru April kita bisa melakukan dan memiliki landasan hukum untuk bisa melakukan berbagai langkah-langkah *extraordinary* ini. Dan inilah yang memang dibutuhkan pada saat situasi yang bergerak sangat cepat.

Demikian juga dengan Bansos, yang tadinya hanya PKH kemudian kartu sembako dan kita kemudian menggunakan untuk pembelian untuk tarif listrik. Kita juga melihat ternyata ada peningkatan terutama untuk bantuan sembako di wilayah Jabodetabek. Maka ditambahkan targetnya. Waktu ditanya datanya dari mana, masing-masing Gubernur masih harus mencari lagi siapa *beneficiary*-nya. Dan memang inilah, kita semuanya dalam posisi adalah bekejar dengan waktu. Namun saya ingin tekankan, tidak ada alasan untuk tidak memberikan bantuan sosial karena masalah anggaran. Ini yang ingin saya tekankan, bahwa masalah APBN-nya adalah di sini untuk menjadi garda penyangganya. Tapi kita akan tetap menjaga supaya terjadi akuntabilitas.

Nah kami ingin melakukan penjelasan mengenai *refocussing*, realokasi dan penghematan Belanja K/L dan TKPD. Karena ini yang dimintakan, seperti juga sekaligus menjawab bahwa kami adalah sangat-sangat terbuka untuk bisa menunjukkan bagaimana APBN itu berubah. Satu, untuk *refocussing*, rambu-rambunya adalah *suspend* atau menunda atau membatalkan bahkan, kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak mengikuti prioritas hari ini. Perjalanan dinas, kegiatan yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat adalah target kita pertama.

Realokasi, *next*, untuk Kemenkes, kita mengadakan pengadaan distribusi obat *buffer stock* alat pengendalian Covid-19, APD bahkan untuk kalau kita masalah mengenai rapid test, reagen, PCR, ini bukan masalah dana. Tapi itu masalah *supply side*-nya, pengiriman alkes ke Natuna, pengadaan test cepat, sosialisasi edukasi, pemeriksaan lab, specimen Covid. Untuk Kemendikbud, telah dimintakan kegiatan terkait Covid terutama untuk rumah sakit-rumah sakit yang dimiliki oleh universitas yang sekarang dimobilisir menjadi rumah sakit refferer atau menjadi rujukan. Kemenhan juga

melakukan hal yang sama. Semua rumah sakit di bawah Kemenhan dilakukan dan di *up grade* dalam rangka untuk menangani Covid, baik ini RSPAD, Rumah Sakit Dr. Soetoyo, dan juga untuk pengadaan rapid test. Polri juga sama, keseluruhan Satgas Covid-19 di Polri dan rumah sakit-rumah sakit Polri. Kementerian Luar Negeri terutama untuk menangani evakuasi Warga Negara Indonesia, pembelian tiket untuk WNI kita yang terlantar di *airport*, dan juga pemberian makanan untuk para WNI kita yang ada di Malaysia. Untuk K/L yang lain, peralatan dan bahan seperti tenda, disinfektan, thermo scanner, sanitizer, masker, sarung tangan dan rapid test. Itu yang dilakukan untuk realokasi anggaran.

Perkembangan selanjutnya di dalam realisasi pemanfaatan sampai dengan hari ini, BNPB yang kita langsung memberikan anggaran Rp3,1 Triliun sesuai yang diminta, tahap 1 telah dilakukan penyaluran Rp356,1 Miliar. Ini bayangkan kecepatan untuk penggunaannya memang sangat terbatas, walaupun alokasinya sudah disetujui. Ini untuk krisis, Pusat Krisisnya, Direktorat Surveillance dan Karantina Rp15 Miliar, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp51 Miliar, Sat. Bio Medis Balitbangkes Rp20 Miliar untuk penyediaan reagen dan lain-lain. Tahap 2 kita mencairkan Rp2,78 Triliun dan prosesnya untuk pengajuan pencairan dari PPK di tiap unit kepada Kuasa Pengguna Anggaran di BNPB. Dalam hal ini, Rp2,18 Triliun adalah untuk Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, ini terutama untuk penggantian klaim perawatan rumah sakit, pengadaan alkes tahap ke-2, pembuatan ruang isolasi tekanan negatif, biaya rehab dan penggantian biaya perawatan terutama yang di Pulau Natuna dan Sebaru. Kemudian Pusat Krisis Sekjen Kemenkes, Rp600 Miliar untuk penyediaan APD, mobilisasi tim dan pengiriman logistik penanganan Covid-19.

Untuk penghematan K/L, sumber penghematan ini, Belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan Covid, semuanya ditunda. Perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, belanja non operasional, belanja barang, yang diserahkan Pemda, belanja-belanja lain. Kalau yang kita lihat salah satu adalah yang memang itu bagus untuk Pemerintah, pertama, pertemuan sekarang tidak perlu pakai ruangan, kedua, berarti konsumsi listrik turun, setiap pertemuan sekarang berarti tidak ada *snack-snack*. Itu sudah menurunkan biaya cukup banyak. Coba Bapak dan Ibu sekalian lihat, setiap kali kita dulu Rapat di Komisi XI, di Kementerian, setiap rapat pasti ada makanan kecil. Sekarang tidak ada lagi. Jadi itu juga merupakan suatu efisiensi yang kita harap bisa dijaga sampai tahun depan. Namun ini tentu akan mematikan pengusaha-pengusaha yang selama ini menjual snack. Jadi ini selalu ada positif-negatifnya di setiap gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Belanja modal. Seperti yang kami sampaikan tadi, ditunda untuk di *multiyear*-kan. Kegiatan proyek yang sudah dikontrakkan, untuk dinegosiasikan lagi kepada pihak ketiganya untuk bisa ditunda pengerjaannya. Dan Belanja Pegawai untuk tunkin, akan kita tunda kenaikan tunkin untuk CPNS dan terutama untuk program *delayering* yang waktu itu Bapak Presiden menginstruksikan harusnya bisa dilakukan di tahun 2020 ini.

Yang kita kecualikan untuk dipotong adalah belanja untuk penanganan Covid dan untuk kesehatan, seperti stunting, penanggulangan stunting tetap kita jaga. Untuk belanja kesehatan, untuk menurunkan kematian ibu dan bayi, tetapi kita jaga. Pemberantasan penyakit menular lain seperti TBC, HIV AIDS, dan demam berdarah tetap kita jaga, meskipun kita tetap minta ada efisiensi. Belanja bantuan sosial, yang menjadi bagian dari stimulus tetap kita jaga. Pagu dari non rupiah murni untuk PNPB, BLU, PHLN, itu yang tidak dapat direalokasi ke program lain, itu tidak bisa kita potong juga karena dia sudah *earmarked*. Kemudian untuk pemanfaatan hasil tadi, *refocussing* dan pemotongan itu adalah untuk berbagai Kementerian/Lembaga. Ini tidak usah kita ulang lagi ya, ada pengadaan sanitiser, masker dan lain-lain, memberikan bantuan ke masyarakat, yang sesuai dengan tugas dari Kementerian/Lembaga dengan jumlah dan harga yang dipertanggungjawabkan. Tidak menambah pendapatan (*take home pay*) dari para aparatur, kecuali yang sudah diatur dan diizinkan oleh Menteri Keuangan. Anggaran pendidikan, karena dia adalah amanat Konstitusi yang tidak bisa kita kurangi, tapi pemanfaatannya diminta untuk tetap *a line* dengan Covid-19 terutama untuk meningkatkan kesiapan rumah sakit dari perguruan tinggi dan berbagai hal yang bisa mendukung masyarakat menghadapi Covid ini. Dan K/L yang mengelola rumah sakit dan fasilitas kesehatan diminta untuk memperkuat penanganan Covid-nya dan inilah yang mendapatkan tambahan Belanjanya.

TKDD, ini kami sedikit detailkan, ini karena kemarin sempat terjadi adanya DBH dari DKI. DBH kita memang akan mengalami penurunan terutama dari CHT DBH SDA Migas karena turun dan belanja infrastruktur 25%, yang ada di dalam Dana Transfer Umum, akan bisa direalokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Sisa dari DBH Reboisasi, dapat digunakan juga untuk Covid. Jadi dalam hal ini untuk Pemerintah Daerah bisa menggunakan DBH, walaupun terjadi penurunan, mereka bisa menggunakan realokasi untuk melakukan Covid.

Saya ingin jelaskan kepada Komisi XI, terkait DBH DKI kemarin, di dalam Undang-undang APBN kita, memang selalu ada 2 untuk pos DBH ini. DBH untuk 2020 berdasarkan proyeksi penerimaan kita tahun 2020 dan DBH tahun 2019 yang kurang bayar. Ini akibat bahwa pada saat 2019 estimasi dari pembayaran DBH-nya mungkin tidak meng-*capture* keseluruhan penerimaan. Nah untuk DBH 2019 yang ada di tahun 2020 ini, biasanya memang kita bayarkan sesudah LKPP dan audit dari BPK. Makanya, waktu pembayaran DBH itu biasanya dilakukan pada bulan September, yaitu pada saat Undang-undang LKPP kita sudah di *approve*, sudah dilakukan sama DPR, dan kemudian kita baru membayarkan. Itu sudah merupakan praktek selama ini. Nah akibat Covid ini, karena DKI PAD-nya menurun tajam jadi 50%, dari biasanya mereka mendapatkan lebih dari Rp40 Triliun, mereka menghadapi *cash flow*, sehingga mereka meminta DBH 2019-nya dibayarkan lebih cepat. Nah waktu itu kami memang melihat bahwa kalau kita menunggu audit dari BPK, berarti kita baru akan membayar DBH 2019 itu pada Bulan September. Maka kita putuskan melalui Keputusan Menteri Keuangan, bahwa DBH 2019 saya bayarkan 50% untuk semua Daerah, karena tidak hanya DKI yang

mengalami kekurangan. Jadi semua Daerah di Indonesia, sekarang sudah mendapatkan DBH 2019 kurang bayarnya 50%. Yang sisanya kita akan menunggu audit dari BPK. Meskipun kemarin BPK menyampaikan kita tidak akan pernah melakukan koreksi, dari sisi akuntabilitas kita akan tetap menjaga bahwa yang kita bayarkan memang betul-betul sesuai dengan hasil auditnya.

Untuk DID tadi, kita bisa meminta kepada Daerah untuk melakukan realokasi dari APBD-nya untuk penanganan Covid-nya. Rp4,1 Triliun untuk penanganan Covid di bidang kesehatan. DAK Fisik Rp9,3 Triliun kita minta direalokasi untuk membantu Covid, yaitu pembangunan ruang isolasi, pengadaan ventilator dan lain-lain. Kemudian Dana Desa, 30% dipakai untuk BLT, di dalam rangka untuk pemberian dukungan kepada masyarakat terdampak, termasukantisipasi kalau ada masyarakat yang pulang ke desa dan mereka membutuhkan adanya dukungan karantina dan lain-lain. Jadi dari APBD ada Rp51,7 Triliun yang direalokasikan dari *existing* APBD untuk penanganan Covid.

Outlook dari APBD berdasarkan Perpres adalah sebagai berikut: Pendapatan akan mengalami koreksi 228,5. PAD-nya akan turun 114,5 dari 323, 328 menjadi 213. Transfer ke Daerah lainnya akan mengalami turun 94, ini yang tadi dialihkan untuk penanganan Covid. Kemudian Belanja Pegawai di Daerah, berdasarkan Surat Edaran Bersama juga minta untuk dilakukan perubahan. Belanja Pegawai terutama tunjangan-tunjangan di Daerah yang melebihi tunjangan pusat, mereka dipotong maksimal sama dengan Pusat. Belanja Barang kita minta dipotong 50% untuk dialokasikan kepada Covid, Belanja Modal juga dipotong 50%. Jadi dalam hal ini kita sudah membuat kemungkinan dari Daerah dengan Instruksi ini, akan ada Rp94,39 Triliun yang bisa dialokasikan untuk penanganan Covid di dalam APBD. Ini di atas yang Rp245 Triliun yang tadi saya sampaikan.

Nah ini mungkin hal-hal yang mungkin sedikit lebih detail untuk tambahan, karena banyak sekali, saya yakin Komisi XI juga ditanya bagaimana Bansos-bansos ini. Tambahan Belanja kita untuk kesehatan, yang kita masukkan juga, pertama untuk bantuan iuran bagi pegawai bukan penerima upah. Ini akibat putusan Mahkamah Agung untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS yang kelas 3, maka untuk PBPU ini kita akan berikan subsidi Rp3 Triliun sehingga mereka tetap membayar 42, di mana mereka tetap membayar Rp25.500,00 namun sisanya untuk mencapai 42 dibayarkan oleh Pemerintah.

Insentif tenaga medis yang diumumkan untuk dokter spesialis Rp15 Juta, dokter umum Rp10 Juta, kemudian Rp7,5 Juta, untuk para perawat dan tenaga medis lainnya Rp5 Juta, itu akan diperkirakan 5,9 Juta. Santunan kematian kita perkirakan akan keluar Rp300 Miliar, Belanja penanganan Covid Rp65,8 Triliun yang tadi masih akan dipecah menjadi berbagai Belanja rumah sakit, termasuk untuk penanganan pasien.

Social safety net yang Rp110 Triliun adalah tambahan untuk jaringan pengaman sosial itu Rp65 Triliun sendiri, yaitu untuk PKH menambah 8,3, kartu sembako Rp15,5 Triliun, kartu pra kerja Rp10 Triliun tambahannya. Jadi yang tadinya Rp10 Triliun menjadi Rp20 Triliun. Diskon tarif 3,5, insentif perumahan Rp1,5 Triliun, bantuan sembako Jabodetabek, dan bantuan bansos tunai untuk non Jabodetabek sebesar Rp19,6 Triliun. Dan jaring pengaman sosial lainnya Rp6,5 Triliun. Kebutuhan pokok untuk operasi Rp25 Triliun, di mana kemarin sudah diputuskan di Sidang Kabinet, akan ada tambahan sekitar Rp9 Triliun lagi, eh 9 juta orang yang akan mendapatkan bansos beras dengan anggaran diperkirakan Rp10,5 Triliun. Dan Cadangan kebutuhan pokok operasional lainnya 14,5 ini terutama melalui Bulog. Dan penyesuaian Belanja pendidikan Rp20 Triliun. Untuk dunia usaha Rp70 Triliun, itu terutama dari sisi perpajakan yang ditanggung Pemerintah dan bea masuk yang ditanggung Pemerintah.

Kami ingin masuk kepada yang pemulihan ekonomi sedikit, jadi kalau Rp65 Triliun dukungan untuk rumah tangga tadi, bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapatkan bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga. Ini sudah mencakup hampir diatas 40% terbawah dari penduduk Indonesia. Sekarang ini dengan ekspansi bansos termasuk kartu prakerja, kita perkirakan masyarakat yang mendapatkan bantuan Pemerintah itu bisa mencapai sampai 60% desil terbawah, 50-60% jadi lebih dari separuh dari rakyat kita mungkin tersentuh oleh bantuan sosial itu melalui satu atau lain hal.

Untuk dukungan bagi Usaha Kecil Menengah, karena seperti tadi saya sampaikan, kesehatan ini menyebabkan *social distancing*, maka sektor informal dan masyarakat ekonomi bawah terkena dampak duluan. Kita memberikan beberapa program yang kemarin baru saja diputuskan oleh Bapak Presiden, makanya kami mohon maaf kenapa Rapat Kerjanya diundur pada hari ini. Kemarin telah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa akan diberikan subsidi bunga kredit untuk seluruh pelaku usaha yang meminjam di Perbankan, yaitu Bank komersial, Bank Syariah, yang mereka pinjamannya dibawah Rp10 Miliar. Untuk yang Kredit Usaha Rakyat, sampai kepada UMI dan sampai kepada usaha-usaha kecil yang ada di non perbankan, seperti di pegadaian, di PMN, di LPDP, Koperasi, UMKM Pemerintah Daerah, LPM UKP, Koperasi Penyalur UMI, dan bahkan calon petani juga dalam hal ini.

Kalau kita lihat desain dari bantuan sosial kita adalah sebagai berikut: mengcover lebih dari 40%, kalau yang 40% itu kita menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial. Itu adalah data yang ada di dalam Kementerian Sosial yang tentunya itu diperoleh melalui proses *bottom up* dan verifikasi. Jadi datanya memang berasal dari bawah, dan kemudian mengidentifikasi 40% masyarakat kita yang dianggap ada di dalam *bottom 40* atau yang paling rendah. Dan mereka tercover oleh berbagai bansos ini, yaitu dari PKH, kartu sembako, kemudian kartu-kartu yang lain seperti Kartu Indonesia Sehat, itu semuanya masuk di dalam hal ini. Peta di selanjutnya akan lebih jelas mengenai bagaimana bansos ini diterima oleh masyarakat. Kalau 10 juta PKPM untuk PKH yang paling kiri biru, itu dia adalah mengenai hampir di

bawah 20% termiskin. Kalau untuk kartu sembako, 20 juta kartu penerima eh kelompok penerima, itu berarti dia mencapai 35% masyarakat termiskin. Kemudian 450 VA 24 juta rumah tangga dan 900 VA 7,2 juta rumah tangga yang mendapatkan tadi, gratis dan diskon 50% itu berarti sudah mencapai 50% dari masyarakat kita terbawah. Untuk kelompok penerima bansos tunai non Jabodetabek, ini yang diberikan BL Tambahan itu adalah sesuai dengan DKTPnya dari, DKTSnya dari Kementerian Sosial, itu adalah 20 juta di atas kelompok penerima kartu sembako. Makanya dia masuk kepada 40% dan menuju ke 50% dari masyarakat terbawah kita yang akan mendapatkan BLT. Semuanya adalah disamakan oleh Bapak Presiden, Rp600 ribu per bulan standarnya untuk yang bansos-bansos yang lain. Kalau yang PKH itu karena *conditionality*, 1 keluarga bisa mendapatkan antara Rp1,3-1,5 juta per bulannya. Untuk bansos sembako Jabodetabek yang kemarin para Gubernur meminta tambahan itu kepada Bapak Presiden, maka ada tambahan Rp1,3 juta untuk DKI dan Rp600 ribu untuk Bodetabek, itu adalah mencakup hampir mendekati desil ke-66. Jadi hampir mendekati 60% dari masyarakat kita.

Kemudian untuk BLT Dana Desa yang diluar penerima PKH itu berarti mereka akan mencakup lebih dari 50% kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat, layer dari layer bansos-bansos ini memang kemungkinan juga ada yang mendapatkan dobel, tapi kita coba untuk memberikan bantalan sosial. Kemudian kartu pra kerja, yang memang bisa jadi 5,6 juta itu karena tadinya adalah para pekerja, bisa jadi mereka ada di desil 6 atau bahkan 7 dalam hal ini. Dan ini yang memang kemudian menimbulkan banyak sekali pembicaraan di media sosial, di berita-berita, mengenai pertama datanya, sasarannya, eksekusinya, koordinasinya. Dan ini Bapak Presiden terus akan melakukan berbagai apa, rapat dengan Kepala Daerah, untuk bisa terus memperbaiki eksekusinya. Banyak dari itu adalah baru di eksekusi awal April yang lalu. Jadi memang dari minggu pertama ke minggu kedua, nanti akan terlihat, semoga akan semakin membaik dan makin jelas targetnya.

Saya mungkin tidak akan, ini untuk beberapa, supaya mendapatkan detailnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian di Komisi XI, kalau PKH ini karena dia adalah *conditionality*, jadi tergantung keluarganya punya ada ibu hamilnya engga, ada anak usia dininya engga, ada anak SD engga, ada anak SMP engga, ada anak SMA, ada orang tua lansianya, ada anak yang disable, itu makanya mereka dapat berdasarkan *condition*-nya masing-masing komposisi. Maka kalau dari sisi jaring pengaman, ini sebetulnya adalah yang paling bagus, karena dia didesain untuk setiap keluarga miskin bisa mendapatkan dukungan sesuai dengan komposisi keluarganya dan tantangan mereka. Namun dalam situasi *emergency* ini tidak mungkin apalagi *conditionality*nya terutama sekolah mungkin libur dan lain-lain. Tapi kita akan mencoba tetap mempertahankan program bansos yang bagus ini.

Sembako, tadi saya sampaikan ini adalah flat, Rp200 ribu per bulan, yang akan diberikan dari bulan Maret sampai dengan Desember. Berarti keluarga PKH juga akan mendapatkan. Selain PKH, dia dapatkan sembako. Namun yang diatas itu hanya dapat dari PKH eh dari sembako. Kemudian diskon tarif, kami sampaikan, ini sudah mulai dirasakan bulan April kemarin,

jadi bulan April kemarin banyak 450 VA yang sudah tidak perlu membayar dan ini sangat-sangat efektif, baik untuk yang melalui pelanggan pra bayar maupun pasca bayar. Ini targetnya pasti tercapai karena memang *by name by address* berdasarkan berbagai hal.

Untuk Bansos DKI dan Jabodetabek, ini yang dilakukan selama ini memang merupakan suatu kondisi dan situasi terutama pada saat Pemerintah akan melakukan kebijakan PSBB. Pembatasan sosial jangan sampai membuat masyarakat tidak mendapatkan kebutuhannya mereka. Di DKI, penerima adalah 1,3 juta KK, ini di atas yang sudah ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Untuk Bodetabek, 600 KK, 600 ribu KK juga diatas apa yang sebelumnya sudah diberikan oleh Pemerintah Daerahnya. Bantuan ini diberikan dalam bentuk paket sembako Rp600 ribu per keluarga, selama 3 bulan. Penyalurannya dilakukan 2 kali dalam sebulan atau Rp300 ribu per paketnya. Kebutuhannya 3,42. Bansos khusus untuk DKI dalam bentuk sembako ini telah disalurkan ke 210.663. Ini yang menjadi salah satu sumber munculnya berita. Karena targetnya 1,3 tapi minggu pertama baru disalurkan tidak lebih dari 210 ribu. Jadi memang pasti ada yang merasa saya mestinya dapat, tapi belum dapat, karena ini tadi kapasitas untuk menyalurkan ternyata sangat-sangat terbatas. Makanya Presiden kemarin sudah membahasnya di dalam Sidang Kabinet, akan melakukan mobilisasi termasuk menggunakan, karena tadinya digunakan untuk memberikan kesempatan kepada gojek dan semua supplier, terutama pasar-pasar untuk berpartisipasi. Tapi kemudian memunculkan kondisi, kecepatannya tidak mampu bersama-sama.

Ini adalah *trade off* yang kita hadapi di lapangan oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Jadi meskipun kita punya niat baik, kita sudah sediakan anggaran, tapi dari eksekusi menyangkut untuk mobilisasi kepada seluruh masyarakat secara serentak, itu menjadi tantangan yang luar biasa.

Kemudian terakhir untuk Bansos untuk non Jabodetabek, 9 juta, ini mungkin akan memunculkan berbagai reaksi. Karena angka 9 juta itu adalah dana, data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di tempat Kemensos. Pasti ada inklusif dan *exclusion error*, *inclusion* dan *exclusion error*. Ada orang yang tadinya tidak miskin sekarang jadi miskin. Ada yang tadinya nyaris miskin sekarang jadi tidak miskin. Tapi data itu belum *up dated* sampai dengan bulan terakhir. Sehingga nanti pasti akan menimbulkan juga pertanyaan kalau ada yang merasa mereka harusnya berhak, dan yang lain-lain.

Penyaluran melalui PT. Pos untuk 8 juta, ini juga nanti akan kita lihat kehandalannya dan melalui Himbara 1 juta. Kalau ini kan *by name by account number*. Jadi mungkin tidak menimbulkan persoalan karena tidak ada bansos yang datang ke masing-masing rumah dengan adanya barang yang datang. Tapi ini masuk ke *accountnya*. Kebutuhan anggarannya Rp16,2 Triliun.

Nah untuk Dana Desa, ini juga perubahan 30% menjadi BLT, ini juga kriterianya hanya sangat simpel, mereka tidak, belum mendapatkan PKH dan sembako, sehingga dia akan memperluas basis bansosnya. Namun tetap

nanti saja akan muncul debat seperti di daerah, desa, ada yang mengatakan bahwa menurut Kepala Desanya yang harusnya mendapat adalah a, b, c, d tapi menurut data yang lain adalah x, y, z. Ini kemudian muncul, akan muncul. Belum kalau kita tambahkan adanya komplikasi menjelang pilkada, pilkades, dan lain-lain. Nah BLT Dana Desa ini kita memang melakukan tetap pendataannya. Desa melakukan pendataan, dibantu oleh relawan desa. Pendataan difokuskan mulai dari RT, RW, dan desa hasil pendataan keluarga miskin, akan dilakukan pembahasan melalui Musyawarah Desa. Kemudian Kepala Desa menandatangani dokumen untuk hasil data itu, dan dokumen itulah Kepala Desa melaporkan kepada Bupati untuk kemudian dibagikan. Ya kita berharap dengan proses yang *bottom up* dan diharapkan transparan, akan sesedikit mungkin terjadi penyimpangan.

Kartu pra kerja, ini juga menimbulkan banyak sekali polemik. Namun idenya adalah meng-komplemen apa yang selama ini sudah dilakukan secara *offline*. Dan di dalam kartu pra kerja sebenarnya tadinya desainnya online dan *offline*. Tapi karena situasi PSBB, yang diluncurkan yang hari ini adalah yang online. Banyak yang ditargetkan, terutama adalah mereka yang terkena PHK, dan juga mereka-mereka dari kelompok informal yang selama ini mendapatkan kondisi akibat PSBB, mereka menurun tajam pendapatannya. Mereka bisa melakukan pendaftaran secara online, dengan insentif sama, Rp600 ribu per bulan dan biaya pelatihan maksimum Rp1 juta. Kalau mereka membeli pelatihannya dibawah Rp1 juta, uangnya tidak bisa dipakai dan nanti masuk ke uang negara lagi. Memang ini masih dalam satu minggu pertama, kemarin jumlah pelamarnya sudah lebih dari 8 juta namun dalam minggu pertama mungkin baru 100 ribuan atau 130 ribu yang bisa dilayani. Ini yang kemudian selalu memunculkan ekspektasi antara yang melamar 8,2 juta dengan *batch* pertama, *batch* kedua. Dan tentu dalam hal penyelenggaraannya akan terus melakukan perbaikan. Yaitu dari sisi kontennya maupun siapa-siapa saja platform yang bisa memberikan pelatihan tersebut. Kita tidak berharap semuanya nanti adalah online. Karena ini adalah anggarannya Rp20 Triliun, jadi kalau nanti seandainya ini Covid sudah akan menurun pada bulan-bulan depan, maka pelatihan yang sifatnya *offline*, akan bisa dilakukan. Dan itu kemudian bisa dimobilisir. Jadi kenapa kartu pra kerja ini desainnya memang dulu adalah meningkatkan kualitas skill. Tapi dengan adanya Covid, bisa menjadi sedikit bansos yang sifatnya BLT tapi tetap memberikan insentif bagi mereka untuk melihat pelatihan.

Kemudian untuk UMKM, ini yang bagian terakhir, Pimpinan, adalah subsidi bunga tadi, yang diberikan kepada seluruh UMKM yang memiliki pinjaman di bawah tadi, untuk yang mendapatkan subsidi seperti KUR, adalah 6% 3 bulan pertama bunganya kita bayarkan, dan 3 bulan kedua dipotong 3%. Jadi mereka subsidi bunganya 6% dan 3% untuk 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua. Ini untuk pinjaman di bawah Rp500 Juta. Kalau untuk pinjaman yang menengah, di atas Rp500 juta hingga Rp10 Miliar, maka subsidi bunga yang diberikan oleh Pemerintah adalah 3% selama 3 bulan dan 2% untuk 3 bulan kedua. Ini menyangkut 165,4 Angsuran yang akan ditunda selama 6 bulan dan subsidi bunganya 27,26. Siapa yang akan kemungkinan bisa mendapatkan manfaat ini? 1,60 juta Debitur di BPR, 20 juta Debitur di

Perbankan, termasuk Perbankan Syariah, dan 6,76 juta Debitur di Perusahaan Pembiayaan, ini termasuk para sopir ojol yang mencil motornya.

Kemudian untuk yang UMKM, KUR, UMI, Mekar, kita memberikannya lebih besar, karena mereka pinjamannya maksimum biasanya hanya Rp10 Juta. Mereka hanya mendapatkan subsidi bunga selama 6 bulan. Untuk yang setara dengan KUR yang tadi Rp500 Juta, adalah sama, 6% selama 3 bulan dan 3% selama 3 bulan. Namun untuk yang dibawah KUR, seperti UMI, Mekar, PMN dan Pegadaian, karena pinjamannya jauh lebih kecil dari KUR, mereka mendapatkan 6% subsidi bunga selama 6 bulan penuh dan penundaan angsuran selama 6 bulan. Jadi dari mekanisme ini 8,3 juta para Debitur KUR akan mendapatkan fasilitas tadi, penangguhan angsuran pokok dan mendapatkan subsidi bunga selama 6 bulan. Kemudian UMI, Mekar dan Pegadaian, 1 juta UMI, 6 juta Mekar dan 10,6 juta Pegadaian, mereka bisa mendapatkan fasilitas ini, penundaan angsuran 6 bulan plus subsidi bunga selama 6 bulan sebesar 6%. Anggarannya tadi adalah Rp6 Triliun.

Dan untuk kelompok usaha lain yang tidak punya akses kepada Perbankan atau tidak melalui Perbankan juga tetap mendapatkan. Seperti LPDP, itu ada 30 ribu lebih, UMKM online, ini adalah *merchant-merchant* pengusaha kecil yang masuk sebagai penjual di online, ada 3,7 juta, kemudian ada 16 ribu Debitur, Koperasi 1,7 juta, yang belum mereka menyalurkan UMI tapi tidak semuanya mendapatkan UMI, ultra mikro. Kemudian UKM Pemda, ada 758,4 ribu dan petani, calon petani itu 5.500, ini CPCL ini salah satu program. Jadi total untuk mereka, subsidi bunganya juga 6 bulan yang direlaksasi untuk penundaan angsuran, dan 6 bulan diberikan subsidi bunga sebesar 6%. Ini anggarannya 489,7. Jadi ada Rp 13,87 Triliun yang ditunda. Nah mekanismenya nanti kami akan bersama-sama dengan OJK, untuk bisa membantu bagaimana untuk terutama yang melalui Perbankan dan Lembaga Pembiayaan bisa dilakukan identifikasi kepada mereka yang akan berhak mendapatkan restrukturisasi dan subsidi bunga tersebut. Ini yang akan dituangkan dalam SKB kami dengan OJK. Tentu Bank-bank tadi yang harus melakukan penundaan angsuran dan subsidi bunga ini, mereka akan menghadapi kesulitan *cash flow* karena mereka biasanya mendapatkan cicilan, sekarang tidak mendapatkan. Inilah yang mungkin kita perlu untuk selesaikan melalui berbagai program untuk bisa membantu mereka. Terutama tadi termasuk penggunaan Surat Berharga Negara sebanyak Rp150 Triliun. Namun kita tetap berharap bahwa kalau masalah likuiditas, seharusnya itu bisa diselesaikan melalui interbank dan oleh Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*.

Saya ingin menyampaikan bahwa insentif pemerintah yang diberikan kepada dunia usaha itu tidak hanya dari sisi tadi, belanja-belanja dan subsidi-subsidi, tapi juga insentif dari sisi perpajakan. Insentif perpajakan dan kepabeanan sudah kita lakukan. Kita melakukan untuk pembebasan PPh Pasal 22 impor, pembebasan Bea Masuk, PPN yang ditanggung atau tidak dipungut, PPN lokal, itu semuanya tertuang di dalam PMK-PMK, terutama untuk seluruh pengusaha di kawasan industri tujuan ekspor dan kawasan

industri berikat. Ini lebih dari berapa ribu dari perusahaan-perusahaan di sini, terutama yang menghasilkan produksi seperti APD, disinfektan, itu mereka biasanya ada di Kawasan Berikat. Kita memberikan dukungan penuh kepada mereka. Jadi teman-teman Bea Cukai luar biasa, untuk membantu mereka terutama di dalam mengawasi barang-barang yang keluar dan barang-barang yang dibutuhkan terutama untuk bahan baku mereka. Kemudian insentif perpajakan, kita juga berikan, yang tadinya hanya untuk sektor industri, sekarang sudah 18 sektor sudah dimasukkan. Lebih dari 780 KBLI, ini termasuk sektor-sektor, tidak hanya di manufaktur, tetapi perdagangan, perhotelan, pengangkutan, bahkan kesehatanpun masuk di sini. Kemudian pembebasan PPh UMKM tadi yang sudah saya sampaikan, dan fasilitas PPN terutama untuk bidang-bidang tertentu. Jadi 18 sektor yang masuk di dalam insentif pajak yang kita berikan itu ada di dalam halaman ini, semuanya mungkin bisa dilihat. Luar biasa, hampir semua sektor, real estate, pendidikan, konstruksi, profesi, ilmiah dan teknis, dan lain-lain, kesenian, hiburan, itu kita masukkan di sini.

Saya rasa itu Pimpinan, saya harap ini bisa memberikan apa, gambaran yang cukup detail dan lengkap, apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam sebulan terakhir. Ini semuanya jangan lupa dilakukan dalam konteks satu bulan Perpu dan kemudian pemanfaatannya. Dan masih semuanya masih akan kita *improve* karena kita lihat dampak Covid ini masih akan terus berkembang. Memang tekanan kepada APBN akan dirasa makin berat pada 2 bulan ke depan, kami mohon untuk mendapatkan dukungan dari Komisi XI, agar kita semua bisa menjaga ekonomi kita, menjaga masyarakat dan menjaga APBN agar tetap bisa berjalan dengan baik.

Terima kasih Bapak Pimpinan, mohon maaf sangat panjang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan yang telah memberikan pemaparannya, hampir 2 jam, memang banyak yang harus disampaikan. Jadi sesuai dengan jadwal, tadi kita bahwa kita harus *break* dulu. Sebetulnya setelah kita *break* Sholat Dhuhur, kepada Gubernur Bank Indonesia. Tetapi mungkin Menteri PPN sudah ada di sini, mungkin meminta duluan karena sedang melakukan Musrenbang. Pak Suharso sudah ada di sini?

Oke baik kalau begitu mungkin kita *break*, kita Sholat Dhuhur 15 menit, jadi kita mulai tepat jam 13.00 WIB, kita persilakan Gubernur Bank Indonesia untuk memberikan pemaparannya. Jadi kita skor dulu 15 menit ya? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Oke, kita sholat dulu ya, kita skors 15 menit.

**(RAPAT DISKORS)
(SKORS RAPAT DICABUT)**

(Rekaman terputus)

GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):

Slide berikutnya, memang tadi Bu Menteri juga sudah menyampaikan, ini memang kalau kita membuat proyeksi ekonomim untuk Covid ini betul-betul kompleks, karena memang isunya adalah di masalah kesehatan, kemanusiaan, yang bisa berdampak kepada ekonomi, kalau tidak kita atasi dengan baik itu akan bisa menurunkan ekonomi dan bisa berisiko kepada sektor keuangan. Oleh karena itu memang di dalam membuat proyeksi-proyeksi ya ada beberapa memang asumsi yang memang dipakai dan itu barangkali yang membuat kenapa satu proyeksi dengan proyeksi yang lain itu berbeda. Dalam membuat asumsi-asumsi itu memang biasanya akan juga dipengaruhi bagaimana kondisi ekonomi global, juga bagaimana pola pencegahan pandemi Covid di dalam negeri, termasuk juga di PSBB. Demikian juga, hal yang ketiga, terkait dengan respon kebijakan apa. Nah ini sebetulnya juga sekaligus sebagai jawaban kepada Pak Eriko begitu ya, untuk memberikan penjelasan. Tentu saja nanti Pak Eriko kalau memang membutuhkan penjelasan lebih detail angka-angkanya, kalau Pak Eriko kan pake ekonometrik, modelling dan segala macam, nanti waktunya bisa kita sediakan khusus untuk detailnya, ini karena terbuka umum barangkali mungkin saya hanya akan menyampaikan yang esensi-esensinya, supaya bisa menyingkat waktu.

Nah kami ingin menyambungkan *up date* mengenai proyeksi berdasarkan 3 asumsi. Yang pertama, asumsi kami memang kami meng-*up date* pertumbuhan ekonomi global. Setelah dulu kami asses di dalam Rapat Dewan Gubernur, ternyata itu memang turun itu lebih dalam. Bahkan di tahun 2020 ini kalau kita lihat beberapa Lembaga, seperti IMF, itu juga resesinya dalam. Nah dalam kita membuat resesi, kami di Bank Indonesia, kami perkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 itu (-) 2% atau resesi dengan pertumbuhan negatif 2%. Tapi akan meningkat ke 5,1% pada 2021. Kami di dalam membuat proyeksi juga melihat, kira-kira harga minyak untuk minasnya berapa, karena biasanya nanti berpengaruh terhadap ekonomi kita. Kami asumsikan rata-ratanya 35 per barrel, karena bisa di kuartal satu masih rate tertinggi, sekarang turun drastis, mungkin nanti akan naik. Ya ini asumsi-asumsi kami.

Juga harga komoditas ekspor Indonesia secara keseluruhan itu tahun ini turun 14,2% tapi naik tahun depan naik 12,9%. Untuk suku bunga flat, tahun ini sama tahun depan kami asumsikan tetap, tidak berubah, yaitu 0,25%. Ini adalah asumsi-asumsi yang berkaitan dengan global.

Di dalam negeri bagaimana, tentu saja ada yang harus kita lihat asumsinya di dalam negeri, yang nomor 2 itu bagaimana pola penanganan mengenai pencegahan Covid-19. Setelah kita melihat juga, penerapan PSBB di berbagai wilayah yang juga bertambah. Nah di dalam kita membuat proyeksi ini Bapak-Ibu, kami berasumsi bahwa penerapan PSBB itu di berbagai wilayah yang kemudian kalau ditotal-total semua itu mencakup kurang lebih sekitar 70% dari perekonomian nasional. Jadi kalau kita tambah-tambah itu *size* ekonominya seperti apa. Dan kemudian secara keseluruhan ini puncaknya adalah 2,5 bulan yaitu April, Mei dan separuh Juni. Itu asumsi kami, kalau lihat dari pola-pola grafiknya. Nah kemudian setelah pertengahan Juni mulai mereda, Juli, dan kemudian asumsi kami itu berakhir di 2020.

Nah tentu saja yang memang dampaknya terhadap ekonomi yang berat adalah pada periode 2,5 bulan ini. Karena pembatasan sosial ini tentu saja akan berpengaruh pada menurunnya berbagai aktivitas ekonomi, baik pendapatan dan juga masyarakat yang pekerja juga tidak bisa bekerja, juga berbagai aktivitas investasi, produksi, ekspor, impor, nah itu berpengaruh tentu saja yang paling dalam adalah di bulan April, Mei dan di bulan sampai dengan pertengahan Juni ini. Itu hitung-hitungan kami adalah dari pola penerapan PSBB.

Yang ketiga, di dalam kami membuat proyeksi juga kami masukkan, respon kebijakannya. Dan Pemerintah sudah menempuh stimulus fiskal yang tadi Bu Menteri Keuangan sudah jelaskan yang secara keseluruhan ada defisit 5,07% dari PDB. Kami juga melakukan berbagai stimulus moneter dan makro prudensial oleh Bank Indonesia dan sebentar lagi kami akan jelaskan secara rinci. Juga di dalam membuat proyeksi kami juga memasukkan berbagai langkah-langkah yang ditempuh oleh Pak Wimboh di dalam melakukan restrukturisasi kredit dan kelonggaran sejumlah ketentuan mikro prudensial oleh OJK. Nah berdasarkan asumsi-asumsi ini nanti kami akan menyampaikan proyeksinya.

Nah sebelum kesana, kami juga menyampaikan slide berikutnya, itu berkaitan bagaimana respon-respon kebijakan yang kami sudah lakukan. Saya tidak ingin berpanjang lebar, karena itu sudah kami sampaikan dalam Rapat Kerja tanggal 6,8, maupun 2 hari yang lalu. Esensinya sebetulnya, Bank Indonesia terus di samping menjaga inflasi dan nilai tukar juga berkoordinasi erat dengan Pemerintah dan OJK dan berbagai pihak untuk bagaimana mencegah penurunan ekonomi lebih lanjut dari dampak Covid ini.

Yang pertama, kami sudah menurunkan suku bunga 2 kali, sehingga menjadi 4,5%. Ini juga konsisten dengan mandat inflasi, $3 \pm 1\%$ dan perlunya mendukung pemulihan ekonomi. Sebetulnya kami masih punya ruang untuk menurunkan suku bunga, dengan inflasi yang rendah dan perlunya mendukung pemulihan ekonomi. Kami di dalam rencana jangka pendek ini memang kami memang kemarin di dalam *endingnya* kami putuskan untuk mempertahankan dulu karena memang pertimbangan-pertimbangan yang sekarang itu prioritasnya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah

yang di dalam jangka pendek ini. Di tengah memang ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

Yang kedua, kami juga terus berada di pasar, memastikan bekerjanya mekanisme pasar, dan kalau diperlukan kami juga melakukan stabilisasi yang disebut dengan intervensi di spot, DNDF, maupun pembelian SBN dari pasar sekunder. Nah ini juga didukung dengan kebijakan devisa yang lebih dari cukup, demikian juga BI punya kerja sama dengan sejumlah Bank Sentral, termasuk dengan Bank Sentral Amerika Serikat dan Tiongkok.

Yang ketiga, kami juga memperluas instrumen di transaksi di pasar uang dan pasar valas untuk misalnya ... nilai tukar dan juga kebutuhan likuiditas dari perbankan.

Yang keempat, kami juga melakukan *quantitative easing* dalam jumlah yang besar, yaitu melalui injeksi likuiditas di Perbankan, semuanya memang kami arahkan untuk bisa mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi.

Sebagaimana telah kami sampaikan, Bank Indonesia nanti sampai dengan Mei ini melakukan injeksi likuiditas Rp503,8 Triliun dari Pembelian SBN dari Pasar Sekunder, penyediaan likuiditas perbankan dengan repo SBN, kemudian soft valas maupun penurunan Giro Wajib Minimum. Oleh karena itu, tentu saja likuiditas yang sekarang melimpah di Perbankan, masalahnya bagaimana untuk mendorong sektor riil. Di sinilah tadi Ibu Menteri Keuangan sudah menjelaskan, betapa pentingnya stimulus fiskal. Semakin besar stimulus fiskal, semakin cepat stimulus fiskal, tentu saja

F- PDIP (RAMSON SIAGIAN, MBA):

Interupsi, Pimpinan.

Pak Gubernur,

Tolong dijelaskan detail mengenai *quantitative easing* supaya tidak salah persepsi, gitu. Tolong dijelaskan lebih detail, begitu Pak. Karena saya lihat kadang ada yang salah persepsi.

Terima kasih.

GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):

Ya, begini Pak, memang di dalam kaidah kebijakan moneter, Bank Sentral itu kalau memang di ekonomi likuiditasnya itu kurang, kami menambah likuiditas di Perbankan. Caranya bagaimana? Di dalam operasi moneter ya kami melakukan ekspansi likuiditas, antara lain yaitu kalau kami kemarin misalnya menurunkan Giro Wajib Minimum. Kalau Giro Wajib Minimum itu kan Bank-bank kalau semula mereka harus di dalam setiap rupiah DPK-nya mereka itu terakhir itu ya harus menaruh GWM-nya di BI itu

adalah 5,5%, kemudian kami turunkan 2%. Kalau kami turunkan 2%, berarti likuiditas di Perbankan naik 2% dan bertambah Rp102 Triliun. Itu salah satunya seperti itu.

Yang kedua adalah juga dengan kalau Bank-bank punya kebutuhan likuiditas, bisa datang ke BI, membawa SBN-nya, di-repo-kan, ya semacam ganti atau ... itu lho, dalam *repurchase* itu juga dengan itu cara lain untuk yang melakukan ekspansi likuiditas. Demikian juga kalau kami membeli SBN dari Pasar Sekunder yang dijual oleh asing, berarti BI mendapatkan SBN, kemudian BI menaruh likuiditas di Perbankan. Inilah praktek-praktek yang memang dalam kaidah-kaidah moneter.

Esensinya Pak Ramson dan Bapak-Ibu sekalian, bedanya dengan pencetakan uang, kalau pencetakan uang itu Bank Sentral menambah uang yang beredar, tapi tidak mampu nanti kalau kelebihan likuiditas, misalnya tahun depan kelebihan likuiditas, kemudian tidak mampu menyerap lagi. Seperti dulu, Pak Ramson, waktu BLBI dulu. Salah satu BLBI-nya kan Bank Sentral kemudian mengedarkan uang tapi sebagai gantinya dikasih Surat Utang Pemerintah. Surat Utang Pemerintah nya itu tidak kredibel, suku bunganya itu mendekati nol. Karena tidak kredibel mendekati nol, waktu kemudian inflasinya naik, Bank Sentral tidak punya bisa menggunakan SUP ini untuk menyerap likuiditas? Kenapa di tahun 1998-1999 itu inflasinya 67%, begitu. Itu yang disebut dengan pencetakan uang. Beda dengan yang dilakukan sekarang, ini adalah operasi moneter dalam mengelola likuiditas di Perbankan supaya cukup. Kalau sekarang kurang, kami bisa tambah. Nah penambahan likuiditas yang kami sebutkan Rp503,8 Triliun itu yang kami sebut *quantitative easing*. Begitu Pak Ramson, moga-moga ini menjelaskan hal yang kompleks dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Jadi beda, antara pencetakan uang dengan *quantitative easing*. Pencetakan uang seperti dulu itu, BLBI, terus BI dikasih SUP tidak bisa kredibel, suku bunganya mendekati nol. Nah SUP-nya tidak bisa digunakan sebagai operasi moneter pada saat nanti misalnya inflasinya tinggi, perlu BI menyerap likuiditas, nah itu. Itu namanya cetak uang, kalau sekarang kan kenapa kemarin kami sampaikan, kenapa nanti di dalam nanti pembiayaan SBN, misalnya untuk program pemulihan ekonomi, *yield* SBN-nya tidak boleh lebih rendah dari biaya operasi moneter. Dan juga harus kredibel. Nah sekarang perlu digelontorkan, tapi tahun depan kalau misalnya sudah kelebihan kan kami juga harus menyerap. Itu adalah kaidah-kaidah di dalam kebijakan moneter yang pruden. Jadi sangat berbeda, masalah cetak uang dengan masalah *quantitative easing*. Saya kira moga-moga itu bisa memperjelas, seperti itu. Terima kasih Pak Ramson.

F- PDIP (RAMSON SIAGIAN, MBA):

Terima kasih Pak Gubernur.

GUBERNUR BANK INDONESIA (PERRY WARJIYO):

Matur nuwun.

Nomor 5, itu kami juga memperlonggar makro prudensial, antara lain dulu uang muka kredit kami kendorkan, rasio intermediasi kami kendorkan. Memang banyak pertanyaan, kenapa BI sudah *quantitative easing* begitu banyak, kok belum nendang ke sektor ekonomi? Ya seperti itu kan? Di sinilah kita harus paham, kebijakan moneter memang menyediakan likuiditas kepada Perbankan, ya kan? Nah bagaimana Perbankan mengucurkan ke sektor ekonomi, akan tergantung dari 2 pihak. Sektor ekonominya tumbuh engga? Kalau sektor ekonominya engga tumbuh, ya bagaimana Bank menyalurkan kredit? Meskipun sekarang, Bank-bank itu, Pak Ramson, Pak Ketua, punya SBN Rp700 Triliun di neracanya. Antara lain yang kemarin itu kami bagian-bagian yang kemudian ekspansi likuiditas, *quantitative easing*. Nah supaya Bank itu menyalurkan kredit kan perlu ekonominya didorong. Disinilah letak kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu tujuannya adalah mendorong sektor ekonomi, ya dalam konteks seperti ini. Nah bagaimana Bank itu lebih mudah menyalurkan kredit, makanya perlu restrukturisasi kredit, yang dari Pak Wimboh. Itu sebenarnya 3 itu harus menjadi satu kesatuan dan itulah yang terus kita koordinasikan dalam program pemulihan ekonomi yang tadi disebutkan oleh Bu Menteri Keuangan. Artinya apa? Pak Wimboh akan melakukan program restrukturisasi kredit. Kalau untuk UMKM diperlukan subsidi bunga, kalau ada penundaan angsuran, Bank perlu likuiditas, Bank bisa ke BI, bawa SBN-nya. Dengan Rp700 Triliun SBN yang di Perbankan, hampir semua Bank itu bisa menggunakan SBN-nya ke BI kemudian kami tambah likuiditasnya untuk program restrukturisasi itu. Itu mekanisme memang beda dengan FED. FED mandatnya adalah untuk mengatasi pengangguran di sana. Makanya FED bisa langsung ke sektor riil, di Indonesia kan kita menganut bahwa Bank Sentral itu fokusnya stabilitas harga nilai tukar, Pemerintah, Kementerian Keuangan fokusnya kepada fiskal, OJK fokusnya kepada kesehatan Perbankan. Tiga lembaga ini yang memang perlu koordinasi duduk dan itu kombinasi yang sedang terus kita lakukan supaya erat dalam program-program pemulihan ekonomi. Barangkali itu yang untuk tambahan.

Yang keenam adalah berkaitan dengan Sistem Pembayaran, bagaimana kita mendukung ekonomi kita, mengenai uang elektronik, *mobile internet banking*, maupun yang lain termasuk QRIS.

Nah dengan berbagai asumsi-asumsi dan juga langkah-langkah kebijakannya Ibu Menteri Keuangan, langkah-langkah kebijakannya Bank Indonesia, langkah-langkah yang nanti Pak Wimboh akan menjelaskan, dari Perbankan, kami sampaikan beberapa *up date* mengenai proyeksi ekonomi sebagaimana lampiran berikutnya ini, slidinya.

Kami perkirakan dengan tadi beberapa asumsi, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 ini dapat mencapai 2,3%. Memang kami memang tadi Bu Menteri Keuangan, kalau Triwulan I lebih tinggi, 4,5-

4,7, perkiraan-perkiraan 4,3 tapi esensinya nanti esensinya sebenarnya sama, Triwulan I masih bisa di atas 4%, tapi mulai Triwulan II, Triwulan III itu yang mana itu dampak Covid itu berat. Misalnya di Triwulan II kami perkirakan dengan berbagai asumsi tadi pertumbuhan ekonomi itu 0,4%, Triwulan III 1,2% dan kemudian membaik di Triwulan IV menjadi 3,1%. Ini secara keseluruhan menjadi 2,3%. Memang seperti tadi sudah disampaikan Ibu Menteri Keuangan, PSBB maupun berbagai kegiatan-kegiatan untuk mencegah pandemi ini memang berdampak kepada pendapatan masyarakat, konsumsi masyarakat, investasi, kontraksi pada ekspor maupun impor. Dan karenanya dalam kondisi ini, obat yang paling manjur adalah stimulus fiskal, Bapak, yang memang untuk menggerakkan ekonomi dalam kondisi ini adalah stimulus fiskal, yang nanti tentu saja kalau memerlukan likuiditas, itulah tadi mekanisme repo yang ... itu yang perlu ditempuh. Barangkali itu. Memang ini perlu pilihan, dalam pilihan itu, kalau kita semakin ketat pandeminya, memang tentu saja dampak-dampaknya tentu saja jumlah kasusnya bisa lebih rendah, tapi memang dampak terhadap ekonominya juga lebih berat. Tapi kalau kita engga melakukan PSBB, jumlah kasusnya akan lebih tinggi, meskipun dampak ekonominya bisa lebih rendah. Itu pilihan, tapi di Indonesia, pilihan yang memang, saya kira ini bagus karena masalah kesehatan tidak bisa diukur dari uang. Oleh karena itu tentu saja pembatasan PSBB ini menjadi penting.

Mengenai inflasi, kami perkirakan, kami masih yakin di tahun ini itu masih di dalam kisaran $3\% \pm 1\%$ sesuai sasaran kami. Memang sampai dengan Maret, inflasinya dibawah 3%, juga Ramadhan tahun ini juga Insya Allah juga inflasinya lebih rendah dari historis, karena memang tidak ada mudik, juga ada PSBB, tentu saja pola konsumsinya juga.... dan juga koordinasi di TPI-TPID itu juga, Insya Allah tahun ini inflasinya masih terjaga.

Rata-rata nilai tukar, hari ini alhamdulillah sudah menguat dibawah Rp15.000,00. Sekarang di Perbankan, kurang lebih di trading Rp14.800,00-14.950,00, ini memang terus menguat. Dan ini kami sejalan dengan yang kami sampaikan, nilai tukar rupiah kita itu *under value*, Bapak. Kenapa *under value*? Karena *current account defisit* kita tahun ini akan lebih rendah. Triwulan I itu akan lebih rendah dari 1,5% PDB. Tahun 2020 secara keseluruhan lebih rendah dari 2%. Padahal dulu kita perkirakan 2,5 – 3% PDB. Kalau defisit transaksinya berjalannya rendah, tentu saja ketekoran defisitnya juga lebih rendah. Dan karenanya ketekoran defisitnya lebih rendah, itu mendukung nilai tukar yang menguat. Demikian juga perbedaan suku bunga di dalam dan luar negeri itu tinggi. Kalau tadi SBN-nya memang kemarin waktu lelang 8,08, tapi hari ini sudah turun menjadi 7,97. Itupun kalau kita bandingkan dengan suku bunga di Amerika, perbedaannya itu lebih dari 7,5%. Nah 7,5% ini akan menarik *inflow* ke dalam negeri termasuk di SBN. Nah kalau kita lihat rujukan, kita lihat angka-angka dari tahun 2011 sampai sekarang, Bapak-Ibu ya, kalau kita lihat rata-rata periode *outflow* dengan periode *inflow*, itu data-data menunjukkan dari 2011-2019, memang ada periode *outflow* selama 4 bulan, rata-rata, tidak lebih dari 4 bulan. Jumlah yang *outflow* berapa? Rp29,2 Triliun. Tapi setelah *outflow*, apa yang terjadi?

Ada periode *inflow*. Berapa lama? Dua puluh satu bulan. Tadi yang *outflow* 4 bulan, yang *inflow*nya adalah 21 bulan. Jumlah yang *inflow* ke SBN berapa? Rp229 Triliun. Rp229 Triliun.

Jadi maksud saya memang kita berat saat ini tapi menurut saya jangan terlalu pesimistik, lihat angka-angka historis. Dan itu kelihatan sekarang SBN mulai masuk. Insya Allah dalam setelah periode 4 bulan, ini akan terjadi *inflow* yang lebih besar, *yield* SBN akan turun, dan itu akan juga memperkuat nilai tukar rupiah. Itu yang dasar-dasar sebetulnya yang terus kami lakukan. Kenapa kami menyampaikan? Kami *confidence* bahwa nilai tukar rupiah akan menguat dan mengarah ke Rp15.000,00 di akhir tahun itu, pernyataan kami minggu lalu, sekarangpun sudah di bawah Rp15.000,00 dan memang ini semuanya memang alhamdulillah, sebagai umat Islam, ini adalah karunia Allah. Pak Amir Uskara, Pak Kyai Fathan, bahwa manusia hanya berikhtiar, Allah yang menentukan, bahwa ini adalah memang karunia Allah untuk supaya kita berikhtiar, bertawakal dan optimis bahwa ke depan, Allah akan memberikan rahmat yang lebih baik di balik musibah ini. Betul kan Pak Gus, itu tadi beberapa hal.

Selanjutnya untuk 2021, memang ini bukan pembahasan hari ini, Pak Ketua, ini cuma karena kami sekaligus kita membuat proyeksi, kira-kira dengan pola seperti tadi, pola visit, tahun depan itu kira-kira pertumbuhan itu gimana? Itu kami memperkirakan tahun depan pertumbuhan ekonomi bisa 6,6 – 7,1% tergantung defisit fiskalnya. Kalau defisit sehat 3,1% pertumbuhan ke ekonomi kita bisa di atas 6%, kalau defisit fiskal 4% itu bisa 7,1%. Alasannya apa? Pertumbuhan ekonomi dunia naik 5,1%, ekspor kita akan naik. Dan juga ada program-program pemulihan ekonomi yang Insya Allah tahun depan bisa juga memperbaiki ekonomi kita. Juga tentu saja dari dorongan investasi, Omnibus Law, maupun yang lain-lain, yang tentu saja ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan. Inilah yang menurut gambaran-gambaran, ya supaya ke depannya itu kita memberikan suatu harapan, optimisme. Tentu saja ya ada naik turunnya, segala macam, mengenai angkanya apakah 6 atau dan segala macam tapi Insya Allah akan lebih tinggi di tahun depan. Inflasi *is also* juga akan berada di sekitaran $3 \pm 1\%$. Yang terakhir, nilai tukar juga akan menguat ke depan, rata-ratanya Rp14.900-Rp15.300,00 dengan perbaikan-perbaikan ekonomi tadi. Ini adalah pandangan-pandangan mengenai proyeksi makro ekonomi.

Slide berikutnya, mengenai SBN, saya kira mungkin kalau boleh saya lewati saja Pak Ketua, saya tidak ingin mengulangi yang tadi Ibu Menteri Keuangan. Ini masalah yang tadi penjelasan, bagaimana BI membeli SBN dari pasar perdana ...(suara tidak jelas)... ya, sesungguhnya tadi sekarang 21 April tadi kan, Ibu Menteri bantuin kami untuk 4,3 Global Bond, Cadangan Devisa kami naik ya, 4,3 itu kurang lebih ya hampir Rp68 Triliun. Kami juga bantuin Ibu, per 4 Mei nanti, Ibu itu juga ... Ibu juga akan nambah Rp105 atau Rp109 Triliun dengan kebijakan-kebijakan yang kami turunkan kemarin, GWM-nya bisa, Bank-bank harus membeli SBN dari Bu Menteri Keuangan sehingga ada tambahan Rp105 atau Rp109 Triliun nanti 4 Mei. Tentu saja ini

Insyah Allah seperti Bu Menteri tadi, masalah bantuan sosial, masalah kesehatan, sebetulnya dananya ada cuma masalahnya pengadaan dan implementasi di lapangan seperti apa.

Slide berikutnya mungkin kita lewati saja, terus. Ya itu *greenshoe*, kemudian hitung-hitungannya, *next*, dan sebagainya.

Terus yang terakhir Bapak Ketua, slide berikutnya. Beberapa Pimpinan, Anggota menanyakan kepada kami, dukungannya BI untuk penyaluran bansos pasca Covid itu apa. Kami terus bekerja sama dengan perusahaan jasa sistem pembayaran, apakah bank atau non bank, bagaimana mempercepat penyaluran Bansos secara elektronifikasi. Tentu saja sangat tergantung dari data-data yang disampaikan oleh Pemerintah. Dari data-data kemudian bersama Bank, kalau punya rekening, dimasukkan ke rekening, kalau anu bisa dibuat *virtual account*, bisa dibuat kartu dan segala macam, supaya mempermudah. Ini beberapa dukungan kami untuk mempercepat penyaluran Bansos, baik ini untuk Program Keluarga Harapan, program sembako, kartu pra kerja, maupun bantuan Pemerintah Pusat, agar bagaimana programnya dari Pemerintah bisa segera mencapai di masyarakat. Tentu saja sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Kami dengan PJSP (Perusahaan Jasa Sistem Pembayaran) membantu mendukung ini.

Pak Ketua,

Mungkin saya berhenti di sini saja, untuk singkat. Tentu saja nanti kalau ada pendalaman, kami siap untuk memberikan penjelasan.

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Perry yang telah memberikan pemaparannya.

Dan selanjutnya kami persilakan kepada OJK, karena Pak Menteri Bappenas, eh Menteri PPN masih ada acara dengan Musrenbang. Kami persilakan Pak Wimboh, tentang makro prudensial dan industri jasa keuangan. Silakan Pak Wimboh.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Ya terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.

Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan, shaloom.

**Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI,
Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Bu Menteri Keuangan,
Bapak Gubernur Bank Indonesia,
Bapak Menteri Bappenas,
Dan Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan limpah-Nya kepada kita semua dan kita bisa bersama-sama melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI tahun 2020 ini terutama di Bulan Ramadhan ini, semoga kita mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah SWT.

Mewakili seluruh Anggota Dewan Komisiner, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi XI untuk bisa hadir bersama-sama pada pagi dan siang hari ini.

Kami akan menyampaikan beberapa point. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan dan Pak Gubernur Bank Indonesia bahwa akibat Covid-19 ini sektor riil itu kita lihat sudah mulai beberapa sektor terutama sudah mulai mengalami permasalahan usahanya. Sehingga suka tidak suka ini akan berdampak kepada sektor keuangan. Dan ini bagaimana sektor keuangan, karena adanya Covid ini untuk bisa mendukung adanya pertumbuhan ekonomi. Ini sangat penting untuk kami sampaikan. Di samping itu kami nanti juga akan menyampaikan beberapa point penting yang sebagai indikator bagaimana sektor keuangan bisa mendukung secara penuh ya, di antaranya nanti juga suku bunga perbankan sangat penting. Tadi Pak Gubernur juga sudah menyampaikan. Dan juga tadi stimulus Pemerintah juga sangat penting. Dan tentunya nanti kami bisa menyimpulkan kira-kira sejauh mana sektor keuangan ini bisa mendukung adanya percepatan pemulihan dan pembangunan ekonomi ini.

Yang pertama kami sampaikan, ada 3 risiko sebenarnya yang perlu kita waspadai dengan adanya Covid ini. Terutama likuiditas. Tadi Ibu Menteri juga Pak Gubernur sudah menyampaikan, likuiditas di sektor keuangan. Yang kedua juga risiko adanya nasabah, nasabah itu sendiri, yaitu nasabahnya tidak cepat bangkit, sehingga itu juga akan menimbulkan permasalahan di keuangan. Dan juga itu akan ditunjukkan tingginya NPL ya. Dan juga di samping itu juga risiko *solvensinya* lembaga keuangan, apabila ini akan berlanjut-lanjut.

Nah pertama akan kami sampaikan mengenai berbagai informasi berkaitan dengan likuiditas itu dulu ya. Kalau kita lihat, mungkin di slide nomor 6 Pak Teddy, ini *confirm* bahwa sektor riil ini sudah mulai kena. Ini adalah ada data yang kita pantau ya, dampak dari Covid ini, bahwa berbagai sektor,

manufaktur, dan juga perdagangan, bahkan jasa juga sudah mengalami permasalahan. Sehingga ini implikasinya, bahwa mereka tidak bisa lagi membayar kewajibannya kepada Bank. Bahkan juga mungkin mereka nanti apabila Covidnya selesai, dia memerlukan injeksi modal, modal kerja, agar bisa cepat beroperasi kembali, karena beberapa perusahaan sudah merumahkan karyawannya. Untuk memulai ini mungkin perlu waktu juga. Sehingga ini penting, sehingga selesainya Covid ini, ini memerlukan waktu beberapa bulan untuk me-*restart* perusahaan-perusahaan ini. Nah inilah yang bisa berpengaruh kepada likuiditas Perbankan. Artinya bahwa nasabah-nasabah tersebut akan bisa mengangsur kembali, itu apabila sudah beroperasi normal. Nah kita tahu pada sampai bulan ini kita belum jelas, ya meskipun prediksi-prediksi Mei atau Juni, kalau Mei-Juni perlu juga waktu, berarti sekitar mungkinlah ya sampai akhir tahun. Ini adalah skenario yang barangkali harus kita persiapkan. Nah tinggal menghitung bagaimana likuiditas itu ya, itu akan berpengaruh kepada sektor keuangan. Ini berapa kreditnya, kita tahu berapa jumlah kredit, ya UMKM saja jumlahnya Rp1200 Triliun, belum lagi kredit-kredit yang non UMKM. Total kredit Rp5000 Triliun. Rp5000-Rp6000 Triliun. Nah lantas juga kredit kepada BUMN saja, Rp540 Triliun. Nah ini bagaimana likuiditas ini harus kita siapkan untuk kita sanggah. Karena kalau tanpa itu akan sulit kiranya bahwa ini risiko likuiditas ini akan bisa kita tahan. Nah untuk itu terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI, telah bersama-sama mencoba membuat skenario agar ada penyangga likuiditas. Tapi Pak Gubernur sudah menyampaikan, bisa direpakan kalau Bank itu punya SUN. Dan juga tadi dari OJK kebijakannya bagaimana Bank ini bisa mempunyai ruang yang luas apabila ternyata nasabahnya tidak bisa mengangsur. Kemarin sudah kita kasih insentif, kalau direstruktur bisa langsung lancar. Sehingga tidak perlu membentuk cadangan. Itu ruang pertama yang kita sampaikan. Tinggal ini likuiditas nanti, tadi mekanismenya sudah jelas ya, dengan fasilitas *last resort* Bank Indonesia dan tentunya juga tadi ada pinjaman melalui Kementerian Keuangan yang di mana ini mekanismenya akan ditaruh sebagai Deposito di Bank-bank Himbara atau yang kita sebut Bank Jangkar. Sehingga ini bisa meredakan likuiditas. Apabila ada Bank-bank yang kekurangan likuiditas, nanti bisa melakukan gadai kreditnya melalui Bank Himbara, yang nanti dananya menggunakan dana dari Kementerian Keuangan. Ini adalah yang bagaimana kita mengantisipasi risiko likuiditas ini. Karena engga kita lakukan demikian, tentunya ini sangat bahaya. Karena apa? Karena sekarang ini justru perusahaan-perusahaan ini karena tidak mempunyai pendapatan lagi, mulai menarik dananya di Perbankan, karena untuk kebutuhan sehari-hari. Dan kalau kita lihat, bisa mungkin ditunjukkan beberapa indikator likuiditas, Pak Teddy, bahwa memang data agregat juga bahwa ini dana masyarakat sudah mulai turun. Terutama di Buku 1 ya, meskipun di Buku 4 dan Buku 3 kelihatannya masih naik. Di Buku 1 sudah kelihatan turun ya. Dan juga ini tentunya semakin cepat kita mempunyai penyangga likuiditas, semakin bagus, karena apa? Jangan sampai ini terjadi permasalahan-permasalahan *miss match* likuiditas ya. Kalau dana masyarakatnya banyak ditarik untuk

ANGGOTA:

Interupsi, Pimpinan.

Itu tadi yang digambarkan Pak Wim mengenai skema penyangga likuiditas, belum ada kepada kita bahannya ya Pak ya?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Mestinya sudah ada Pak, nanti kita sampaikan Pak, ya. Nanti kami sampaikan.

Jadi kami ulangi, ini Pemerintah menaruh Deposit yang tentunya dananya dari SBN yang dibeli Bank Indonesia, dengan tadi *market rate*, atas nanti Bank-bank Himbara ini akan bisa meredakan keketatan likuiditas di pasar, ya. Nah di antaranya apabila nanti ada Bank yang SUN-nya sudah tidak punya, pinjaman dari Bank Indonesia tidak dapat, ataukah itu nanti bisa *matching* atau bisa *blended*, ini bisa menggunakan menggadaikan kredit yang *di-restructuring*. Jadi kemarin sudah ada ketentuan yang kita keluarkan apabila melakukan *restructuring*, ada insentif untuk tidak membentuk PPAP. Dan ini adalah yang sementara yang sudah kita finalkan adalah angka-angka yang ada kaitannya dengan UMKM. Mohon izin untuk terus, Pimpinan.

Yang berkaitan dengan tadi, itu adalah likuiditas. Dengan adanya ini mudah-mudahan, mudah-mudahan tidak ada masalah yang berarti. Dan SUN-nya tadi Pak Perry mengatakan ada Rp700 Triliun. Ini bisa untuk menyangga ya, apabila ada kendala likuiditas karena beberapa nasabah tidak bisa bayar angsuran pokok dan kreditnya.

Lantas berkaitan dengan risiko NPL, ini sudah kami mitigasi dengan tidak perlu dibentuk Cadangan, karena bank langsung lancar, ini akan sedikit memberikan ruang ya, Perbankan, untuk, namun demikian ini mudah-mudahan saja tidak terlalu lama, sehingga karena tentunya kalau terlalu lama barangkali juga akan menekan likuiditas juga.

F- PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Izin, interupsi, Ketua. Izin sebentar, satu saja.

Pak Wimboh,

Mengenai tanpa penggunaan Cadangan ini, aturan OJK-nya sudah ada belum?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Sudah, sudah ada Pak Misbakhun. Sudah sesuai dengan PSAK 71, di mana PSAK 71, Dewan Standar sudah mengeluarkan *statement* bahwa

dengan adanya Covid ini maka kalau ada nasabah yang tidak membayar karena di *restructuring*, maka PSAK 71 membolehkan tidak perlu membentuk Cadangan. Jadi sudah sesuai.

F- PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

POJK-nya nomor berapa?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

POJK Nomor 11 Pak, 2020.

F- PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Termasuk di dalam basket POJK itu ya?

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Masuk, masuk.

F- PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Saya kalau baca POJK-nya sih saya melihat belum secara keseluruhan pencadangan dan sebagainya ini, dan mempengaruhi struktur modalnya belum ada ya. Makanya saya memunculkan PSAK 71 ini ditunda saja Pak.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Kalau PSAK 71 sudah ada *statement* dari Dewan Standar, Pak Misbakhun. Sudah ada. Jadi sudah *inline*. Dan kalau begitu lancar, ada POJK lain yang menghitung pencadangan. Apabila kredit itu lancar, POJK itu otomatis mengatakan tidak dibentuk cadangan. Jadi ada POJK lain mengenai pembentukan cadangan. Yang itu sebenarnya tidak perlu kita ubah. Karena ini hanya pengklasifikasian saja menjadi lancar. Jadi sudah otomatis, Pak Misbakhun.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Ya, lanjut.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Mohon izin Pak Ketua, untuk melanjutkan.

F- PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih Pak, lanjut, lanjut.

KETUA DEWAN KOMISIONER OJK (WIMBOH SANTOSO):

Ya.

Ini mitigasi likuiditas dan mitigasi NPL.

Bapak Pimpinan, dan Wakil Pimpinan dan Bapak-Ibu sekalian,

Nah berkaitan dengan itu, sehingga nanti risiko *solvabilitas* berkaitan dengan *capital adequacy ratio* juga bisa termitigasi. Namun, ini juga tidak bisa terlalu lama. Karena mungkin ada kewajaran, bahwa pengakuan laba secara aktual itu tentunya ada batasnya. Mungkin itu yang kami harus sangat hati-hati ya. Mudah-mudahan kalau ini bisa segera, sehingga kita tidak ada kendala berkaitan dengan likuiditas dan tadi mengenai NPL maupun *capital adequity ratio*. Nah itu yang berkaitan yang sudah kami lakukan untuk kita mitigasi, agar sektor keuangan itu bisa berjalan dengan normal.

Yang kedua, mohon izin untuk masuk kepada suku bunga. Nah suku bunga ini dapat kita lihat, tolong slide suku bunga. Trendnya sih sebenarnya menurun, menurun terus. Jadi kami akan mencoba untuk mempercepat ya, dalam kondisi demikian, karena likuiditasnya secara umum cukup *ample*, dan itu juga didukung oleh *interbank call money* suku bunganya juga sangat stabil, tidak terlalu besar. Sehingga ini adalah menurut hemat kami, salah satu cara kami juga untuk memberikan ruang yang luas kepada sektor riil untuk bisa tidak terbebani dengan adanya Covid ini. Dan kami yakin ini akan kami monitor terus, untuk trend-nya untuk bisa turun. Bahkan sebelum kemarin ada kenaikan BI Rate, di mana itu adalah tahun 2018 ya. Akan kita coba untuk kita turunkan ke level tersebut ya, terutama untuk suku bunga deposito ini dan suku bunga kredit ya.

Berikutnya kami tadi mengenai dukungan juga perekonomian kita, itu di Pasar Modal. Kalau kita lihat, di Pasar Modal ini, ini tentunya sangat terpukul ya, karena ini pertama, sentimen negatifnya itu akan memerlukan waktu untuk bisa balik lagi menjadi positif, terutama ini sangat tergantung dari Covid sendiri, karena Covid itu sangat linier dengan sektor riil. Karena kepercayaan masyarakat kepada Pasar Modal itu sangat tergantung bagaimana para Emiten-emiten ini. Dan inilah yang sebenarnya kita coba, agar para Emiten ini nantinya ya untuk bisa cepat *recover* ya, ya tadi terima kasih Ibu Menteri Keuangan nanti akan memberikan satu jaminan kredit kepada kredit modal kerja bagi tambahan sektor-sektor yang terkena ini untuk bisa cepat beroperasi kembali. Ini sangat-sangat berarti, ya sentimen positif ya terhadap bangkitnya Pasar Modal ini. Kalau kita lihat meskipun ini sudah mulai positif sejak 23 Maret 2020, tapi ini agak flat, mudah-mudahan dengan berbagai *announcement* yang dilakukan Bu Menteri kemarin dan juga mungkin skema-skema ini, ini akan cepat memberikan sentimen positif kepada sektor riil. Ini adalah yang tentunya kita *annoucement* positif diperlukan untuk di pasar, terutama di pasar saham ini, Bapak-Ibu sekalian.

Yang berikutnya ini berkaitan dengan itu semua, kalau kita lihat pertumbuhan kredit. Nah ini positif ya, meningkat, ada slide yang kredit ya. Ini meningkat, karena apa? Justru sekarang ini bagi perusahaan yang mempunyai fasilitas kredit, mereka menggunakan fasilitas itu untuk digunakan untuk memitigasi atau mensubstitusi dengan rendahnya pendapatan atau bahkan tidak ada pendapatan. Dia menggunakan fasilitas kredit yang ada, kelihatannya memang berbagai Bank, kelompok Bank, berbagai industri memang agak naik. Tapi naik ini bukan berarti karena ada investasi baru, kredit investasi baru, tapi betul-betul modal kerja karena untuk men-*settle* karena pendapatan operasi dia, para pengusaha ini, memang terganggu. Jadi ini Bu, jangan, mungkin signalnya jelas, bahwa ini bukan karena adanya investasi baru. Belum, belum ada. Dan bahkan ini kredit valasnya juga naiknya cukup tinggi, terutama dalam kondisi kemarin yang *demand*-nya rupiah, ya sangat tertekan, mungkin para nasabah tentunya mempunyai *appetite* untuk merealisasi kredit valasnya.

Nah Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia,

Kami ingin menyampaikan dengan kondisi tersebut, ini bagaimana Perbankan dan Pasar Modal ini bisa memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi. Dapat kami sampaikan bahwa dari Perbankan, kapasitasnya cukup besar. Dari likuiditas yang ada, bisa mendukung pertumbuhan sampai 10,7%, dengan likuiditas yang ada sekarang. Dengan asumsi, *demand*-nya di sektor riil ini bisa betul-betul cepat *recover*. Sehingga tadi kami ulangi lagi, stimulus modal kerja tambahan ini sangat penting, untuk bisa mengungkit kembali dan cepat-cepat bisa beroperasi kembali. Kita jadi likuiditas tidak ada masalah, dan juga dari permodalannya tidak ada masalah. Kami mempunyai permodalan yang cukup kuat dan 23% meskipun akhir-akhir ini sudah turun sedikit ya, karena memang NPLnya dan cenderung naik, meskipun tadi sudah kami sanggah dengan NPLnya sementara ditunda untuk kredit yang di *restructuring* dan ini dari Perbankan tidak ada masalah. Kalau kami perkirakan, untuk 2020 ini pertumbuhannya masih cukup rendah. Masih cukup rendah, mungkin sekitar, paling tinggi 2%. Paling tinggi. Itu mungkin kalau moderat, bisa 1%. Bahkan kalau UAS, bisa tidak tumbuh untuk kreditnya, untuk di 2020. Kecuali kalau tadi sempat kita stimulus dengan modal kerja, yang tadi banknya diberi insentif, bahwa modal kerja yang diberikan kepada sektor riil ini akan diberikan insentif untuk dijamin oleh Pemerintah. Dan juga ini mungkin kalau yang UMKM-UMKM sangat *manageable*, sangat *manageable*. Mungkin kalau kredit yang bukan non UMKM, bahkan yang Korporat, dan Korporat ini mempunyai utang di luar negeri, bahkan *leasing* di luar negeri, ini juga menekankan bersama dengan Bu Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk yang BUMN, bahwa *restructuring* ini dilakukan secara *integrated* dengan kreditur luar negeri. Jangan sampai engga ya. Jangan sampai nanti stimulus yang kita berikan di dalam negeri itu malah nanti beban Kreditur luar negeri tidak bisa memberikan insentif apa-apa. Mestinya insentif juga akan kita minta ya, dari Kreditur luar negeri dalam rangka *restructuring*. Ini skema ini adalah skema nanti terutama untuk yang Korporat.

Nah jadi itu yang secara garis besar dapat kami sampaikan, Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian, pada intinya kami menyimpulkan bahwa berbagai program stimulus yang dilakukan bersama-sama, baik oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan OJK tadi harus berjalan cepat dan tentunya ini menggunakan *market mechanism*. Tadi yang kami, kami mendukung Pak Perry, sehingga tadi suku bunganya adalah suku bunga repo, dan juga nanti supaya begitu *bank anchor* men-*channel* kepada Bank lain dengan gadai aset kredit yang *direstructuring*, ini juga ada tentunya *market price* ya. Nah tentunya stimulus lain yang diberikan tadi, kalau memang Debitur-nya perlu modal kerja, diberikan dengan tadi dijamin Pemerintah itu sudah cukup bagus ya. Dan tentunya untuk yang UMKM ya tadi sudah diberikan stimulus langsung yang berdampak kepada masing-masing nasabah, subsidi suku bunga, yang tadi sudah disampaikan Ibu Menteri Keuangan dan juga berbagai insentif pajak. Ini adalah sudah cukup, akan kita coba kita jaga dan akan kita monitor dan kami laporkan kepada Pimpinan, dan Wakil Pimpinan serta Bapak-Ibu sekalian di Komisi XI. Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wimboh yang telah memberikan pemaparannya dari OJK.

Selanjutnya dari Pak Menteri PPN/Bappenas, Pak Suharso Monoarfa. Pak Suharso Monoarfa, sudah di tempat?

ANGGOTA:

Mungkin masih rapat Pak Ketua, BPS saja dulu.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Oke, kalau begitu BPS.

ANGGOTA:

Pak Amir saja yang baca.

ANGGOTA:

Pak Amir saja, diwakili Pak Amir.

ANGGOTA:

Kayaknya Pak Amir sudah tanda-tanda ini.

ANGGOTA:

Pak Amir latihan dulu, Wakil Menteri.

ANGGOTA:

Kayaknya sudah tanda-tanda Pak Amir ini.

ANGGOTA:

Bukan, Cuma Ketua, Pak Amir ini lupa pakai baju putih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Baik, silakan Bappenas, Pak Suhariyanto. Sudah ada Pak Suhariyanto? Bappenas? Eh BPS, BPS. Pak Suhariyanto?

ANGGOTA:

Pak Kecuk, ada Pak.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Pak Kecuk? Silakan.

KEPALA BPS (DR. KECUK SUHARIYANTO):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

**Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi XI DPR RI,
Yang saya hormati Bu Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur BI,
Kepala OJK beserta seluruh jajaran.**

Yang pertama tentunya saya mendoakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu.

Pada kesempatan ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan indikator sosial ekonomi di tengah pandemi Covid-19, supaya kita bisa melihat bahwa dampaknya ini luar biasa. Saya mulai dulu dengan dampak pertamanya adalah ke sektor pariwisata dan pendukungnya. Jadi kalau kita lihat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, meskipun Pemerintah baru mengumumkan kasus Covid pertama kali awal bulan Maret 2020, tetapi dari grafik ini kita bisa melihat sebetulnya dampak Covid-19 ke sektor pariwisata dan pendukungnya itu sudah mulai terjadi pada Bulan Februari. Jadi kalau kita lihat di bulan Februari sana, indikator yang paling mudah adalah dengan memperhatikan jumlah wisatawan mancanegara, itu turunnya sudah mencapai 28% dan di sana kita bisa melacak, bahwa wisatawan yang mengalami penurunan sangat-sangat tajam itu adalah dari Tiongkok, dari Hongkong, dari Papua Nugini, Taiwan, United Emirat Arab, dan sebagainya. Sehingga kalau pada tahun 2019 wisman dari Tiongkok itu persentasenya menyumbang 13%, maka pada bulan Februari ini sudah tidak ada *share*-nya sama sekali. Pada bulan Maret baru nanti akan kita *release* pada hari Senin, Bapak. Tetapi bisa saya infokan bahwa pada bulan Maret ini nanti penurunannya akan jauh lebih tajam, akan berkisar antara sekitar 60%. Nah penurunan pariwisata ini membuat tingkat hunian kamar hotel menjadi turun drastis, kemudian tempat hiburan, retail, semuanya tutup sementara dan sudah banyak terjadi PHK atau dirumahkan untuk para pekerja yang bergerak di bidang pariwisata. Dan pada gilirannya, ini juga mempengaruhi pertumbuhan untuk sektor industri, ekonomi kreatif dan perdagangan serta untuk transportasi.

Untuk melihat sektor transportasi, pada slide berikutnya, untuk transportasi angkutan udara terutama untuk yang penerbangan internasional itu sudah mengalami kontraksi hampir 20%. Jadi pada Bulan Februari, Covid belum berpengaruh terhadap transportasi angkutan udara, angkutan udara domestik dan kereta api, tetapi untuk penerbangan internasional itu sudah berpengaruh dengan terjadinya penurunan 20%. Dengan adanya *work from home* dan juga pelarangan mudik, bisa dipastikan bahwa kontraksi di sektor transportasi ini di Triwulan II, akan semakin dalam.

Untuk melihat perkembangan sampai terkini, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, saya tampilkan data kebijakan yang diolah oleh BPS, jadi selama 3 tahun ini BPS sudah mengolah *big data*, tetapi tidak kita terbitkan sebagai statistik resmi, kita gunakan sebagai pendukung. Dari sini misalnya kita menggunakan *big data* dengan melacak *flight taker* yang ada di Jakarta, yaitu Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma. Yang sebelah kiri menunjukkan betapa curamnya jumlah keberangkatan domestik dari Jakarta misalnya penerbangan dari Jakarta ke Surabaya itu mengalami penurunan 67%, ke Denpasar 86%, Makassar 77%. Demikian jumlah kedatangan pesawat di Jakarta. Dari Medan itu penurunannya mencapai 63%, itu situasi transportasi udara untuk domestik. Untuk internasional, menjadi lebih dalam lagi. Bisa dilihat di grafik yang di bawah, keberangkatan dan kedatangan pesawat internasional di Jakarta, misalnya di Jakarta jumlah penerbangan ke Singapura itu turun 85%, ke Malaysia 94%, ke Hongkong 60%. Penerbangan

yang masih berjalan agak normal yang ke Jepang, tetapi itu hanya stabil sampai dengan bulan Maret. Sementara bulan Mei, April, juga mengalami penurunan. Jadi berbagai indikasi ini untuk menjadikan kita lebih waspada, bahwa situasi ekonomi di Triwulan II akan betul-betul berat sekali, seperti tadi disampaikan oleh Kemenkeu.

Di tengah berita yang kurang bagus ini, setidaknya kita masih punya berita agak menggembirakan dari sisi neraca perdagangan. Kembali tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menkeu, bahwa pada Triwulan I 2020 ini kita masih mengalami *surplus* Rp2,62 Miliar dan posisi ini sebenarnya lebih bagus dibandingkan posisi Triwulan I 2019 yang mengalami defisit, bahkan dengan Triwulan I tahun 2018 yang pada waktu itu *surplusnya* hanya Rp260 Juta. Ini bisa terjadi karena ekspor kita masih tumbuh 2,91% di mana bisa dilihat di sana bahwa ekspor pertanian dan industri masih tumbuh, kecuali tambang yang mengalami negatif lebih karena penurunan harga batu bara yang luar biasa tajamnya. Tetapi dari sisi komposisi impor, kita mengalami pertumbuhan negatif 3,69. Dari komposisi ini yang mungkin perlu kita jadikan perhatian adalah penurunan bahan baku dan modal. Karena bahan baku ini kalau tidak bisa disubstitusi oleh produksi dalam negeri, tentunya akan mengganggu gerak dari sektor industri, yang kemudian juga akan terjadi pengurangan kapasitas produksi dan pada akhirnya akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Dan pada gilirannya juga akan mengganggu perdagangan. Dan ini akan terlihat nanti dalam komponen pertumbuhan ekonomi Triwulan I, bahwa pertumbuhan sektor industri pada Triwulan I ini sangat-sangat lambat sekali.

Nah kemudian untuk inflasi, tadi sudah disampaikan, secara umum terkendali, inflasi bulan Maret itu 2,96%, tetapi mungkin yang perlu kita waspadai ada 2 dari angka inflasi ini. Yang pertama, bahwa pergerakan inflasi komponen bahan makanan itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi inflasi secara umum terkendali, tetapi kita perlu memberikan perhatian yang lebih kepada pergerakan harga makanan. Kalau kita lihat sejak bulan Januari ini, meskipun Pemerintah sudah menerapkan kebijaksanaan ... masih ada beberapa harga komoditas yang sebetulnya bobotnya ke inflasi itu sangat kecil, tetapi lumayan mengganggu. Jadi misalnya sekarang kalau kita melihat harga yang naik menjelang Ramadhan itu adalah gula pasir dan bawang merah. Sementara kalau emas itu adalah mengikuti pergerakan internasional. Jadi ke depan kita perlu memberi perhatian terhadap pergerakan inflasi harga pangan. Dan satu lagi, kita juga perlu memberikan perhatian terhadap *warning* dari FAO bahwa seluruh negara mulai pertengahan bulan, tahun ini nanti, akan mengalami kemungkinan adalah kelangkaan bahan pangan. Jadi ini kemarin juga sudah di *highlight* oleh Bapak Presiden dan Bapak Presiden sudah menugaskan berbagai tim untuk membuat prognosis sampai akhir tahun. Ini juga kalau kita gandengkan dengan *warning* dari data BMKG, bahwa mulai bulan Juli nanti akan terjadi kemarau terutama di Jawa dan 1 Provinsi di Sulawesi. Ini yang mungkin ke depan perlu kita waspadai, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian,

karena akan mengganggu inflasi. Tetapi mudah-mudahan dengan persiapan yang lebih matang, kita akan lebih bagus.

Dampak Covid-19 ini juga terasa untuk kesejahteraan petani, jadi untuk nilai tukar petani sejak bulan Januari ini mengalami penurunan dan kalau kita lihat penyebabnya, di sana terjadi pada seluruh sub sektor, dan penyebabnya adalah penurunan harga komoditas. Kalau kita lihat harga karet itu turun 7%, kemudian harga sawitnya *month to month*-nya turun 13%, sehingga diperlukan perlindungan sosial khusus pada petani dan kembali Pemerintah sudah merancang sebuah perlindungan sosial untuk petani dalam bentuk bantuan saprodi maupun bansos. Tetapi ini kita perlukan supaya ada keberpihakan kepada petani.

Ada pertanyaan mengenai jumlah PHK ke BPS. Perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa BPS tidak mengumpulkan data PHK, yang BPS kumpulkan adalah data tingkat pengangguran, dan itu hanya di-cover 2 bulan, pada bulan Februari dan bulan Agustus. Untuk yang bulan Februari, sedang kita olah. Karena pada bulan Februari itu dampaknya belum massif seperti pada bulan Maret, tentunya pengurangan tenaga kerja memang terjadi, tapi lebih kepada sektor-sektor yang berhubungan dengan pariwisata seperti untuk penginapan, untuk restoran, transportasi dan lain sebagainya. Untuk posisi bulan Agustus, seberapa besar penganggurannya meningkat, itu nanti akan sangat tergantung kepada keberhasilan kita menangani Covid di Triwulan II. Sekedar informasi saja, bahwa Kemenaker itu mengumpulkan data mengenai jumlah yang terkena PHK, yang pada tanggal 20 April 2020 tercatat jumlahnya adalah 2,1 juta. Tetapi kalau kita menggunakan *big data* untuk Ketenagakerjaan, yang kita olah dari salah satu situs, memang kita bisa melihat seberapa besar dampak Covid ini ke ketenagakerjaan. Misalnya jumlah perusahaan yang memasang iklan lowongan kerja, itu turun 50%. Nah kan jumlah iklan lowongan yang ditawarkan itu turun 74%. Jadi dari sisi perusahaan, memang kelihatan sekali jumlah lowongan kerjanya itu turun sekali. Dan kalau ini kita lihat per sektor di slide berikutnya, itu bisa dilihat pergerakan, penurunan jumlah lowongan yang tajam sekali, misalnya untuk sektor akomodasi makan dan minum, perdagangan, kemudian industri pengolahan. Jadi pergerakan di sektor ini menjadi kunci penting mana-mana yang perlu kita intervensi supaya nantinya bisa terjadi *recovery* yang sangat cepat.

Kemudian untuk data kemiskinan, data kemiskinan dikumpulkan oleh BPS, dua kali. Pada bulan Maret dan pada bulan September, yang untuk bulan Maret sedang kita olah, nanti bisa saya informasikan bahwa trend yang ada untuk Provinsi-provinsi yang ada di Jawa, diperkirakan akan mengalami kenaikan. Karena Covid-nya memang menyebarnya di Jakarta, kemudian bergerak di Pulau Jawa, sementara yang luar Jawa belum. Tetapi nanti pada bulan September, seberapa besar jumlah penduduk miskin itu mengalami kenaikan, akan tergantung banyak faktor. Kalau inflasinya terkendali terutama ..., mungkin akan oke, tapi akan sangat dipengaruhi oleh data pertumbuhan

ekonomi yang kemungkinan Triwulan I itu masih positif tetapi rendah, dan Triwulan II kemungkinan mengalami kontraksi, juga akan dipengaruhi oleh ketepatan penyaluran bansos, kalau kita belajar pada pengalaman tahun 2005-2009. Jadi pengendalian inflasi, data pertumbuhan ekonomi, ketepatan penyaluran bansos, ini nanti juga akan berpengaruh pada distribusi pendapatan, sehingga akan berpengaruh kepada naik atau tidaknya angka kemiskinan, pengangguran dan juga gini ratio.

Pertanyaan berikutnya dari Bapak-Bapak dan Ibu Komisi XI, bagaimana Covid ini nanti akan berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia? Jadi kalau kita lihat target yang dipasang atau dengan memperhatikan komponen yang ada, di mana Indeks Pembangunan Manusia itu terdiri dari 3 dimensi, pendidikan dan kesehatan, karena itu adalah indikator jangka panjang, di mana pendidikannya adalah angka harapan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, sementara kesehatannya dari angka harapan itu, kemungkinan besar tidak akan berpengaruh. Yang akan terpengaruh besar adalah daya beli, karena ini nanti sangat tergantung kepada pendapatan masyarakat. Sehingga dengan memperhatikan daya beli yang ada, kemungkinan besar target IPM tahun 2020 ini akan sulit untuk dicapai.

Terakhir, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, untuk *mensupport* indikator ekonomi dan sosial, BPS juga melakukan survey khusus mengenai Covid-19 sebagai *supporting*. Di sini bisa dilihat bahwa Covid-19 ini tidak hanya mengubah perilaku masyarakat, tapi juga mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Ini perlu kita perhatikan mengenai pola konsumsi rumah tangganya, di mana terlihat di sana bahwa kebutuhan untuk kesehatan, kemudian untuk bahan makanan kemudian pulsa, itu juga mengalami peningkatan. Sebaliknya kebutuhan untuk bahan bakar, untuk listrik, tidak banyak berubah. Jadi kita harus perhatikan beberapa komoditas ini, karena ketika permintaannya meningkat, sementara *supply*nya terbatas, tentunya akan mengganggu. Dan dari survey ini, sekitar 56% responden juga mengatakan bahwa pengeluaran meningkat, sementara pendapatannya menurun. Jadi dengan memperhatikan berbagai kondisi ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, untuk merespon pandemi Covid-19, Pemerintah memang harus melakukan *refocussing* dan realokasi di APBN 2020, karena bagaimanapun kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan, meskipun juga kita harus memikirkan perekonomian.

Demikian Bapak Pimpinan yang saya sampaikan, kalau ada pertanyaan lebih detail, saya siap menjelaskan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Suhariyanto dari BPS yang telah menyampaikan pemaparannya.

Selanjutnya kami persilakan dari Menteri PPN, Pak Suharso, sudah ada?

F- PPP (Dr. H. M. AMIR USKARA, M. KES):

Masih ratas, tapi sebentar lagi Pak Ketua, masih ratas.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Ya sambil menunggu Pak Suharso, Pak Amir bisa menyampaikan dulu?

ANGGOTA:

Pak Amir tanggung jawab ini, Bappenas.

ANGGOTA:

Cocoklah, sudah saatnya.

ANGGOTA:

Setuju, Ketua, setuju. Pak Amir dulu.

ANGGOTA:

Pak Amir itu bukan wakil menteri, wakilnya menteri.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Berapa lama lagi? Oh sudah? Oke, silakan Pak Harso, sudah ada? Coba ditelepon, Pak Amir.

ANGGOTA:

Perintahkan dong Pak Amir.

ANGGOTA:

Ini sebentar lagi Munas, Pak Ketua, mesti pahami Ketua.

ANGGOTA:

Mungkin biar rekan-rekan dulu, usul saja Ketua, langsung rekan-rekan pendalaman dulu.

F- PPP (Dr. H. M. AMIR USKARA, M. KES):

Lagi bicara sama Presiden, Pak. Lagi bicara sama Presiden Pak, sebentar lagi.

ANGGOTA:

Pendalaman dulu, Pimpinan.

ANGGOTA:

Ya pendalaman dulu.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Kita pendalaman dulu, nanti kalau ... kita stop pendalamannya ya?

Baik, dengan demikian kita masuk ke pendalaman, dengan catatan apabila nanti Pak Suharso sudah siap, Pak Suharso harus memberikan pemaparan dari Bappenas mengenai target-target pembangunan.

Baik, kami mulai dari F- PDIP, silakan Pak Dolfie, siapa yang akan memberikan pendalaman? Pak Dolfie, silakan.

F- PDIP (DOLFIE O.F.P.):

Ya, terima kasih Ketua.

Dari F- PDIP untuk kesempatan pertama, Pak Andreas. Silakan Pak Andreas melakukan pendalaman.

F- PDIP (IR. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Terima kasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI,
Ibu Menteri Keuangan, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Pimpinan OJK,
Kepala BPS yang saya hormati.**

Pertama-tama memang saya tadi, halo, kedengaran tidak? Halo, halo. Halo, ya. Saya tadi melihat pemaparannya yang menurut saya sih bukan hanya sekedar yang dipaparkan di dalam presentasi, tetapi saya mendengarkan runtun yang ada. Yang pertama adalah karena ini dipakai anu, ... ya saya mencoba mencerna apa yang disampaikan. Pertama adalah problem yang kita akan hadapi, tantangan yang terbesar, tadi telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan adalah mengenai defisit perubahan APBN yang sekarang mencapai 5,07% dari PDB. Nah di sini disampaikan, ini Pendapatan Negara itu masih dihitung 10%. Padahal tadi banyak sekali ya kita lihat insentif yang diberikan, termasuk kepada sektor perpajakan. Sehingga saya masih mohon dikonfirmasi, apakah Pendapatan Negara yang tumbuh atau turun 10% atau tumbuh (-) 10% itu masih akan bisa tetap

tercapai, atau dengan adanya tadi yang telah disebutkan banyaknya insentif perpajakan ini tadi, ini juga akan menurun. Demikian juga dengan PNPB yang masih memperhitungkan harga minyak dengan USD 30.

Kemudian Belanja dan Pembiayaan, ini memang difokuskan pada kesehatan, *social safety net* dan dari sini disebutkan, "dan membantu dunia usaha". Tetapi saya ingin menambahkan, ini harusnya "membantu dunia usaha tanpa membuat sistem keuangan menjadi sakit". Ini penting. Jadi di satu sisi, kalau tadi disiapkan *social safety net*, maka mungkin dalam kacamata ingin membantu dunia usaha, kita juga harus berpikir dalam kerangka *financial sistem security net*. Ini *social safety net* ya penting, tapi kemudian untuk di dalam membantu dunia usaha ini harus ditekankan, tanpa membuat sistem keuangan kita menjadi sakit.

Nah terus yang ketiga adalah disebutkan mengenai dukungan Pembiayaan Anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi 150 T, yang tadi Ibu Menteri mengatakan ini sebetulnya kan katalis, untuk membantu likuiditas. Tapi di sini yang saya sebetulnya melihat justru yang apa yang, yang tidak, belum disampaikan secara terbuka. Karena saya menyimak sekali bahwa pembiayaan penerbitan SBN itu sekitar 856,8 T. Itu akan melalui lelang di pasar domestik, penerbitan SBN, retail, *market placement* dan penerbitan SBN Valas. Dan ini sebutkan lagi di dalam pembiayaan utang ini, ini menarik ini, sengaja di point 5 itu di *bold*, "dukungan Bank Indonesia sebagai sumber pembiayaan yang bersifat *last resort*". Dan menurut saya justru, inilah sebetulnya kalau saya melihat mengenai bagaimana membiayai strategi pembiayaan ini baik yang *above the line* atau *below the line*, ini yang mungkin perlu, menurut saya, kita perlu samakan, apakah kita ini sekarang perlu samakan persepsinya dulu. Apakah kita sekarang ini didalam kondisi normal atau tidak.

Kalau melihat dari penjelasan tadi, dari Pimpinan OJK juga mengatakan, sudah mengantar sektor riil. Demikian juga tadi dari penjelasan yang baik dari Bu Menteri Keuangan maupun juga Kepala BPS. Tapi di satu sisi kalau saya lihat, *stress* dari Bank Indonesia, program pemulihan sektor riil merupakan program Pemerintah yang pendanaannya dengan penerbitan SBN yang dapat dibeli di Pasar Perdana. Jadi memang sebetulnya yang jadi inti masalah, bagaimana kita memulihkan sektor riil ini. Tadi Pak Gubernur Bank Indonesia secara tidak langsung menjawab, kalau The Federal Reserve itu kan memang punya mandat untuk masuk kepada sektor riil, dalam hal ini adalah penciptaan lapangan kerja. Demikian juga kalau kita lihat seperti di Bank of Japan yang kemudian secara apa, melakukan *unlimited money printing*, tapi kan dia bagian dari Pemerintah.

Jadi pertanyaan yang menjadi pertanyaan kritikal adalah, bagaimana memulihkan sektor riil ini dan pembiayaannya dari mana? Ini sangat penting. Karena kalau tadi dikatakan bahwa dengan SBN, tadi dikatakan yang tanggal 21 April tadi kalau saya tidak salah nangkap itu ya. Itu kan bunganya masih sekitar, yang hadiah Kartini untuk Bu Menteri Keuangan, itu masih 8% di

Pasar. Kemudian juga yang terakhir 7,9%. Pertanyaannya, kita ini akan menerapkan kondisi tidak normal dengan pendekatan yang normal, atau bagaimana? Tapi saya juga paham posisi Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia ini memang diberikan kewenangan di Perpu, tetapi mandatnya, ya, mandatnya, seperti Undang-undang Bank Indonesia, masih tetap berlaku. Saya tidak tahu ini, apakah kalau misalkan Bank Indonesia merasa bahwa ini adalah kalau melihat bahwa ini adalah salah satu hambatan, saya tidak mungkin perlu dibicarakan, walaupun ini sangat sensitif, tapi saya melihat *tone* dibalik penjelasan tadi, ini apakah perlu payung hukum apa yang perlu disampaikan kepada kita? Saya tidak tahu apakah misalnya harus merubah atau membuat Perpu khusus untuk mandatnya Bank Indonesia? Karena ini saya lihat tadi, yang saya katakan, angka-angka ini sifatnya sangat sementara, yang defisit ini. Tapi kemungkinan besar akan membesar. Jadi pertanyaannya tadi disebutkan.

Saya terus-terang saja masih mencoba menyerap, misalkan *private placement* baik oleh LPS maupun oleh BLU. Itu kan sudah masuk di dalam sistem keuangan kita, sistem perbankan kita. Dan kalau ini mau, dan mereka lakukan, ya kalau memang tingkat suku bunganya tinggi ya mereka masuk, kan tinggal gitu saja. Tapi kan akan menarik dari Perbankan ke SBN. Tapi penambahan likuiditasnya sendiri dari mana. Jadi sebetulnya saya tidak mau mempertentangkan antara paham Keynesian maupun Moneterisme. Tapi pernyataan yang paling besar, bagaimana membiayai Defisit kita itu. Ini yang penting. Karena jumlahnya akan terus bertambah, ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang disampaikan PNBK, itu akan selesai di akhir Juni. Tetapi itu masih tahap awal, *recovery*nya. Padahal menurut saya itu masih banyak sekali, kalau istilahnya tadi kan Pak Wimboh mengatakan, sudah mulai makan tabungan ini. Atau saya istilahkan makan Cadangan. Tapi seberapa besar ini? Yang menjadi masalah adalah memulihkan sektor riil ini, ini akan menjadi bebannya siapa? Pemerintah yang harus nanggung, atau kemudian Pemerintah menjadi *the last resort* atau bagaimana? Jadi kalau menurut saya, kita harus sebetulnya keluar dari, apa istilahnya itu, masing-masing, apa ya, maksud saya itu masing-masing kontakannya, tetapi harus melihat ini dari hulu sampai hilir. Makanya saya mengatakan, bagaimana tadi di dalam membantu dunia usaha tanpa membuat sistem keuangan kita menjadi sakit. Dan inilah sebetulnya dalam kerangka *financial system security net*. Jadi kalau kita punya *social security net*, itu untuk membantu bantuan sosial segala macam ya. Tapi untuk dunia usaha, itu kerangkanya adalah di dalam kerangka *financial system security net*. Jadi kita membantu sektor riil, tetapi tidak membuat sistem keuangan kita menjadi sakit. Sehingga program-program itu, baik itu program relaksasi, yang dilakukan oleh Perbankan kita untuk membantu dunia usaha, itu dampaknya termasuk Pembiayaan akhirnya, itu harus betul-betul menjadi satu rangkaian.

Nah dalam hal ini dengan segala hormat ini, saya juga belum melihat ini, sepertinya OJK dengan membuat konsep *anchor bank* atau katakanlah ini bank payung ya, atau *anchor bank*, itu kan malah membebankan lagi kepada Himbara? Padahal Himbara pun dengan sebetulnya dengan kondisi

melakukan restrukturisasi segala macam, itu problemnya sendiri sudah sangat besar. Padahal di satu sisi sudah ada, termasuk tadi jaminan kredit itu kan ada fasilitas dari Bank Indonesia untuk fasilitas-fasilitas jangka pendek dan seterusnya, kalau menghadapi likuiditas. Jadi intinya adalah dalam saat krisis seperti itu, okelah kondisi tidak normal, saya tidak mengatakan kondisi krisis. Itu nanti menimbulkan perdebatan lagi. Tapi dalam kondisi tidak normal, *cash is king*. Nah sekarang bagaimana kita memperoleh *cash* ini dan likuiditasnya itu dilakukan dengan cara sebagaimana, sehingga kondisi yang tidak normal ini menjadi secepatnya menjadi kondisi normal. Jadi saya melihat bahwa sebetulnya memang kita harus melihatnya di dalam kerangka *financial system security net*. Nah nanti tinggal payung-payung hukumnya apa. Dan dukungan politik apa yang diperlukan bagi misalkan untuk DPR untuk melakukan ini? Supaya misalkan oke, Bank Indonesia nyaman dengan apa istilahnya itu, kalau harus keluar dari apa istilahnya ruang lingkup yang ada seperti sekarang ini atau konvergen. Tapi demikian juga dengan OJK dan Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya, harusnya detail dari angka dari mana *financing* ini dicapai, karena sekarang ini saya masih lihat sangat-sangat global sekali. Hanya dikatakan ini *up set* penerbitan, Rp10-12 Miliar, dengan ini saya mengatakan, masih sangat jauh sekali... yang akan diperoleh. Ini yang pertama.

Terus yang kedua, untuk pemulihan ekonomi, saya mengapresiasi apa yang dikatakan Pemerintah, dengan untuk membantu UMKM. Dan saya kira ini adalah sebagai langkah awal yang sangat tepat, dan menurut saya ya memang yang paling harus dibantu adalah UMKM, baik karena itu jumlah penerapan tenaga kerjanya maupun yang tahun 1998 dan tahun 2009 UMKM ini waktu itu bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan. Tapi sekarang ini mereka membutuhkan. Nah tadi dari uraian yang telah disampaikan, itu dari total program subsidi bunga UMKM dan Ultramikro, itu totalnya ada Rp34,15 Triliun total subsidi bunga dan total penundaan pokok Rp285,9 Triliun. Tapi saya catat di sini, ini UMKM-nya jumlahnya masih sekitar 37-an juta. Artinya 37 juta ini yang sudah terhubung atau tersambung dengan Lembaga Pembiayaan maupun Perbankan. Tapi bagaimana dengan yang sisa lainnya? Kan kalau jumlah UMKM kita ini 62 juta, berarti kan ada masih 25 juta. Dan ini perlu juga misalnya program untuk stimulus program bantuan kerja darurat. Karena bagaimanapun juga, UMKM ini layak dan patut untuk dibantu dalam hal ini, karena sebagai penyerap tenaga kerja.

Demikian juga selain bantuan modal kerja darurat, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana UMKM ini produknya bisa diserap, oleh baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Karena ini adalah akan membantu mereka, untuk tadi, kalau istilahnya Pak Wimboh tadi makan tabungan, mereka ini tabungannya yang termasuk tabungannya yang sangat pendek sekali, atau sangat kecil sekali. Jadi menurut saya ini memang hal yang apa, perlu kita pikirkan bersama. Dan menurut saya, saya menyangkut *tone-tone* yang ada, walaupun tadi dikatakan tadi semuanya seperti juga likuiditas masih dalam kendali, segala macam, itu hal yang bagus. Tetapi lebih baik kita menyentuh ke hal-hal yang memang harusnya kita perlu untuk

mencari solusi bersama. Dan menurut saya, saya mencoba untuk melihat ini secara keseluruhan dan kalau saya lihat seperti demikian, ya nanti saya terus-terang saja belum melihat titik terangnya di dalam Pembiayaan Defisit ini, tanpa yang tadi itu, tanpa membuat Sistem Keuangan kita sakit.

Jadi kalau saya lihat memang Bu Menteri Keuangan sebagai Ketua KSSK, inilah tantangan utamanya. Dan menurut saya memang tidak mudah, karena di satu sisi, Bank Indonesia sendiri adalah sebagai Lembaga yang independen terhadap Pemerintah. Demikian juga dengan OJK. Tetapi tentu ini demi kepentingan nasional bersama, kita harus cari. Termasuk di sini adalah saya lihat, memang ada, ya secara tidak langsung tapi terbaca, ada masih hambatan-hambatan psikologis, ya mungkin karena trauma masa lalu, misalkan tahun 1998 maupun tahun 2008. Jadi mudah-mudahan observasi saya ini tidak benar, mudah-mudahan saya berharap, tapi saya menangkapnya demikian. Itu sebaiknya betul-betul kita melihat bagaimana kita mencari permasalahan yang sangat mendasar dan penting untuk kelangsungan bangsa kita.

Sekian, terima kasih Pimpinan.

F- P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si):

Interupsi Pimpinan, ini waktunya harus dibatasi, Pimpinan.

Kalau tidak, kita bisa seperti Pak Andreas semua ini, engga kelar-kelar rapat kita nanti.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Baik, jadi kami minta kepada Pimpinan dan Anggota Komisi XI dalam mengajukan pertanyaan disesuaikan dengan Tatib, kalau bisa minimum 3 menit saja karena kita juga harus menyelesaikan Raker kita, setengah empat paling telat, setengah empat. Dan kita harus masuk ke Kesimpulan.

Silakan dari F- PG, Pak Mekeng, waktunya tolong dipersingkat saja, Pak Mekeng. Silakan. Ada Pak Mekeng?

F- PG (MELCHIAS MARKUS MEKENG):

Terima kasih Pak Ketua.

**Teman-teman Komisi XI yang saya hormati,
Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI beserta jajaran, Ketua OJK beserta
jajaran, LPS beserta jajaran,
Dan semua yang hadir.**

Ketua,

Kalau dalam keadaan krisis, ngomong saja dibatasi, gimana mau menyelesaikan masalah bangsa ini? Saya rasa sih kita jangan terlalu juga pelit untuk kasih waktu bicara.

Yang pertama, kalau saya melihat pembicara dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK dan LPS, ini ada berbagai situasi yang dilihat dari masing-masing institusi. Kalau Menteri Keuangan saya lihat memang menyiapkan satu skenario keuangan di dalam menghadapi pembiayaan negara ini. Dan menurut saya itu sangat realistis, karena kita melihat bahwa ada ekspektasi penerimaan, penurunan pajak yang cukup besar, dari 82% kalau tidak salah di tahun yang lalu, sekarang diekspektasi 78%. Jadi ya ada kurang lebih 4% penurunan penerimaan pajak. Di sisi lain ada penambahan anggaran untuk Covid ini. Dan ini juga memperlebar kita punya sisi pembiayaan. Di sisi lain, Bank Indonesia memberikan penjelasan tentang situasi moneter. Meskipun ada satu *hope* yang begitu optimis yang tiba-tiba bisa melonjak pertumbuhan ekonomi ke 6%-7%, buat saya itu agak membingungkan, Pak Gubernur. Dari tahun 2014 Pak Jokowi mimpin itu 4,8% sekarang baru 5,2% kalau tidak salah, paling mentok. Ini kita sekarang lagi terseok-seok, turun ke 2% tiba-tiba mau naik ke 6%, ke 7%. Saya bingung dari mana ini, angka 6-7% bisa terjadi. Kalau saya lihat penjelasan dari LPS sangat realistis, karena Covid ini belum berakhir.

Di negara kita ini boleh dibilang ini baru awal, karena kalau kita lihat PSBB, ini tidak terlalu ditaati oleh masyarakat, dan ini akan menjadi penyebab daripada masalah. Kalau Covid ini tidak bisa diselesaikan dengan tuntas, ini merambat ke ekonominya juga akan panjang. Yang saya bayangkan kalau Covid ini tidak selesai, negara lain katakanlah sudah selesai, kita akan menghadapi, orang tidak mau datang ke kita, dan kita kalau mau datang ke negara orang lain pun tidak diterima. Karena takut menular. Jadi konsentrasi menurut saya daripada keuangan negara ini adalah bagaimana Covid ini bisa selesai. Kalau PSBB ini belum tuntas, ini mesti *total lockdown*. *Total lockdown*, dan itu memang memenuhi anggaran yang cukup besar. Nah anggaran yang cukup besar ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu semua kebutuhan itu diberikan kepada masyarakat-masyarakat dibawah yang katakanlah kurang mampu. Kalau ini bisa selesai, kita baru bisa berpikir ke arah bagaimana membangun ekonomi yang sedang *slowing down*. Sekarang semua usaha-usaha, boleh dibilang mereka menjalankan bisnisnya dalam keadaan *phase* yang sangat rendah. Kalau tadinya berpacu dengan 100 km/jam, mungkin sekarang 20-30 saja. Terjadinya PHK, terjadinya *unpaid list*, ini semua membuat ekonomi kita tidak terlalu maksimal. Nah oleh karena itu saya menyarankan kepada Ibu Menteri, fokus kita adalah sekarang adalah likuiditas daripada anggaran kita. Kita harus tetap mempunyai likuiditas, agar apabila terjadi kebutuhan mendadak, itu perlu kita, kita mempunyai anggaran.

Yang kedua, kita harus juga mempersiapkan anggaran-anggaran, memotong anggaran-anggaran yang tadi saya lihat juga sudah terjadi pemangkasan anggaran. Tapi kok kecil sekali, Bu Menteri, hanya Rp50 Triliun kalau tidak salah saya lihat yang dipangkas. Menurut hemat saya, kalau masih ada yang bisa dipangkas, dipangkas. Karena kalau tidak ini pasti larinya kepada pembiayaan yang itu utang lagi. Dan utang lagi sekarang juga

pembelinya kan juga tidak banyak, semua larinya pasti ke BI. Nah tentunya BI juga mempunyai batasan yang harus mereka jaga supaya BI-nya ini kelihatan sehat. Jadi kalau negara ini bisa sehat, BI-nya harus sehat, Departemen Keuangannya sehat, baru kita akan bisa berjalan lebih bisa punya optimisme. Saya tidak yakin dengan prediksi IMF yang tiba-tiba kita bisa dibilang nanti tahun 2021 naiknya terlalu tinggi, saya tidak yakin itu. Karena sumber pendapatan kita ini boleh dibilang *mostly* dari pajak. Dan pajak ini kan jaminan daripada kegiatan daripada ekonomi itu sendiri. Dan kalau ekonomi sendiri *demand*-nya ini belum di *create*, tidak akan terjadi transaksi ekonomi yang bisa menghasilkan keuangan, penerimaan negara kita.

Jadi menurut hemat saya, pemahaman daripada Departemen Keuangan, BI, OJK dan LPS mesti sama. Jadi jangan satu yang optimis, satu yang agak setengah optimis, satunya pesimis, ini tidak sejalan. Ini mesti semuanya *mindset*nya sama, begitu. Jadi mengambil kebijakannya juga sama. Tapi saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Departemen Keuangan, sangat pruden, sangat tepat, dan tinggal, pesan saya, likuiditas harus dijaga, dan Bank Indonesia juga bukan institusi yang berdiri sendiri di negara ini. Kalau memang *cost*-nya harus, tidak mesti sesuai dengan SBN, itu juga tidak salah, karena untung-ruginya BI kan juga bukan hanya karena 1 SBN. Ada banyak transaksi BI juga yang bisa membuat untung-ruginya. Dan kalau rugi, BI juga kan larinya ke APBN. Jadi kalau untuk bangsa ini, BI juga harus punya *mindset*, harus bisa menolong bangsa ini. Jangan hanya BI-nya sehat, tapi yang lainnya tidak sehat, tidak ada gunanya. Negara sehat, BI sehat, Pemerintah sehat, dan rakyat sehat, itu baru benar. Tapi kalau hanya salah satunya yang sehat, yang lain tidak sehat juga tidak ada gunanya. Jadi *pruden is pruden*, tetapi kepentingan yang besar untuk bangsa ini harus lebih kita perhatikan.

Saya rasa ini saja dari saya, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Mekeng.

Selanjutnya dari, oh ini Pak Suharso sudah ada? Silakan Pak Suharso, Pak Menteri PPN untuk menyampaikan paparannya. Kami stop dulu, tadi mau masuk, Pak Amir tidak berani menggantikan Pak Menteri.

Jadi silakan Pak Menteri.

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS (H. SUHARSO MONOARFA):

Siap, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi XI,
dan yang hadir pada hari ini semua.**

Saya kira apa yang saya sampaikan secara data sudah disampaikan juga oleh Menteri Keuangan dan juga disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia. Kami juga telah menjawab 10 pertanyaan dari Anggota yang terhormat dan secara tertulis. Dan saya kira tugas saya hampir tidak ada, kalau dalam hal ini, kalau saya sudah mulai mengatakan apa yang disampaikan oleh Ketua tadi itu adalah apa juga yang akan kami sampaikan.

Pertama tentu Covid-19 ini mengubah semua, tidak saja target-target pembangunan kita, tetapi juga cara kerja kita, strategi kita, dan semuanya. Di akhir tadi saya mendengar yang terhormat disampaikan oleh Pak Mekeng bahwa Covid-19 tentang perlunya likuiditas yang dijaga, bahwa Menkeu sebagai Bendahara Umum Negara harus punya likuiditas sewaktu-waktu. Pemotongan anggaran saya kira sudah lumayan, sekitar Rp147 Triliun. Kemudian Bank Indonesia adalah tidak hanya sendirian dalam hal ini, dan tentunya juga harus memikirkan kita semua.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Covid ini kalau saya boleh sarankan, saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, memberikan satu kejutan kepada kita, untuk mereview kembali beberapa kita punya sistem konstruksi yang secara nasional, pertama soal kesehatan, kedua soal perlindungan sosial, kemudian kerentanan terhadap bencana. Sebab, ujung-ujungnya saya kira kita semua setuju lebih baik kita kehilangan 2-3 minggu atau 1-2 bulan atau 3-4 bulan atau bahkan 1 semester, dibandingkan kita kehilangan tahun-tahun berikutnya. Maka memang semua energi yang ada kita miliki hari ini, seyogyanya memang kita maksimalkan untuk mengatasi problema yang kita hadapi hari ini.

Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan target-target, dan saya lihat tadi juga sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan, meskipun saya juga sudah terlambat menyaksikannya. Tapi saya kira kita berharap mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai tetap di 2,3 atau 2, 2 kalau hitungan Bappenas, berdasarkan ... *account*, 2,2 itu kalau sampai dengan 1 semester, bulan Juni, keadaan yang kita hadapi. Tetapi kalau dia bergeser sampai ke Triwulan III, mungkin kita akan turun di 1 sampai 0%. Dan mudah-mudahan tidak bergeser sampai ke Triwulan IV. Itu akan menjadi lebih mengancam kepada perekonomian kita.

Dan tentu saja dalam situasi seperti ini, ketika konsumsi rumah tangga turun luar biasa, ketika investasi turun luar biasa, kemudian meskipun ada beberapa yang masih tetap bertahan, dan ekspor dan impor kita juga turun, maka satu-satunya yang diharapkan adalah *government expenditure*. Dan untuk membiayai itu, seperti telah yang disampaikan baik oleh Menteri

Keuangan, maupun oleh Gubernur Bank Indonesia, saya berharap kita bisa bekerja sama untuk mengatasi sumber-sumber pembiayaan kita ke depan yang lebih murah, sebagaimana pernah kita hadapi pada masa-masa yang sulit yang lalu. Dan situasi hari ini memang berbeda sekali dengan yang kita hadapi pada tahun 97-98 dan juga pada tahun 2008. Karenanya, sekali lagi, yang kami harapkan adalah dukungan dari Komisi XI kepada Pemerintah, wabil khusus untuk bagaimana mendukung dalam hal ini adalah ketersediaan likuiditas di Pemerintah melalui sumber-sumber pembiayaan yang berat.

Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. lapangan kerja memang turun dan seterusnya, dan selebihnya mungkin saya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Dan yang jawaban tertulis, saya kira tidak perlu saya bacakan. Itu saja, Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri PPN/Bappenas, yang telah memberikan pemaparannya.

Selanjutnya kami lanjutkan dengan pendalaman dari F- P. Gerindra, Pak Supri ada Pak Supri? Ya, ya, lanjut, silakan.

F- P. GERINDRA (Drs. SUPRIYANTO):

Ada, Ketua.

Terima kasih Ketua.

Ya untuk putaran yang pertama, kami persilakan Pak Ramson, mungkin nanti ditambahi sedikit sama El Nino, Ketua. Kami persilakan Pak Ramson.

F- P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Satu-satu saja dulu Pak. Nanti setelah itu kita putar lagi. Silakan Pak Ramson.

F- P. GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

**Yang saya hormati Bu Menteri, Pak Menteri, BI, OJK dan BPS,
Pak Ketua dan semua rekan-rekan yang terhormat.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Salam sejahtera untuk kita semuanya.
Selamat menunaikan ibadah puasa.**

Tadi sudah dijelaskan panjang-lebar oleh Bu Menteri Keuangan, sayangnya itu perubahan APBN Perubahan strukturnya tidak dikemukakan di dalam Lampiran yang sudah dikirim, sehingga untuk melihat *refocussing* dan realokasi dari Anggaran Belanja yang bergeser dan fokus ke masalah Covid-19 dan nampaknya tidak terlihat. Tetapi biarpun begitu, tentunya saya dari F-P. Gerindra mendukung kebijakan-kebijakan Bu Menteri dan juga Pak Jokowi, bagaimana menangani Covid-19 dan juga dampaknya ini. Cuma yang ingin betul-betul penekanan, kembali lagi kepada anggaran-anggaran yang dikemukakan mengenai bansos, di mana di Jayakarta, di Jabodetabek, memang di sini penyampaiannya cukup indah, tetapi di lapangan, Bu Menteri, masih menghadapi banyak hambatan. Selain juga informasi dari kader-kader Partai Gerindra, dan juga dari relawan-relawan, dan juga informasi-informasi yang berkembang. Ini sekali lagi sebagai, tentunya panglima kebijakan fiskal, tolong Menteri-menteri dan juga pelaksana-pelaksana terkait lebih di *push* supaya efektif, tepat sasaran dan juga tepat waktu, karena banyak pekerja dan juga pebisnis kecil-kecilan yang informal, yang sudah kehilangan penghasilan.

Kalau mengenai pertumbuhan ekonomi, kita engga usah terlalu kuatir, karena seperti waktu itu Bu Menteri mengkuatirkan pertumbuhan ekonomi China minus 6,5% dalam waktu satu kuartal. Itu wajar saja, karena bagaimanapun dengan masyarakat global kebanyakan berhenti di rumah, bahwa global *demand* dan juga global domestik itu berkurang, jadi dipengaruhi oleh agregat dengan indikator yang menurun. Jadi kita artinya sekarang yang perlu penanganan jangka pendek itu yang saya harapkan dari Pemerintah, agar apa yang dikemukakan di sini semua sudah cukup jelas, tolong betul-betul direalisasikan.

Soal sumber pembiayaan, saya juga tidak perlu terlalu mengkuatirkan, dari sisi moneter juga tadi Gubernur BI sudah mengemukakan *quantitative easing* yang dimaksud. Jadi sehingga mengklarifikasi teman-teman, karena kalau semua bicara-bicara tidak sesuai dengan apa adanya, sentimen pasar juga akan terpengaruh, bisa mempengaruhi posisi rupiah. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur sudah tetap eh sudah tepat, maksud saya. Kalau kita lihat di sini kan bagaimana mendorong ke m ke *market* saja, *money*, jadi $MV = price \ transaction$, memang sekarang *transaction* itu kan menurun karena *demand global* dan juga *supply global* terpengaruh. Termasuk juga domestik. Jadi mau bilang apa lagi? Semua pada di rumah. Padahal dari sisi data-data yang dikemukakan, bahwa kita sebenarnya punya uang, aset lapangan saja ada Rp8.376 Triliun, total kredit Rp5.647 Triliun. Jadi Pak OJK, sebenarnya kalau direstrukturisasi Debitur ataupun yang punya utang kredit, sebenarnya bisa juga Bank-bank pelaksana melakukan pendekatan kepada nasabah. Artinya yang nyimpan pihak ketiga. Karena Dana Pihak Ketiga saya lihat di sini cukup besar dan tidak ada pergeseran, uangnya mau ditaruh kemana? Jadi kalau menengah ke atas, *safe into*

income rationya tetap stabil, malah naik. Karena tidak ada *demand*, dia tidak belanja. Dia di rumah saja. Jadi kalau turun bunga misalnya untuk artinya yang memperoleh kredit dan dia tidak berputar, nanti jatah kreditnya yang mungkin untuk modal kerja terpaksa bayar gaji, sebenarnya pihak bank itu, Pak OJK, Pak Wimboh, bisa meng-*approach* juga para Pihak Ketiga. Artinya dalam suasana psikologis sekarang, uangnya jangan ditarik dulu. Jadi artinya berputar di bank itu sendiri, sehingga posisi keuangan bank itu likuiditasnya tetap aman. Jadi sebenarnya dalam keadaan sekarang, tidak perlu ada *extra ordinary*.

Jadi saya tidak perlu mengemukakan matematik teorinya, tetapi di lapangan saja seperti itu, faktor psikologis mempengaruhi, begitu. Karena sekarang beda dengan misalnya kalau tadi teman mengutip-mengutip Keynesian, John Maynard Keynes, itu dia punya teori itu memang *demand, agregat* indikator itu tetap jalan tapi menurun, melemah. Jadi mendorong ... konsium dengan bagaimana dua sisi kebijakan moneter, juga dari kebijakan fiskal. Tapi kan kalau sekarang tidak. Orang banyak masih di rumah. Makanya Amerika itu sekarang, tidak sabar, dia, si Trump, kalau rakyatnya di rumah saja. Karena apa? Tidak bergerak, jadi sulit. Memang ini sekarang menjadi dilema, makanya kalau saya menyebutnya sekarang ini kita masuk ke ekonomi dilema. Tetapi sebenarnya kalau ini semua secara menyeluruh secara makro, bisa dikelola dengan baik, dengan tadi, artinya saya sangat apa namanya, bermanfaat rapat ini, saya tidak punya data-data. Kalau saya tidak punya data, bagaimana saya menganalisa? Ini total aset Rp8.376 Triliun itu di perbankan. Total kredit Rp5.467 Triliun, total Dana Pihak Ketiga Rp6.110 Triliun. Kalaupun tadinya ada pergeseran dari valas, itu mungkin mereka dari rupiah ada pindah ke valas, itu siap-siap, kuda-kuda, karena isu-isu yang bilang, cetak uang, cetak uang. Karena posisi itu akan mempengaruhi posisi rupiah. Makanya teman-teman saya, mohon maaf, jangan terlalu, kalau kurang dalam datanya maksud saya, kalau pintar-pintar, semua teman-teman saya jauh lebih pintar, Cuma kalau kurang datanya ya jangan terus kita buat opini-opini yang kurang pas. Jadi saya lihat begitu. Karena bagaimanapun semua pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh *demand* dan *supply*. Baik *global demand* maupun domestik *demand* dan domestik *supply*. Kalau *global demand* masuk, artinya kita harus mengekspor, domestik *supply* kita bergerak, itu akan mempengaruhi domestik *demand*, jadi perputaran ekonomi. Dan juga nanti yang berpenghasilan itu dia sebagian besar menabung. Memang kita masih banyak yang miskin. Jadi yang itu memang harus didata itu, sehingga kita tahu dari perputaran itu berapa banyak yang cenderung, dia kalau ada uang terus langsung mengkonsumsi. Nah ini. Tapi sekarang kembali tadi, tahap sekarang ini bagaimana aman dulu. Yang tadinya kehilangan mata pencaharian ini. Kalau yang menengah ke atas sekarang aman-aman saja. Dia punya uang, tetapi dia pengeluarannya berkurang. Dia biasanya keluarkan uangnya banyak-banyak, sekarang kecil. Padahal uangnya di bank terus. Jadi itu maksud saya, bagaimana Bapak-Bapak, Ibu Menteri, apalagi ini yang langsung ke rakyat ini, dan juga Pak Gubernur BI, OJK, nah kalau Pak BPS memang bagaimana memberikan data yang akurat. Nah ini masalah juga, Pak BPS. Data-data

yang akurat di kompleks saya boleh dikatakan kelas menengah, tapi ada yang mendapat bantuan sosial 9 orang. Mereka kembalikan. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi satu sisi di luar, diluar kompleks, orang sudah banyak kesulitan. Nah jadi sekarang bagaimana agar bantuan sosial itu efektif. Yang sudah ada di anggaran itu efektif. Kalau namanya pengusaha-pengusaha itu kan ya mereka namanya, selalu mengeluh. Jadi artinya sekarang bagaimana jangka pendek, misalnya kalau diprediksi ini Covid-19, sampai 4 bulan lagi, dibuat saja perhitungan sampai 4 bulan lagi, tapi jangan sampai ada yang kelaparan. Itu saya persingkat karena saya ingin tolong diberikan kesempatan ke Pak El Nino, Pak Ketua.

Demikian terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya kira kesepakatan kita, per Fraksi satu orang, tapi kalau perlu kita putar, tidak apa-apa.

Silakan sekarang dari F- P. Nasdem, Pak Fauzi Amro, silakan.

F- P. NASDEM (FAUZI H. AMRO, M.Si):

Terima kasih Pak Dito yang baik hati.

Untuk F- P. Nasdem, langsung kepada Pak Hatari. Kepada Pak Hatari, waktu dan tempat kami persilakan.

F- P. NASDEM (DR. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Bu Menteri Keuangan beserta jajaran,
Pak Gubernur Bank Indonesia,
Pak Wimboh/OJK,
Kepala BPS,
Serta Menteri Bappenas yang saya hormati,
Pak Ketua Komisi XI dan teman-teman Anggota DPR yang saya hormati.**

Pertama, kepada Ibu Menteri, Ibu, saya menerima Peraturan Presiden Nomor 1, kemudian Perpres Nomor 54, ini siang malam saya baca Bu, dan ada 29 pasal ditambah dengan penjelasan-penjelasan, kemudian Peraturan Presiden Nomor 54 dengan 12 pasal ditambah seluruh lampirannya, terkait dengan perubahan postur dan *breakdown* dari APBN Tahun 2020. Kalau kita bicara fungsi anggaran sebagai material, ini yang menurut M. Hadi dalam bukunya, Administasi Keuangan Indonesia, itu dicatat, fungsi anggaran sebagai material, fungsi anggaran sebagai

perencanaan dan fungsi anggaran sebagai hukum. Dari ketiga dimensi ini saya pelajari bahwa seluruh pasal yang ada di Peraturan Presiden Nomor 1 ditambah dengan eh, Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 ditambah dengan Perpu, ini semuanya sudah bisa di *adjustment*, tidak ada persoalan. Tanpa kecuali. Karena Pak Ketua yang terhormat, ada yang terus-menerus menanyakan, "Pak Hatari, bagaimana dengan Pasal 2, Pasal 27 dan Pasal 28, terutama Pasal 27 ayat (3) dan (1)". Tidak ada masalah. Jangan Cuma baca satu aturan saja. Lihat lagi di Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Indonesia, khususnya Pasal 3 dan ayat yang ke-(3), itu memiliki korelasi dengan berbagai pasalnya. Jadi sesungguhnya bagi F- P. Nasdem, tidak ada masalah.

Kemudian Ibu Menteri, terkait dengan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dipangkas atau dirasionalisasi kurang lebih Rp4,2T itu, tolong ini harapan dari aspirasi berbagai tempat, Ibu Menteri, karena kapasitas fiskal daerah ini tidak sama, ada yang kurang dari Rp1 T, bahkan hanya ada yang 60, 600 sekian, dan karena itu kalau Ibu melakukan rasionalisasi, itu, ini diharapkan ada kategorisasinya Bu, terkait dengan ... jadi ini tidak masalah Bu. Dan kami apresiasi, ini kerja keras dari Ibu Menteri, Pak Gubernur Bank Indonesia, Bappenas, Ketua OJK dan Kepala BPS.

Hanya satu harapan, Bu Menteri dan semuanya, perlu ada pemantauan pembiayaan Covid-19 ini mulai dari proses perencanaan kemudian implementasi, termasuk *output-nya*, *outcome-nya*, termasuk pemantauan, siapa yang menjadi *delivery* dari unit dalam kegiatan ini. Siapa yang mengawal pelaksanaan kegiatan ini, Covid-19. Jauh-jauh hari sudah berkembang, banyak prasangka-prasangka jangan sampai ada penumpang gelap di dalam Covid-19 ini. Itu saja harapan. Perlu ada pemantauan dari Ibu Menteri dan semua tadi, supaya ini betul-betul mencapai sasaran, tepat, juga termasuk jumlahnya. Jadi sebenarnya dari F- P. Nasdem terkait dengan Perpu dan Peraturan Presiden ini tidak ada masalah, semuanya jelas, begitu. Nah tadi, kontrol yang ketat, penting. Sebab sebelum terjadi Covid-19, ini kita ketahui *mandatory spending* dari sektor kesehatan juga bertahun-tahun Bu, itu *impact-nya* kabur. *Impact-nya* kabur. Apalagi ini Covid, dengan biaya ini, kalau ini lepas kontrol, sangat mungkin, lebih kabur lagi. Ini Bu Menteri.

Kemudian dari Pak Gubernur BI sekalian dengan Pak Wimboh, Ketua OJK, Peraturan OJK Nomor 11 Tanggal 13 Maret Pak Wimboh, terkait dengan restrukturisasi atau kita namakan relaksasi dari kredit untuk meringankan beban para Debitur. Ternyata ini keluhan, dan beberapa waktu yang lalu Komisi XI juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa Asosiasi, dan ini juga menemukan bahwa pada tataran di lapangan, kebijakan ini pendekatannya terlalu parsial. Artinya implementasinya belum sesuai dengan harapan. Ini keluhan, Bapak. Karena itu, juga ini menyangkut dengan keluhan dari Daerah terkait dengan usaha UMKM. Tapi kelonggarannya jangan dari pokoknya saja, tetapi bunganya tetap diterapkan seperti itu. Nah ini keluhan, kalau boleh, sama-sama. Sudah diprediksi bahwa ini celaka ini, UMKM. Padahal kita tahu UMKM yang paling tahan banting

terhadap guncangan-guncangan. Tetapi dengan Covid ini, ini sudah semakin parah ini. Jadi diharapkan terkait dengan kelonggaran ini, jangan cuma pokok, tapi bunga juga. Dan kalau mungkin itu bisa, satu tahunlah, jangan 6 bulan. Itu.

Kemudian dari Bappenas, eh dari BPS, ini juga data, keluhan Pak. Yang menerima bansos ini sudah terdaftar, tetapi antrinya berhari-hari. Dan pada gilirannya sudah didaftarkan di Kelurahan, tapi sampai hari ini tidak dapat. Ini keluhan tentang itu. Jadi kembali lagi kepada soal data, itu.

Dan yang terakhir, Pak Menteri Perencanaan Nasional, Ketua Bappenas, ... Pak, hanya saja sebagaimana kita pernah diskusi Pak, pada Rapat Kerja yang pertama Pak, bahwa harus ada keterikatan asumsi makro dan rencana jangka panjang. Kemudian dalam kondisi pandemik ini, Bappenas harus membuat suatu skenario yang sangat pesimistik, sekaligus dibuatkan apa namanya, asumsi ekonomi, *rebound* yang membaik, secara tiba-tiba di, itu. Nah kemudian tadi sudah disinggung juga di paparan, terkait dengan proyek-proyek strategis, dengan kondisi Covid ini, kami rasa tidak diharamkan untuk ditunda pelaksanaannya. Itu dari Bappenas.

Kemudian yang terakhir ini Menteri Bappenas, bahwa kami merekam beberapa waktu yang lalu ada keluhan dari Bapak Presiden, Beliau menyebutkan bahwa sektor pariwisata ini adalah sektor yang paling cepat mengalami *recovery*. Tapi kok Presiden tidak melihat strategi perencanaan secara fokus di sektor pariwisata ini, dan barangkali ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Bappenas, begitu.

Pak Ketua, Pak Menteri dan semuanya,

Itu sharing dari F- P. Nasdem, terkait dengan Perpu dan Perpres ini, sebab kami ini Bu Menteri dan semuanya, menjadi sasaran tembak siang malam untuk ini. Terkait dengan keistimewaan dari Pasal 27 dengan 3 ayatnya itu, kami mengatakan tidak ada, semuanya sudah sesuai, sudah secara *adjustment* tadi. Tidak ada masalah, dari segi material, dari segi perencanaan, kemudian dari aspek hukumnya. Itu Pak Ketua.

Terima kasih banyak.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Hatari, terima kasih atas penyampaiannya. Saya kira sudah sejalan dengan F- PG, soal Perpu.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P):

Ketua,

Interupsi.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Sebentar, sebentar, saya lagi bicara.
PP dan Perpres 54, dan yang paling penting juga Pasal 11, supaya
PP-nya segera ditandatangani, biar cepat jalan. Siapa tadi interupsi? Siapa
interupsi?

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P):

Rudi, Rudi.
Rudi Hartono Bangun.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Ya kenapa Pak Rudi?

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P):

Menambahkan pernyataan Pak Wakil Ketua tadi, di Poksi, sedikit Pak
Ketua, untuk Ibu Sri Mulyani. Halo?

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Ya, apa Pak Rudi? Silakan, dikit saja.

F- P. NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P):

Jadi begini Pak, tadi kan kelanjutannya, tadi menambahkan Pak Hatari.

ANGGOTA:

Katanya satu Fraksi, satu, Ketua.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Ini putarannya kayak Pak Rudi, nanti diputar sekali lagi deh.
Silakan Pak PKB, Ibu Ela, silakan Ibu Ela atau Pak Fathan?

F- PKB (ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I):

Ya terima kasih Ketua, izin.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Pak Ketua, Pimpinan Rapat yang saya hormati,
Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, Ketua BPS dan juga
Pak Menteri Bappenas,
Juga yang saya hormati kawan-kawan Komisi XI.**

Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada F- PKB, izinkan untuk menyampaikan beberapa catatan beserta pertanyaan mungkin. Secara prinsip, sepenuhnya F- PKB mendukung langkah-langkah Pemerintah yang tadi sudah dijabarkan, dan juga sebelumnya memberikan penghargaan, ini terlebih kepada Menteri Keuangan. Di luar sangkaan, ternyata jabaran yang cukup lengkap terkait komitmen Pemerintah bagaimana mengatasi Covid, apalagi dalam situasi sekarang, bacaan atas ekonomi makro beserta *refocussing* APBN 2020. Tadi dijelaskan tidak hanya misalkan stimulus-stimulus itu subsidi bunga, bukan hanya untuk bank konvensional atau bank-bank umum, BPR, tetapi juga langsung menyentuh terhadap koperasi, UMI, KUR, yang memang itu menjadi ekonomi masyarakat. Saya pikir sudah cukup detail menyajikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Jadi saking lengkapnya, nampaknya tidak ada kekuatiran dari sisi kebijakan.

Namun ada beberapa catatan yang perlu disampaikan. Pertama tadi terkait dengan stimulus atau bantuan untuk pra kerja. Mungkin sahabat-sahabat yang lain sudah menyampaikan, karena kalau yang lainnya yang langsung bersentuhan sama rakyat, dari mulai pembagian sembako, BLT dan lain sebagainya, saya pikir itu sudah cukup bagus, tinggal mengawal di lapangan terkait *database* yang dimiliki. Hanya saja agak menggelitik terkait pra kerja, terlebih pada pelatihan online, Bu Menteri, tadi menyampaikan bahwa sasaran utamanya adalah masyarakat yang terdampak Covid, terlebih yang mengalami PHK atau yang memang terhenti di dalam melakukan faktor ekonomi. Nah itu terlihat, karena hari ini dilihat bahwa masyarakat bukan butuh pelatihan, itu, tapi hari ini adalah membutuhkan makan yang jelas ada di depan mata. Itu mohon ditinjau kembali.

Kalau yang lainnya, untuk yang pembagian langsung, meskipun lewat online yang Rp600 ribu, saya pikir itu cukup bagus, meskipun di masyarakat bawah, karena saya sebagai wakil juga menyerukan ini ada program pra kerja yang harus bisa diakses oleh semuanya, baik yang kena PHK, ataupun karena yang kembali mudik ke daerah karena pemberhentian dalam melakukan UMKM dan sebagainya. Ternyata kalau dibawah memang cukup sulit diakses. Dari 500 orang yang daftar, mungkin yang kebagian hanya 1-2, meskipun tetap berpikir memperhatikan zona merah. Itu mohon ditinjau kembali Bu Menteri, terkait dengan pra kerja.

Yang kedua, mau menanyakan terkait tadi sudah dijelaskan bagaimana mencermati belanja pegawai, belanja modal, atau memang belanja lainnya. Tetapi saya belum melihat ada upaya untuk penundaan bayar utang. Karena terlihat alokasi bayar bunga utang masih tinggi. Mungkin Bu

Menteri bisa melakukan negosiasi terkait dengan Kreditur terkait dengan penundaan bayar bunga utang.

Terus selanjutnya mau menanyakan terkait karena memang hari ini lagi tahun kondisi krisis pangan, karena untuk yang pemotongan di Kementan, karena dari Komisi IV juga agak berteriak, mudah-mudahan pemotongan itu juga bukan berkaitan dengan hal yang sifatnya untuk ketahanan pangan dalam rangka menyiapkan hasil bumi untuk kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi alangkah kuatir kalau itu terjadi pemotongan itu juga untuk, malah memotong, memangkas untuk kebutuhan pangan. Itu juga mohon penjelasan.

Yang selanjutnya, F- PKB berharap, untuk *refocussing* 2020, Dana Desa kembali untuk dipertimbangkan untuk jangan dipotong. Kalau yang kemarinnya kemarin saya ikut Musrenbang di Provinsi, Lampung bagian ada dari DAU atau DAK itu sekitar Rp1,1 Triliun. Tetapi untuk Dana Desa, mohon kebijakannya kembali untuk tidak dipotong, karena itu adalah bagian dari ujung tombak sasaran penanganan Covid di Desa atau Daerah yang teritorinya cukup sangat terjangkau, atau kecil, langsung menyentuh kepada masyarakat. Karena kemarin saya beberapa desa keliling, tahap 1 itu anggarannya sudah tidak ada, atau sudah habis. Mungkin karena tidak tahu, bahasanya bahwa, akan terjadi kondisi Covid seperti ini. Jadi anggaran tahap 1 itu dihabiskan. Pada akhirnya mereka tidak punya anggaran untuk penanganan Covid. Terlebih banyak pemudik yang memang kembali atau balik dari kota untuk bisa berkumpul kepada keluarganya. Mereka hanya menunggu akhirnya tahap, pencairan tahap 2, meskipun belum tahu itu kapan pencairannya. Itu untuk Bu Menteri Keuangan.

Selanjutnya untuk Bank Indonesia, tadi masih dibunyikan terkait dengan bauran intervensi kebijakan moneter. Saya pikir sudah mulai melangkah, harus ada kolaborasi bauran intervensi fiskal dengan moneter. Karena kebijakan program penyelamatan ekonomi, dipastikan harus berpihak terhadap masyarakat. Misalkan tadi stimulus likuiditas terhadap Bank-bank atau Perbankan yang memang hari ini membutuhkan likuiditas. BI menyediakan itu, tapi kan kita tidak bisa memantau. Kalau misalkan, Bank-bank hanya fokus ke Korporasi apalagi dalam jumlah nilai angka yang cukup tinggi. Nah itu kita harus agak beralih pendekatannya, bagaimana ada bauran intervensi fiskal dengan moneter, pendekatannya biar *direct* langsung ke *person* atau ke media lembaganya UMKM dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya dinikmati oleh Korporasi-korporasi yang memang mereka sudah cukup stabil sebelumnya.

Terus yang kedua untuk BI, kalau negara lain, Bank Sentral, seperti Amerika, Eropa, Jepang, mereka bersedia membeli Surat Utang Korporasi. Karena hari ini terjadi penundaan cicilan yang lebih dari Rp10 Miliar, menyebabkan sekitar Rp30 Triliun ini *cash flow* terhenti. Nah bagaimana BI bisa berpikir bagaimana mengganti *cash flow* tersebut. Hari ini Pemerintah sudah bisa bantu subsidi bunga Rp34 Triliun. Nah jangan sampai *cash flow*

itu juga kembali dibebankan kepada Pemerintah atau Negara. Nah ini coba ada solusi dari BI barangkali bisa cermat melakukan kajian tersebut.

Yang selanjutnya untuk OJK. Beberapa stimulus sudah dijalankan untuk menggenjot penyelamatan ekonomi, baik dengan keluarnya 4 POJK. Tetapi itu baru pada stimulus subsidi bunga kredit. Nah tadi dalam penjabarannya juga mohon nanti melakukan koordinasi, KSSK, belum ada skenario ekspansi untuk kembali seperti semula. Jadi jangan hanya hari ini mitigasinya bagus, tetapi kelamaan mitigasi akhirnya pulihnya lambat. Nah jadi mohon skenario ekspansi pemberian kredit dan lain sebagainya harus sudah dibuat, harus sudah dilakukan skenario dari sekarang supaya bisa terantisipasi pulihnya seperti semula. Jangan hanya terus, tinggal menjalankan. Kan kalau kebijakan, stimulus, ada OJK, untuk relaksasi kredit, tapi juga harus punya ekspansi untuk penyelamatan dengan hari ini menggelontorkan kredit-kredit yang lain.

Terus yang terakhir untuk BPS, tadi menggembirakan datanya. Ekspor naik terlebih dari hasil bumi, karena memang kita tahu, Indonesia bagian dari penghasil bumi yang cukup lumayan. Tetapi memang angka impor, defisit. Itu juga kita sudah melihat bersama, hasil tadi penyajian dari BPS. Tapi belum terlihat, di tengah Covid ini Pak BPS, kan juga di Tim Wapres, ada Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Terus juga belum terlihat keakurasian data antara BPS, Kemensos ataupun Menko terkait dengan Tim Penanggulangan Kemiskinan, supaya hari ini data sebagai *basic* yang memang dibutuhkan, tidak babak belur. Artinya tidak cermat, tidak ada perbaikan, masih memakai yang lama, akhirnya terjadi masalah di lapangan. Jangan sampai sasarannya tetap kembali adalah pemerintahan tingkat bawah, RT, RW, Desa, yang menjadi sasaran tembak. Itu juga mohon BPS lebih intensif melakukan koordinasi bersama.

Terakhir, karena tadi Bappenas hanya singkat, mukadimah, mungkin prakata, tidak menyajikan materi yang cukup tersaji, hanya menanyakan bagaimana kabar IKN, Ibukota Negara, karena sebelum-sebelumnya kita pembahasan tentang Ibukota Negara. Nampaknya tidak ada pengalihan anggaran Ibukota Negara sedikitpun untuk Covid. Mungkin itu.

Terima kasih Pak Ketua, terima kasih kawan-kawan sekalian, terima kasih semuanya, narasumber, mitra.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Ibu Ela.

Selanjutnya kami persilakan dari F- PD, Ibu Vera. Silakan, ada Ibu Vera?

F- PD (HJ. VERA FEBYANTHY, M.Si):

Selamat sore Pimpinan.

Terima kasih Pak Dito.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepada Pimpinan Komisi XI beserta teman-teman Komisi XI, Dan juga Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan saya tidak bisa menyebutkan satu per satu karena mempersingkat waktu.

Saya langsung saja memberikan catatan kepada, dimulai dari Menteri Keuangan. Di dalam materi rapat materi sebelumnya, Realisasi Pembiayaan pada Triwulan I 2020 itu hingga akhir Maret, pembiayaan utang itu mencapai Rp76,5 Triliun atau 21%, 21,7% dari APBN 2020. Sedangkan di dalam slide halaman 24, *outlook* 2020 Pembiayaan Total itu nettonya Rp1,64 Triliun. Dan kita tahu bahwa sumber Pembiayaan Utang terbesar adalah penerbitan SBN yang sejumlah 800 sekian, tadi saya lihat. Dan jika minat dari investor pembelian obligasi negara, saya tidak, saya ingin mendapatkan penjelasan, 10 tahun di slide 12, minat investor market yang rendah, *yield*-nya semakin tertekan, tentunya bagaimana Pemerintah meningkatkan peminat investor untuk membeli SBN? Sementara BI juga terbatas di kisaran angka antara 25-30%. Dan kita tahu bagaimana *yield*-nya bisa terkendali dan kompetitif dikaitkan dengan prinsip BI. Nanti ini akan saya tanyakan langsung kepada BI. Namun ini kepada Menteri Keuangan.

Tentunya juga mengenai target *yield* reguler yang tadi Bu Menteri menyampaikan mengenai *greenshoe* dan *private placement* supaya bisa kompetitif, agar tidak membebani cicilan utang kita ke depannya. Tentunya apabila terjadi *gap*, dalam pembiayaan atau target penerimaan SBN yang sebesar 800 sekian tadi, Rp856 Triliun tidak tercapai, tentunya bagaimana Kementerian Keuangan atau Pemerintah melakukan kontingensinya? Itu juga kami perlu mendapatkan *exercise*-nya. Dan kami berharap, Pemerintah harap berhati-hati. Kami tahu, Ibu Menteri Keuangan adalah Ibu Menteri yang terbaik, Menteri Keuangan yang terbaik di dunia, sangat pruden dan *sustainable* di dalam mengelola Pembiayaan-nya. Namun kan Kementerian di bawahnya sebagai pelaksana itu juga harus hati-hati di dalam penggunaan dan agar ini juga tidak membebani terhadap generasi bunga utang kita yang selanjutnya sampai tahun 2020 itu bisa saja, saya lihat tadi disampaikan, itu Rp335,2 Triliun dan beban utangnya, bunganya saja Rp40 Triliun, pada slide yang halaman 20 tadi saya catat. Nah itu yang juga kita minta masyarakat tentunya KPK juga harus mengawasi terkait mengenai stimulus atau *package* Covid-19 ini.

Dan juga tadi Ibu Menteri menyampaikan mengenai PNBPN, pada slide nomor 19, terdapat koreksi cukup dalam Pos Pendapatan Negara (PNBP)

sebesar 26,9%, Bu Menteri. Karena adanya penurunan harga migas dan komoditas non migas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Kemenkeu bisa meningkatkan potensi PNBPN secara maksimal, pendapatan dari Deviden BUMN tahun 2019 itu saja meningkat, dan pendapatan dari BLU yang telah diberikan PMN cukup besar. Itu PMN sendiri Rp76,14 Triliun, untuk BLU Rp52 Triliun dan untuk BUMN Rp17, 7 Triliun. Tentunya kita akan, saya tidak mendapatkan di dalam postur, tidak melihat bagaimana Deviden yang ditarik kepada ketiga institusi tersebut. PMN, terhadap BLU, dan BUMN itu sendiri.

Dan mohon mungkin untuk dijelaskan kepada Bu Menteri. Dan juga di sini saya melihat tadi saya ada mencatat, Penerimaan Pajak terkoreksi cukup signifikan atau berkurang, kurang lebih hampir dari Rp300 Triliun, hampir mendekati angka Rp400 Triliun, 388 minusnya. Karena memang *magnitude* kontribusi terhadap Penerimaan Negara secara keseluruhan juga turun. Nah tentunya yang ingin saya tanyakan, proses atau strategi dari DJP dalam melakukan ekstensifikasi pajak. Karena kondisi ini adalah kondisi yang sangat *extraordinary*, tentunya DJP ini sudah melakukan kajian ekstensifikasi pajak di luar kebiasaan ya, di tahun 2020 ini. Nah tentunya juga saya ingin bertanya juga tentang dulu Bu Menteri pada pemaparan pertama kali juga ingin menempatkan atau menarik perusahaan-perusahaan yang *winner* di dalam, *potential winner* di era Covid ini, tentunya ke dalam perusahaan Zoom yang kita pakai saat ini juga meningkat cukup singkat, dan juga ada beberapa Perusahaan Multinasional Company yang juga seperti Tik-Tok, sekarang kita tahu orang di rumah itu sudah banyak yang stress sehingga menggunakan Tik-Tok, itu juga terbesar juga. Apakah penerapan itu sudah dilakukan? Itu juga bisa menambah Penerimaan APBN kita.

Dan selanjutnya pada slide 20 saya ingin menanyakan kepada, mengenai energi. Bahwa Subsidi Energi itu Rp27,9 Triliun. Jika pengurangan subsidi dimungkinkan apa tidak Bu Menteri, dilakukan pengurangan subsidi energi untuk luasan pemberian BLT, jadi ini dialihkan saja kepada BLT. Dan ini harus cepat dilakukan realokasi terhadap subsidi energi tadi. Saya tidak, belum itu, cuma menjelaskan akan ada rencana, tentunya kapan kira-kira pergeseran atau realokasi terhadap pengurangan subsidi tersebut. Tentunya ini juga bisa dialokasikan kepada sosial net, untuk BLT, PHK dan juga kepada keluarga yang terdampak kena PHK dan juga penyesuaian terhadap BBM ini juga tentunya bisa membeli masyarakat, daya beli masyarakat juga terus berkurang. Dan kita tahu bahwa penggunaan BBM ini juga terjadi sangat, penurunan yang sangat signifikan, karena tidak ada kegiatan orang pergi ke luar. Dan ini juga kalau perlu dilakukan koreksi atau penyesuaian sesegera mungkin.

Mengenai Belanja Transfer Daerah yang disampaikan oleh Bu Menteri dalam Triwulan I cukup rendah. Kita tahu bahwa tumbuhnya negatif, tumbuh dengan (-) 7,7 dan Realisasi Dana Desa tumbuh (-) 28,6 tadi saya coba membuka. Sementara untuk *outlook* TKDD dalam slide nomor 21 itu 85% atau terdapat kekurangan cukup signifikan, Rp94,2 Triliun. Dibandingkan dengan Belanja Pemerintah Pusat, itu hanya berkurang Rp87 Triliun atau 94,8%. Pengurangan Belanja Daerah malah lebih besar. Ini yang kami dari F-

PD memberikan tanggapan khusus untuk Belanja Daerah, kalau bisa jangan dikurangi, Bu Menteri. Karena *countrycycle* ke Daerah itu di tingkat perdesaan itu tidak berjalan. Sementara dengan skema atau pun dengan penyampaian Bappenas tadi, di dalam RKP-nya, judulnya kita tahu, pemulihan industri atau mempercepat pemulihan ekonomi itu kita tahu bangkitnya dari tingkat yang paling bawah yaitu dari perdesaan. Sebaiknya pengalihan tersebut untuk Covid itu adalah pagunya tersendiri. Jadi untuk Belanja Transfer Daerah itu jangan sampai berkurang. Itu kami meminta kepada Menteri Keuangan, tolonglah, karena bagaimana Daerah dan Desa itu ketika Covid sudah berakhir, mereka tidak ada pergerakan atau perputaran atau pertumbuhan ekonomi yang bisa kita harapkan. Dan mereka tidak ada kegiatan. Tentunya kegiatannya ada, tapi tidak banyak yang dilakukan pemotongan yang jumlahnya sampai Rp94 Triliun. Ini yang kita berharap supaya pertumbuhan Daerah dan Desa serta berjalan *countrycycle* untuk APBN-nya.

Dan selanjutnya Ibu Menteri pada slide 44, terdapat rencana BLT atau bansos, itu 9 juta keluarga penerima manfaat senilai Rp16,2 Triliun. BLT kita tahu bahwa ini adalah bagian *success story* dari Pemerintahan sebelumnya. Saya kira kita memberikan apresiasi, dan saya juga pada rapat pertama dengan Menteri Keuangan meminta supaya BLT ini dilakukan. Alhamdulillah, sudah direncanakan, namun pelaksanaannya juga, transisinya juga masih terjadi banyak masalah di Daerah yang kemarin Ibu Menteri sudah sampaikan. Tentunya dari pihak Kementerian Keuangan perlu memastikan 9 juta KPM tersebut dari data terpadu kesejahteraan sosial, atau kita kenal DTKS itu harus *valid by name by data*. Dan harus di, tadi juga perlu melakukan sinkronisasi dengan data BPS. Karena kan selama ini, saat ini kan yang menjadi motornya adalah dari Kementerian, Kemensos. Nah ini kita ingin, tadi juga Ibu Ela sudah menyampaikan sinkronisasi data BPS itu sangat penting dalam melakukan validasi data. Tentunya teknis penyalurannya melalui Kantor Pos itu juga *success story* juga dan itu sangat berhasil pada Pemerintah yang lalu. Dan PT. Pos itu penyalurannya sampai dengan 8 juta. Dan untuk Himbara, kami belum mendapatkan penjelasan bagaimana penyaluran atau transisi terhadap penyaluran implementasi yang dilakukan oleh Himbara. Dan itu juga belum jelas. Selama ini kan yang dikeluhkan oleh Kepala Desa adalah Kementerian, Kementerian Desa dan Kemensos. Dan juga lagi-lagi dari Gubernur, itu juga dipersalahkan. Nah ini sebetulnya menjadi tupoksi siapa yang harus tanggung jawab dan ini harus segera, orang tidak bisa nahan Bu, untuk makan. Bagaimana kalau penyaluran itu terhambat. Kita saja kalau tidak makan sehari saja, apa kita bisa rapel untuk berikutnya? Kan tidak mungkin. Itu kan urusan perut, bisa terjadi gejolak nanti, yang tidak kita harapkan. Jadi harus sesegera mungkin dilaksanakan, agar implementasinya juga berjalan dengan baik.

Selanjutnya untuk, pada slide 50 tadi saya catat, usaha terhadap UMKM melalui subsidi Rp6, 40 Triliun subsidi bunga dan penundaan angsuran sebesar Rp105,74 Triliun. Namun prakteknya di lapangan, khusus ini kepada OJK, saya ingin mengkritisi, ini praktek di lapangan, masyarakat mengajukan relaksasi KUR, terutama di Daerah pemilihan saya di Kab.

Karawang, banyak petani yang mengeluhkan masalah persoalan ini. Faktanya diperoleh, bahwa mereka diperkenankan pendapatan penundaannya. Jadi mereka itu hanya dilakukan penundaan terhadap pokoknya, jadi hanya bunganya saja, dan ini tenornya yang diperpanjang. Pembayaran dan tambahan tenor selama misalnya 6 bulan. Namun di waktu 6 bulan atau tambahannya, akan dikenakan bunga berkali-kali. Misalnya begini, contoh salah satu simulasi normal dengan pokok Rp6,1 juta untuk 36 bulan. Tapi di bulan ke-37 sampai 42, pokok dan bunga itu menjadi bertambah. Jadi kan ini hanya pelonggaran saja. Memberikan nafas mereka untuk sesaat. Jadi yang diberikan hanya obat Antimonya sebentar saja, begitu. Setelah itu mereka pergi lagi, ke laut, puyeng lagi kepalanya. Jadi ini sementara jumlah yang sudah diberikan Pemerintah itu cukup besar, Rp6,047 Triliun untuk subsidi bunga, dan penundaan angsurannya itu sampai Rp100 Triliun. Sementara di bawahnya ini tidak jalan, begitu. Bahkan hanya memperlebar bunga dan memperpanjang tenornya. Dampaknya di mana keuntungan kepada pihak Debitur, khususnya pada masyarakat lapisan bawah untuk ultra mikro. Mohon dari pihak OJK untuk melakukan apa namanya, pengawasan, terhadap pihak Perbankan. Seluruhnya harus dilakukan dengan jelas dan tepat. Mungkin OJK sudah melakukan PU OJKnya, tapi di bawahnya juga mereka, ya tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan khususnya kepada pihak-pihak Bank Swasta, itu juga mereka, ya mereka cuma *business as usual* saja. Yang mereka lakukan ya seperti promo, tenggang tenornya ditambah, dan itu juga tidak berdampak apa-apa. Debiturnya malah mereka mendapatkan likuiditas, masyarakat di bawah juga sama saja. Tidak berdampak untuk, yang diharapkan oleh pihak OJK. Saya yakin OJK bisa melakukan Sistem Pengawasan yang lebih ketat terhadap pihak Perbankan maupun kepada pihak-pihak yang mendapatkan penundaan angsuran yang sebesar jumlah apa namanya, bunga ataupun biaya yang sudah sangat signifikan sebesar Rp105,74 Triliun tersebut. Jadi itu yang ingin saya tanyakan kepada pihak OJK.

Pada slide 42, terdapat eh maksud saya pada OJK, lanjut juga kepada Menteri Keuangan, pada slide 47 tadi saya catat, terdapat perencanaan perluasan kartu prakerja. Ini yang sekarang ini menjadi isu. Dan ini sebaiknya Bu Menteri, dialihkan saja untuk BLT. Saya kira ini segera dihentikan. Karena kita tahu setiap hari kita mendapatkan, yang di medsos, segala macam ini, sudah menjadi gejala yang kita sudah tidak harus menjelaskan seperti apa, tapi ini sudah beredar. Sebaiknya bentuk insentif tersebut dialihkan untuk korban PHK, masyarakat untuk kelas menengah, mereka juga calon-calon menengah bawah, segmen B+, apa, C, itu juga mereka menjadi calon orang miskin. Lebih baik itu dialihkan saja. Pelatihan itu juga baik, niatnya bagus, namun justru yang berkembang, terjadi penyalahgunaan. Isunya, apakah ini hoax atau tidak, kami tidak tahu dan kami minta dari KPK untuk monitor terhadap penggunaan kartu prakerja tersebut, anggaran kartu prakerja. Selanjutnya, itu saja dari saya untuk Menteri Keuangan.

Masih dari Bank Indonesia. Sebentar, Pak Dito, dalam bahan sebelumnya bahwa

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Habis waktu ini.

F- PD (HJ. VERA FEBYANTHY, M.Si):

Sebentar, Bank Indonesia sangat, saya belum bicara Pak, sebentar. Untuk Bank Indonesia, program pemulihan ekonomi, kita tahu bahwa pemulihan dunia usaha pendanaannya melalui penerbitan SBN yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia. Nah harusnya Bank Indonesia diharapkan juga melakukan *sharing the pain*. Jadi jangan apa namanya, seperti *business as usual*, Pak Gubernur. Artinya BI juga perlu terlalu banyak mendapat untung, *profit taking* dalam hasil pembelian SBN. Ini kan ada kondisi *extraordinary*. Semua orang juga, kita, kami, saya sendiri juga melakukan *sharing the pain*, bagaimana sebuah institusi Bank Indonesia juga harus memikirkan hal tersebut. Jadi ya mbok dipikirkan kembali, begitu. Jangan sampai, kita tahu bahwa tidak boleh di bawah 10% atau lebih rendah dari kewajiban moneter. Yaitu di, untuk kali ini saja Pimpinan, untuk kali ini saja Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah sudah melakukan *extraordinary*. Seluruhnya, jajarannya, OJK sudah melakukan semua, Bank Indonesia lakukan hal yang sama lah, kita sama-sama bahwa ini ada kondisi di mana di luar dari yang biasa, dan ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia, di dunia yang lain juga melakukan *sharing the pain*, Indonesia juga sama, kami berharap semua, nanti kita akan bahas secara tersendiri untuk persoalan masalah ini.

Dan OJK, saya yakin, tolong itu saja dari saya, pesan saya untuk memonitor kepada pihak Perbankan, untuk ultramikro yang mendapatkan pembiayaan subsidi bunga maupun penundaan tersebut.

Kepada Bappenas, terakhir, bagaimana rencana pembangunan Ibukota? Tadi Pak Suharso juga belum menyampaikan. Sebaiknya dalam kondisi seperti ini, kita tahu dilakukan ataupun penundaan sementara dalam pembangunan perencanaan pembangunan Ibukota. Kita fokuskan saja, semua, kami DPR saja, anggarannya dipotong. Semua hampir Kementerian anggarannya dipotong. Untuk pembangunan Ibukota juga sebaiknya untuk dilakukan pengkajian ulang.

Mungkin itu saja dari saya, Pimpinan. Nanti kita ingin mendapatkan pendalaman, ataupun kalaupun tidak bisa dijawab, bisa secara tertulis untuk pertanyaan-pertanyaan teknis dari saya.

Terima kasih .

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Baik, terima kasih Ibu Vera.
Dari F- PKS, silakan.

ANGGOTA:

Pak Ketua,

Interupsi.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

F- PKS mana, F- PKS?
Siapa itu F- PKS?

F- PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Ecky Awal Mucharam, Ketua.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Silakan Pak Ecky, silakan Pak Ecky.

F- PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Ya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dan terima kasih.

Yang saya hormati Ketua Komisi XI serta Pimpinan Komisi XI, serta Anggota Komisi XI, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Gubernur dan jajarannya, Komisioner OJK, Pak Wimboh, dan beserta jajarannya, Kemudian Ibu Menteri Keuangan yang sore ini seperti terlihat Ibu Fatmawati ya, pakai kerudung, lanjutkan saja itu Bu, seperti istri Proklamator itu, Kemudian ya ada Menteri Bappenas, ini kawan kita, Dan ada juga BPS.

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan asumsi-asumsi yang ada di dalam *outlook* ya, kemarin, termasuk Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara dilanjutkan dengan Penerimaan Perpajakan. Saya tidak mau berkata pesimis ya, tetapi saya ingin menguji apakah ini realistis atau tidak. Pertama terkait dengan katakana lah 2,3% ya, 2,3% itu sendiri banyak pihak berpendapat itu belum realistis. Mungkin itu yang betul-betul koreksi yang paling minimum. Padahal ada ketidakpastian, ada *uncertainty* kapan Covid ini selesai. Ketika sekali kita salah berasumsi di dalam pertumbuhan yang juga berdampak kepada asumsi Penerimaan Negara, maka sesungguhnya menutup *shortfall* dari asumsi tersebut, menjadi sangat lebih sulit lagi. Karenanya sesungguhnya, Pemerintah, coba, kita ingin

tahu, ada skenario lain, yang juga Bu Menteri pernah dan Pemerintah menyampaikan, ada skenario misalnya pertumbuhan 0% atau 1 koma *something* lah seperti itu. Ya ketika misalnya Covid-nya tidak tertangani pada saat selesai di *peak* di bulan Juni. Nah kita ingin skenario seperti itu.

Yang kedua, kalau kita menggunakan angka 2,3% itu saja, artinya dibandingkan dengan APBN 2020 5,2% itu ada penurunan pertumbuhan lebih dari 50%. Kalau kita *equalization* dengan denyut perekonomian kita yang bisa terekap di dalam perpajakan khususnya pajak pertambahan nilai, sayangnya ini di dalam presentasi Menteri Keuangan belum, kurang detail ya. Tetapi kalau kita secara garis besar melakukan *equalization* dengan Pertambahan Nilai, kemudian dengan Pajak Penghasilan Badan, dan tentunya adalah PPh Pasal 21 juga menurun, maka penurunan sebesar menjadi 78,3% di mana penurunannya perpajakan Rp300-Rp400 Triliun, Rp388 Triliun, itu menurut saya tidak realistis. Bisa jadi sesungguhnya ketika dalam kondisi normal saja, dalam kondisi normal saja, *shortfall* perpajakan itu bisa mencapai Rp250 Triliun. Dalam kondisi yang sekarang, di mana pertumbuhan diasumsikan menurun menjadi 2,3%, *let say* menurunnya lebih dari 50%, asumsi 5,0% maka sesungguhnya kalau kita *equalization*, maka bisa jadi penurunan perpajakannya mencapai di angka 40%. Artinya kalau ini kan dihitung masih penurunan perpajakan masih di angka 22,7%. Nah ini saya terus-terang, bukan pesimis ya tapi menurut saya ini harus disajikan angka yang lebih realistis, dan tolong dijelaskan bagaimana skenarionya. Ketika *shortfall* apa namanya, lebih dalam daripada angka yang diprediksikan yaitu Rp388 Triliun.

Yang kedua, terkait dengan fungsi dari seorang *Ministry of Treasury* ya, Beliau sudah banyak mendapatkan *award* ya, mudah-mudahan Insya Allah bisa juga selamat di dalam krisis sekarang. Kita semua, negara Indonesia ini, dengan Tim Ekonomi, BI, OJK dan seluruhnya. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa Menteri Keuangan bukan hanya sebatas Bendahara Umum Negara, yang mengatur keluar masuk uang dan memegang Uang Kas Rekening Negara. Bukan. Pemerintah juga bisa tegas, Kementerian, Menteri Keuangan bisa melakukan hal kebijakan fiskal yang lebih tegas. Misalnya anggaran-anggaran yang memang masih dipandang tidak fokus kepada penanganan Covid-19 dan dampak-dampaknya, memang harus dipotong, harus berani memotong itu ya. Dan kita lihat, memang sudah ada 140, hampir Rp150 Triliun potongan, tapi menurut saya, kalau dibandingkan dengan Belanja Modal yang Rp200 Triliun saja, kemudian ada penghematan, yang Belanja Modal itu sebetulnya bisa di *delay*, bisa di *multiyears*, kemudian ada belanja-belanja barang misalnya Perjalanan Dinas, dan lain sebagainya yang juga bisa dipotong, menurut saya pemotongan itu bisa lebih besar dari itu dan bisa dialihkan kepada penanganan Covid-19 dan dampaknya. Sebagai contoh saya ingin katakan terkait dengan kartu pra kerja. Kartu pra kerja itu didesain pada saat kondisi normal dengan anggaran yang dibawah Rp5 Triliun, 3 koma sekian *something*. Dan kenapa konsep pra kerja itu ada pelatihan? Karena kondisi normal di mana ada diterima, dipersiapkan di lapangan pekerjaan. Loh sekarang ini tadi informasi dari BPS dan informasi dari pihak lain, bahwa tidak ada permintaan tenaga kerja. Tidak ada pembukaan lapangan kerja baru. Loh

kemudian dibukalah kartu pra kerja ditambah anggaran Rp20 Triliun yang asumsinya dengan mekanisme yang masih dalam kondisi normal, ada pelatihan kerja online dan offline dan lain sebagainya. Justru yang lebih penting adalah bukan itu. Tetapi menyelamatkan korban dari orang-orang yang kena PHK, orang-orang yang *jobless* yang hilang dari pekerjaannya, baik sektor formal maupun sektor informal. Kita ketahui bahwa *underground* ekonomi kita cukup besar. Dan saat ini karena adanya *social distancing*, adanya PSBB, yang terjadi adalah *underground* ekonomi juga ini mati. Karenanya menurut saya tidak relevan kalau kartu pra kerja itu masih dikasih anggaran dengan kondisi asumsi yang masih seperti normal. Saya sependapat dengan teman-teman yang lain, dialihkan saja dengan langsung mau bentuknya BLT kah, mau sembako, mau apa yang langsung dinikmati oleh rakyat ya, yang menurut Menteri bisa mencapai 50% dari titik garis bawah. Dibuat skemanya dan itu bisa dibuat oleh Menteri Keuangan. "Hei, tidak bisa anggaran yang seperti ini". Termasuk di dalamnya adalah anggaran terkait dengan persiapan Ibukota Negara baru, itu, dan anggaran-anggaran lainnya, DPR juga sama, sudah dipotong berapa ratus miliar. Menurut saya, ya kita hargailah keinginan untuk membuat monumental terkait dengan Ibukota Negara baru, tetapi kita harus membuat skenario-skenario yang realistis dengan kondisi yang kekinian. Tolonglah ya, anggaran-anggaran yang memang bisa di-*delay*. Kalau perlu ada perencanaan ya perencanaan, ya perencanaan kita menunggu tahun 2020-2021 jangan target tayang 2023 misalnya atau 2024 menjelang pemilu. Saya rasa tidak perlu. Kalau Pemerintah ini sukses dalam menangani Covid-19 dan dampak-dampaknya, itu sudah dicatat oleh sejarah, dicatat oleh rakyat Indonesia dan dicatat oleh penduduk langit. Itu adalah merupakan warisan yang terbesar bagi Bapak-bapak, Ibu-Ibu, saudara kita semua di dalam menyelamatkan negara ini dari krisis.

Berikutnya, dalam satu hari, dua hari ini terjadi sebuah isu, dan saya sering banyak membaca, saya termasuk yang jarang baca group-group WA ya, tetapi saya banyak ditanya langsung, "Apa benar nih Pemerintah, mereka tahunya Pemerintah ya, bukan Bank Indonesia, tahunya, Pemerintah mau cetak uang, begitu kan ya? Ini dari kelas-kelas ilmuwan, tapi bukan ilmu ekonomi tentunya, itu bertanya ya, benar tidak. Mereka ada kepanikan. "Benar tidak mau cetak uang", karena yang mereka pikir adalah peristiwa tahun 1965-1966, peristiwa 1998. Mereka berkuatir, nilai rupiah mereka, nilai simpanan mereka, yang ada di Perbankan, jadi turun. Saya, menurut saya isu terkait pencetakan uang ini sangat des, bukan destruktiflah mungkin ya disinsentif terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan KSSK. Kenapa? Kalau ada kepanikan karena ketidakpahaman, isu pencetakan ini dan kemudian orang-orang berbondong-bondong menarik ada *rush* dari Dana Pihak Ketiga di Perbankan, khususnya Dana Pihak Ketiga yang dikuasai oleh, tentu yang diatas Rp2 Miliar ke atas, diubah menjadi ingin dalam bentuk valas dengan dollar, ini sangat berbahaya kalau menurut saya, nilai tukar kita dalam perekonomian kita. Jadi tolonglah ini dijaga, isu ini. Dan tadi penjelasan Gubernur BI sudah sangat *clear*, dan ini dimasyarakatkan. Ini kami sendiri, PKS, saya menjadi bahan pertanyaan dan saya jelaskan

kembali yang dimaksud dengan ini adalah ini, ini, ini, dan termasuk kepada publik ya. Jadi isu terkait dengan pencetakan uang ini tolong harus distop dari sekarang, karena sudah bisa, akan bisa mempengaruhi reaksi dari para pemilik Dana Pihak Ketiga yang ada di Perbankan, dan menekan Dana Pihak Ketiga, bisa kemudian mereka melarikannya ke valas tertentu. Itu yang kedua.

Berikutnya adalah terkait apa yang dijelaskan terkait dengan anggaran Covid-19 ya. Terkait, Bapak-Ibu sekalian, kita paham bahwa betul, dalam konteks perhitungan DAU, Dana Bagi Hasil, karena tentu salah satu parameter penghitungannya adalah Penerimaan Negara, kemudian ada PDB dan lain sebagainya itu menurun, maka DBH dan DAU dan Dana Transfer ke Daerah menjadi menurun. Tapi mesti diingat, PAD juga menurun. Daerah, celah fiskal itu sangat kecil. Dan sebagian besar Daerah, lebih dari 60% nya digunakan untuk kebutuhan rutin. Gaji pegawai, Belanja kantor, listrik dan lain sebagainya. Karenanya Pemerintah Pusat, ketika ada penurunan TKDD dari DAU, DBH dan lain sebagainya, maka harus didrop. Daerah-daerah yang terdampak khususnya di Pulau Jawa dari mulai Provinsi dan Kabupaten/Kota, itu di-*support* langsung, ditambah ada bantalan fiskal untuk Daerah dari Pemerintah Pusat untuk penanganan Covid daerah. Karena yang lebih paham terkait dengan penanganan Covid di Daerah termasuk di dalamnya adalah dampak-dampaknya akibat PSBB dan sebagainya, itu Daerah. Tentu ini harus di-*lead* oleh Kementerian Keuangan, juga beserta Menteri Dalam Negeri, agar tidak ada *miss* di dalam penerapan dana Covid-19. Tapi harus ada anggaran yang dialokasikan, bantalan fiskal dari Pemerintah Pusat untuk menangani Covid dan dampak Covid di Daerah, bentuknya tentu Kementerian Keuangan lebih paham. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebagaimana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga mengalami kesulitan fiskal yang luar biasa. Dana TKDD dipotong karena DAU, DBH dan lain sebagainya itu terpengaruh, ya, DAK dan sebagainya. Kemudian PAD juga menurun.

Bapak-Ibu sekalian,

Karenanya, saya sudah apa namanya, mengapresiasi kepada Pemerintah, Menteri Keuangan, yang tidak memotong Dana Desa yang cukup signifikan. Tetapi kan diberikan, dialihkan untuk apa namanya, penanganan Covid, bantuan langsung dan sebagainya. Tinggal mungkin tadi, proses pencairannya ya. Karena yang termin pertama itu memang termin pertama, *relatively* tidak terpikir oleh Desa untuk menangani Covid. Segeralah disampaikan, mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini bisa disampaikan pada termin-termin berikutnya.

Kemudian untuk OJK, terima kasih, ya tadi sudah dipaparkan apa namanya, relaksasi dan sebagainya, saya mengerti betul bahwa ini adalah urusan bisnis. Mungkin di OJK tidak bisa intervensi langsung mengenai Anda harus apa namanya, ketika ada perpanjangan tempo, tidak boleh dikenakan bunga dan lain sebagainya. Mungkin OJK tidak bisa mengatur sedetail itu dari masing-masing Perbankan. Tetapi mungkin OJK bisa mendesain bahwa, dan

ada pemahaman, mendesain bahwa kebijakan Perbankan itu di sektor hilir dengan para Debitur, artinya nasabah-nasabah yang mendapatkan kredit ya, ya namanya kan Debitur, nasabah Debitur, itu relaksasinya yang betul-betul memiliki manfaat, bukan pengalihan beban. Saya mengerti bahwa adanya subsidi bunga, itu membantu Debitur, sekaligus juga membantu industri Perbankan. Tetapi kita pahami kalau *second round*, misalnya *first round*-nya adalah bulan Maret, April, Mei, Juni. Kuartal II ini, kan akan langsung dirasakan oleh para Debitur ini justru dalam *third round* dan *quad round*, dalam Kuartal III dan Kuartal IV, begitu. Dan juga tahun 2021. Ya boleh-boleh sajalah Pemerintah tadi mengutip IMF, tapi saya rasa dalam kondisi normal saja, lima tahun terakhir kan tidak demikian, tidak mencapai 7% dari target yang diawal oleh RPJMN. Ya kita juga harus realistis, 2021 itu seperti apa. Karenanya mungkin saya tidak tahu harus seperti apa dalam konteks bentuk peraturannya tetapi apa yang disuarakan teman-teman di bawah, betul-betul bisa menjaga, khususnya adalah para Debitur yang Rp500 juta ke bawah, Rp500 juta ke bawah. Saya fokus ke Rp500 juta ke bawah, saya tidak tahu berapa portofolio dan berapa nasabah yang Rp500 juta ke bawah. Kalau itu bisa diselamatkan oleh Perbankan dan tidak dibebani dalam nanti Kuartal III, Kuartal IV, itu mungkin pasti akan membantu mereka.

Dan berikutnya adalah terkait dengan *administered price* ya. Langkah Pemerintah untuk membebaskan 450 dan memberikan keringanan kepada pelanggan listrik 450 dan 900 watt, itu menurut saya sudah tepat ya. Karena apa? *Administered price* itu lebih mudah diatur, lebih mudah dikendalikan. Saya berpendapat bahwa tolong yang terkait dengan gas, gas yang 3kg. Gas 3kg, juga bisa dilakukan itu. Kemudian mungkin *fuel*, apa, bahan bakar. Bahan bakar juga bisa diturunkan khususnya untuk konsumsi buat yang kendaraan bermotor roda dua, misalnya. Kemudian, nah ini juga ini, pajak kendaraan bermotor roda dua. Ini termasuk *administered price*, karena berada dibawah kendali Pemerintah walaupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat bisa memberikan alasan, apa, memberikan arahan-arahan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan relaksasi-relaksasi terkait dengan pajak kendaraan bermotor roda dua. Tentunya tadi, dengan adanya bantalan fiskal dari Pemerintah Pusat untuk penanganan Covid-19 ke Daerah. Artinya kehilangan tersebut, kehilangan penerimaan tersebut dibantu oleh Pemerintah Pusat. Kalau seperti ini sudah pasti, karena pemilik kendaraan roda dua itu adalah 100 juta penduduk terbawah, 40% penduduk yang termiskin yang di bawah, terbawah, maka secara otomatis itu mendapatkan subsidi pemerintah, mendapatkan manfaat pemerintah sebagai *beneficiaries*. Berbeda misalnya dengan sembako dan lain sebagainya, yang mereka itu masih harus mencari *mining*, data *mining*.

Terakhir, Bapak-Ibu sekalian,

Saya ingin melihat bahwa minta *exercise* ya, dari Pemerintah, dan Bank Indonesia serta OJK, dengan asumsi kalau mungkin sekarang pada level, bahkan mungkin belum moderat ya, masih dianggap ringan. Coba pada level moderat dan berat, seperti apa kondisi fiskal kita dan kondisi moneter

kita. Kenapa ini menjadi penting? Mungkin di rapat tertutup, tapi kita tahu. Kenapa? Semua *best practice* di seluruh dunia, semua biaya krisis yang dilakukan oleh Pemerintah di berbagai negara maju, itu senantiasa melibatkan wakil-wakil rakyat, mengetahui, wakil-wakil rakyat, perkembangannya. Dan karenanya mungkin karena kami adalah bagian dari konstitusi Undang-undang Dasar Republik Indonesia sebagai wakil rakyat, maka saya punya keyakinan, Pemerintah, BI, OJK, akan selalu transparan kepada DPR dengan berbagai skenario, dengan berbagai skenario. Sehingga kita punya keyakinan bahwa kita akan terlepas dari krisis, dengan akuntabel, *check and balances* tetap jalan. Karenanya saya yakin bahwa Rancangan Undang-undang APBN 2021 akan diajukan oleh Pemerintah dalam bentuk rancangan undang-undang, tidak dalam bentuk yang lainnya. Karena ini akan menjadi komplikasi-komplikasi konstitusi di kemudian hari dan komplikasi politik dikemudian hari. Saya tidak ingin proses politik di dalam penanganan krisis ini terjadi komplikasi hukum dan komplikasi politik pada kemudian hari, apalagi dicatat dalam sejarah yang cukup, jangan sampai terjadilah sejarah yang tidak baik untuk generasi masa yang akan datang.

Saya menghormati dan percaya kepada Ibu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner OJK, Bappenas, percaya, kita bisa semua, DPR, menangani dan lewat dari krisis ini.

*Wallahumma a fiq ila aquamittorik.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Amin, amin, Ya Robbal alamin.

Baik, selanjutnya kami persilakan dari F- PAN, Pak Jon Erizal.

F- PAN (H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Komisioner OJK, BPS dan Menteri Bappenas.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.

Sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman dari kiri depan, saya selalu dapat bagian belakang terus ini Ketua, tapi tidak apa-apa.

Tadi menarik, pada saat Ibu Sri Mulyani menyampaikan likuiditas itu BI, langsung media masuk, langsung masuk di media, itu menjadi *trending topic*, barangkali sebentar lagi. Jadi memang saya melihat dari Menteri Keuangan

sampaikan tadi, banyak detail, dan saya mendapat informasi yang lebih dalam, saya lihat. Namun tadi disinggung juga, kita dana siap, seperti yang saya sampaikan kemarin juga bahwa itu urusan kita di XI dan Bapak-Ibu yang ada di depan kita ini, adalah urusan Dana. Nah saya juga pertanyakan bagaimana masalah implementasi penggunaannya termasuk *supply side*. Ternyata Ibu Menteri tadi juga menyampaikan, *problemnya* di *supply side*. Alat-alat yang dibutuhkan itu semua negara butuh. Nah ini kan satu tantangan yang luar biasa. Di sinilah kita melihat, sejauh mana lobby kita, lobby petinggi-petinggi kita terhadap negara-negara produsen alat-alat yang dibutuhkan oleh banyak negara tersebut. Nah di situ juga kita lihat kualitasnya.

Kemudian kita juga bisa membaca di beberapa media, beberapa waktu yang lalu bahkan dari sisi *supply side* ini, Meneg BUMN menyampaikan banyak mafia-mafia yang bermain di sini rupanya. Nah ini juga yang saya sampaikan kemarin itu, bagaimana sisi implementasinya, begitu. Kita matimatian berpikir mencari solusi, bagaimana sumber dana ini siap untuk mendukung seluruh kegiatan yang fokus ke Covid dan *me-recovery* pertumbuhan ekonomi kembali, namun dalam pelaksanaannya kan kita tidak tahu seperti apa. Dan saya pertanyakan kemarin bahwa sejauh mana ini tangan kita, tangan Bu Menteri Keuangan, Bappenas, OJK dan BI bisa mengendalikan yang berkaitan dengan implementasi belanja ini, baik dengan yang membelanjakan maupun dari sisi *supply* bahan-bahan yang dibutuhkan.

Kemudian yang kedua juga saya ingin bertanya, Ibu, kalau nanti katakanlah skenario-skenario terberat ini kita lalui, kemarin kan Ibu mengatakan berat dan sangat berat kan? Katakanlah syukur kalau berat sudah dilalui. Tadi disinggung juga oleh Pak Andreas, bagaimana *me-recover* kondisi ini lagi, begitu. Karena semuanya ini kan dibiayai dari utang-utang, semuanya dibiayai dari kelonggaran-kelonggaran yang banyak dilakukan, baik dari OJK, BI dan seterusnya. Nah apa langkah ini? Ini juga harus diantisipasi dari sekarang. Kalau tidak salah saya, dana rekap yang berkaitan dengan perbankan waktu itu, sampai sekarang kan masih belum jelas. Nah itu berapa ratus triliun waktu itu dikeluarkan kan? Nah ini seperti apa setelahnya ini kan? Kita juga, saya rasa kita juga harus tahu kan langkah-langkah ke depan, walaupun yang di depan mata ini harus kita lakukan sesegera mungkin.

Kemudian yang dari Bappenas, Pak Menteri, tadi mungkin karena sibuk, Pak Menteri hanya menyampaikan sepintas saja, tetapi tidak apa-apa, ingin bertanya bahwa bagaimana mengontrol atau meng-*synchronize* APBN yang dipunyai oleh Pusat dengan APBD di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Saya pernah menanyakan ini juga waktu itu dengan Pak Menteri Bappenas sebelumnya, dan itu kelihatannya tidak ada tangan yang efektif untuk menyentuh itu. Karena hanya dijawab bahwa kita punya Bappeda, yang dibawah kontrol Bappenas. Dan saya sampaikan, Bappenas itu eh Bappeda itu dia tidak ngikut Bappenas, tapi dia ikut Gubernur-nya, karena dia dipilih oleh Gubernur atau Walikota atau Bupati-nya. Nah ini seperti apa? Apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Kita lihat, ada beberapa Kabupaten/Kota,

mereka mengalokasikan begitu besar terhadap anggaran APBD mereka untuk Covid. Tapi ada beberapa Bupati dan Gubernur juga tidak terlalu fokus. Nah ini seperti apa meng-*synchronize* hal seperti ini, ini penting sekali ini.

Kemudian BI, saya tadi belum melihat yang disampaikan oleh Pak Gubernur, walaupun sudah komprehensif tetapi hal yang saya singgung kemarin yang berkaitan dengan bagaimana formula agar *rate* ini juga lebih apa namanya, lebih *approach*-nya itu kepada musibah. Jadi *rate*-nya ini bukan *approach* pada profit, tapi pada musibah, begitu. Nah saya belum melihat. Nah kemarin saya sudah menyampaikan beberapa usulan dulu kan, untuk misalnya Dana GWM yang *stand by* itu. Sampai sejumlah hal tersebut, itu bisa di *blending*, sehingga dapat *rate* yang lebih baik. Dan ini ujungnya juga baik buat semua.

Kemudian bicara likuiditas ya, mohon maaf, apa boleh minum dulu saya, Pak Ketua? Berbicara likuiditas, kita senang tadi BI sudah menurunkan GWM-nya, kemudian intervensi pasar dan seterusnya, kemudian likuiditas di market terjaga, sekarang ini. Itu kita apresiasi. Namun likuiditas ini kan ada di market, ada juga di industrinya sendiri, di Perbankan masing-masing kan beda kekuatan likuiditasnya. Bagi Perbankan atau industri yang tidak punya likuiditas yang cukup, itu siapa yang kompeten untuk menyentuh ini? Apakah mereka dibiarkan tutup saja dengan korban yang banyak nanti, atau solusinya seperti apa? Mereka mau *me-recovery* kalau ke BI, sekarang kan mekanisme harus tetap ada SBN dan seterusnya. Nah apakah nanti yang mau kita selamatkan Bank-bank besar saja, misalnya. Bagaimana dengan Bank-bank kecil yang sekarang pasti dalam kesulitan likuiditas. Nah jadi likuiditas di sini saya rasa perlu dilihat dari 2 sisi, market *liquidity* sama dengan *industry liquidity*, masing-masing industrinya itu, begitu. Nah itu untuk Bank Indonesia.

Kemudian untuk OJK, Pak Wimboh, POJK-POJK yang sudah dilakukan itu sangat efektif, tapi belum *implemented*. Belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Saya kasih contoh satu kasus, ada di industri *leasing*, mereka itu sudah menyetujui relaksasi terhadap nasabah-nasabah mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi pada saat mereka menyampaikan ke Bank Pendukung, Bank Pendukung itu harus melihat itu lagi. Dan mereka menyampaikan, dana dari Pemerintah juga belum turun ke mereka. Nah inilah yang saya sampaikan, penting sekali harus cepat direalisasikan hal-hal yang direncanakan tersebut, begitu. Kalau memang ada rencana Pemerintah mendorong likuiditas tersebut di pasar, nah likuiditas seperti apa. Apakah tersediaan likuiditas saja dengan mekanisme surat-surat yang mereka punyai atau SBN yang mereka punyai, atau likuiditas itu memang mensupport kalau mereka kekurangan likuiditas? Nah ini menjadi satu pertanyaan besar.

Kemudian begitu kondisi Insya Allah tadi sesuai doa Ketua dan doa Pak Ecky Awal Muharam, mudah-mudahan ini cepat selesai. Nah ini kan harus segera lagi berbalik kan, POJK baru harus dibuat lagi. Nah seperti apa nanti gambarannya, begitu. Pada saat bunga sudah diturunkan, kemudian

likuiditas dibanjiri di market, dan semua relaksasi dilakukan dan seterusnya, nah kemudian seperti apa bangunnya lagi. Itu harus dapat gambaran juga. Atau paling tidak ada persiapan-persiapan ke sana, dari sekarang.

Kemudian BPS, nah ini kemarin juga saya sudah menyampaikan bahwa di beberapa kali pertemuan kan kita sering mengkritisi data-data BPS ini karena yang menyangkut rakyat miskin, sangat miskin, hampir miskin dan lain-lain itu kan selalu berbeda di lapangan. Nah kita sampaikan barangkali saya termasuk salah satu yang cerewet, supaya dilibatkan masyarakat yang di bawah. Terutama RT, RW, Kepala Desa, mereka yang paling tahu tempatnya di mereka.

Tadi malam menarik apa yang disampaikan Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur, bahkan dia bilang, mbok ya kalau diberikan kesempatan, eh Jateng, sorry, maaf, dikasih kesempatan untuk menyalurkan kan, kita paling tahu. Jadi tidak kisruh seperti ini. Nah jadi harus ada kepercayaan Pemerintah Pusat ini kepada Pemerintah Daerah. Karena mereka sudah ditunjuk, dipilih oleh masyarakatnya dan seterusnya, begitu. Untuk membagi bantuan-bantuan seperti itu pun, kalau melalui mekanisme yang dibuat oleh Pusat, contoh Dana Desa, tadi sudah disinggung juga oleh teman-teman. Dana Desa itu sudah dipersyaratkan 30% dialokasikan untuk masyarakat miskin korban Covid. Tapi masyarakat miskin itu persyaratannya ada 14. Ini untuk diketahui, 14 persyaratan. Dan harus memenuhi minimal 9 persyaratan. Nah untuk seperti ini, tidak bisa mereka lakukan. Akhirnya mereka juga bingung, uang ini mau diapain takut, dan uang ini mau diberikan, misalnya kalau menurut sesuai aturan 14 itu beberapa Desa itu menyampaikan, masyarakatnya mungkin ada 500 KK, mungkin yang bisa memenuhi syarat itu hanya 50 KK. Nah terus uang yang ini, untuk apa mereka mengusulkan, yang lain tidak berani. Jadi banyak sekali komplikasi di lapangan. Jadi mohon sekali BPS, ke depan juga, libatkanlah tokoh-tokoh di Daerah itu masing-masing untuk memperoleh data. Memang secara online kan sekarang sudah diminta, tetapi online kan tidak bisa, bisa bias juga. Mungkin ada data pembanding juga atau di ... masyarakat seperti online sekarang, tapi libatkan juga RT/RW dan Kepala Desa setempat. Dan ini mudah. Kalau data itu sebenarnya kita wajibkan dari Pusat kepada Bupati, kemudian Camat nya menginstruksikan ke camatnya dan seterusnya, itu yakin saya mungkin 80% mengenai. Nah tapi apakah mau seperti apa? Nah ini juga yang kita harus kaji ulang, semua kebijakan-kebijakan yang ada di pusat.

Mungkin sementara itu, Ketua. Terima kasih.

Billahitaufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terakhir, saya persilakan dari F- PPP, Bu Wartiah.
Ingat kita ada PSBB ini Bu, mohon dipersingkat.
Ada dari F-PPP? Ya dipersingkat Bu ya, ada PSBB soalnya.
Silakan Bu.

F- PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mohon maaf, memang risiko terakhir, Pak. Oleh karenanya motivasi bagi F- PPP, mudah-mudahan ke depan, naik kelas.

**Bapak-Ibu sekalian,
Yang kami hormati Ibu Menteri Keuangan, kemudian Bapak Gubernur BI,
Ketua OJK, kemudian dari BPS, Bapak Kepala BPS, dan tentu saja
Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas.**

ANGGOTA :

Suaranya Bu, kurang kencang.

F- PPP (Dra. Hj. WARTIAH, M.Pd.):

Saya langsung saja, yang pertama, kami ingin tanyakan tentang, untuk Menteri Keuangan, bahwa dalam *outlook* APBN 2020 disebutkan ada penghematan alamiah sebesar Rp22,7 Triliun. Mohon penjelasan.

Kemudian yang kedua, mengenai adanya penghematan subsidi pupuk sebesar Rp2,1 Triliun, agar sebagiannya disamping untuk Covid-19, tetapi sebagiannya dialihkan kepada bantuan pengadaan bibit sayur-mayur dan lain-lainnya dalam rangka mengantisipasi jangka panjang Covid-19 dengan kegiatan Gerakan Menanam di Pekarangan Rumah, yaitu *work in home*.

Kemudian yang ketiga yang berhubungan dengan *refocussing* oleh Kementerian dan Lembaga, mengenai realokasi di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Polri dan Kementerian Luar Negeri, mohon dilengkapi dengan jumlah anggarannya.

Selanjutnya kami dari F-PPP memberikan apresiasi pasca penetapan Perpres No. 54 Tahun 2020 dalam Percepatan Penanganan Covid-19 yaitu Penghematan Belanja bagi Kementerian dan Lembaga, sebesar Rp50 Triliun, sehingga total seluruhnya Rp145, 7 Triliun.

Selanjutnya kami juga mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di Dapil, yaitu perlu dievaluasi oleh Ibu Menteri Keuangan tentang

pemotongan Dana Desa untuk lebih dialihkan kepada penanganan Covid-19 dan ditambah dengan pengadaan sembako.

Kemudian selanjutnya kami juga memberikan masukan kepada Ibu Menteri Keuangan, perlu dievaluasi anggaran untuk kartu pra kerja, sehingga perlu diadakan, perlu dialihkan kepada Covid-19 terutama pengadaan sembako.

Kemudian kepada BI mengenai asumsi yang mendasari proyeksi ekonomi penerapan PSBB di berbagai wilayah, diasumsikan sekitar 70% dari perekonomian nasional, dengan puncak selama 2,5 bulan selama bulan April hingga pertengahan bulan Juni 2020. Dan kemudian mereda pada Juni dan Juli dan berakhir di Agustus 2020. Kebijakan ini dialihkan, diperkirakan akan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi diberbagai sektor ekonomi. Perlu dipikirkan dan dipersiapkan *plan* berikutnya jika puncak pandemi melebihi dari pertengahan Juni 2020.

Kemudian yang kedua, kami mengapresiasi bauran intervensi Kebijakan Moneter BI untuk mitigasi Covid-19, sekaligus mengapresiasi adanya stabilitas nilai tukar rupiah, yang sampai saat ini kurang dari Rp15.000,00.

Kemudian selanjutnya untuk BI, kami mengapresiasi juga dukungan BI dalam penyaluran Bansos Pasca Covid-19 dan kami harapkan realisasi bantuan penyaluran bansos dari program sosial BI dipercepat di masyarakat.

Kemudian OJK. Yang pertama adalah dalam upaya OJK mengantisipasi penyebaran Covid-19, serta *refocussing* dan realokasi anggaran, disebutkan identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi tidak dapat dilakukan. Kami minta kepada OJK untuk melengkapi kegiatan-kegiatan yang berpotensi tidak dapat dilakukan tersebut, agar dapat diantisipasi berikutnya.

Yang kedua, kami mengapresiasi prinsip penyangga risiko likuiditas yang dipaparkan oleh OJK. Kemudian yang ketiga, kami berharap kegiatan CSR untuk difokuskan kepada pengadaan sembako untuk dibagikan kepada masyarakat terdampak Covid-19, mengingat saat ini kebijakan PSBB diperluas wilayahnya. Dan yang keempat untuk OJK, kami minta untuk terus meningkatkan monitoring kepada Perbankan yang dapat likuiditas.

Kemudian kepada BPS, yang pertama kami berharap ada perbaikan data penerima bantuan sosial, agar tidak ada lagi temuan di lapangan tentang adanya ketidaksesuaian data antara BPS dan Kementerian Sosial. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah di daerah kami, Lombok Timur, khusus dalam pelaksanaan program PKH, ada gerakan untuk menempel stiker kepada penerima PKH dengan kalimat, "Saya, keluarga miskin penerima PKH". Ternyata dengan adanya kegiatan itu, banyak yang mengundurkan diri dari penerima PKH karena mereka tidak sesuai. Mudah-

mudahan ini menjadi gerakan nasional, sehingga bisa mengurangi kesalahpenggunaan program PKH tersebut.

Kemudian yang terakhir, kepada Bappenas, setelah kami mendengar dan menyimak yang telah disampaikan, kemudian membaca bahan yang telah disampaikan kepada Komisi XI oleh Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam mempercepat, memulihkan ekonomi dan reformasi sosial, termasuk di dalamnya pemaparan tentang fokus pembangunan tentang pemulihan industri, pariwisata, investasi, reformasi, sistem kesehatan nasional, reformasi sistem dari jaring pengaman sosial, serta rencana agenda pembangunan berikutnya. Kami mendukung dan mengapresiasi sepenuhnya upaya-upaya yang telah disampaikan di atas. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, sekaligus kami mengapresiasi pertemuan hari ini, yaitu Ibu Menteri Keuangan kelihatan tampilannya beda. Penuh semangat dan ada nuansa yang positif yang memberikan, apa namanya, semangat kepada kita juga, di Daerah ya. Demikian dari kami.

Wallahumuafik ila aquamittorik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ya silakan Pak Misbakhun.

F- PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Terima kasih atas kesempatan yang oleh Pak Ketua yang baik hati.

Saya ingin memberikan pandangan saya terhadap kartu pra kerja. Kartu pra kerja ini, saya termasuk yang diajak diskusi pada saat kampanye dulu dengan Calon Presiden, Pak Jokowi. Waktu itu dipersiapkan memang tidak untuk pandemi Covid-19. Waktu itu dipersiapkan kartu itu dalam rangka menyiapkan tenaga kerja-tenaga kerja baru dengan kemudian diberikan pelatihan melalui BLK (Balai Latihan Kerja). Waktu itu dipersiapkan antara 500-600 ribu orang, sehingga di dalam 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu akan ada sekitar 2,5 juta. Ketika itu kemudian ada peristiwa pandemi ini, itu sudah didesain ulang. Untuk apa? Membantu orang yang di PHK, dan kemudian membantu para orang yang sedang menunggu kerja. Masih ada. Pesertanya pun dilipatgandakan. Untuk apa? Ya untuk Pemerintah mewujudkan janji kampanyenya. Kartu ini kan baru dimulai. Biasa orang Indonesia itu, kalau baru memulai program, dia pasti masih akan mencoba. Sama dulu waktu orang pertama kartu apa, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan sebagainya. PKH dulu juga dulu BLT langsung tunai, Pak. Sekarang menjadi *conditional cash transfer*. Orang ngapain? Nah ini apakah kemudian mau dijadikan BLT atau, ini adalah pilihan politiknya Pemerintah dengan kartu ini. Ketika ini adalah program yang baru, dijalankan

pada 2020 ini, disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid ini yang menghantam sektor tenaga kerja. Tadi disampaikan oleh Kepala BPS, ada PHK. Artinya apa? Bahwa Pemerintah sudah memodifikasi. Ah kita lihat jalannya nanti. Ada masalah? Ya kita perbaiki. Karena itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan. Ada kesalahan, diperbaiki. Ada kekurangan, diperbaiki lagi. Hingga apa? Nanti masyarakat merasakan manfaatnya dari kartu pra kerja ini. Tidak ada program kartu pra kerja ini menyengsarakan, justru ingin menjadi bantalan sosial, bagi siapa? Bagi masyarakat kelompok para pekerja dan para pencari kerja, yang diputuskan hubungan kerjanya oleh para pemberi kerja. Lah ini dijalankan dulu. Kemudian ada *training* dan sebagainya itu, memang awalnya didesain untuk para pencari kerja yang belum mendapatkan pengalaman, sehingga dia mendapatkan pengalaman. Karena *social distancing*, karena situasi *social distancing*, desain pelatihan kerjanya adalah melalui *online*. Kalau ada kekurangan, ya nanti akan diperbaiki secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Tapi program ini adalah program yang disusun sejak awal oleh Pemerintah, dan sudah didesain dan disesuaikan dengan kondisi pandemi.

Nah saya ingin melanjutkan sedikit, Pak Ketua. Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, saya sangat kasihan dengan Ibu Menteri Keuangan, bagaimana APBN kita, ruang fiskal kita dan kesinambungan fiskal kita sangat terbatas. Tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Pak Andreas, bahwa proses penyehatan ini nanti jangan sampai kemudian membikin sektor keuangan, industri keuangannya, itu menjadi sakit. Yang menarik lagi, saya ingin, karena saya yang terakhir ini, yang disampaikan Ibu Vera tadi, *sharing the pain*. Perpu Nomor 1 itu tahun 2020 itu jelas mengatakan bahwa apa yang digunakan ini adalah Keuangan Negara. Dan kemudian, Pasal 27 ayat (1) itu dikatakan sebagai biaya krisis. Kalau kita biaya krisis, kenapa kita kita masih berpikiran, Pak Wimboh, kenapa kita masih berpikiran dengan *market rate* terhadap bantuan likuiditas itu. Bayangkan Bu Menteri menjual Surat Utang terakhir tanggal 14 April, bunganya sudah ke *market* 7,9. Bayangkan. Artinya apa? Negara ini sudah kesulitan uang, ada kelebihan likuiditas. Nah saya ingin, kenapa kita masih, ketika desainnya sudah desain sebagai biaya krisis, kita masih kemudian digunakan nya Keuangan Negara ini ada yang masih ingin mengambil untung dalam situasi yang tidak normal. Itu. Keuangan Negara ini, situasinya krisis. Kenapa? Sedangkan sudah dikatakan bahwa ini menjadi biaya krisis. Bapak-Bapak pengambil keputusan yang sudah dijaga dan dilindungi dengan imunitas. Lah ini yang harus dibuka perspektifnya.

Makanya saya ingin tanyakan Pak Gubernur, saya ini mohon maaf, dengan segala hormat saya, pelonggaran GWM itu adalah satu satu dari bagian dari *quantitative easing*. Saya sangat mengerti, *quantitative easing* satu-satunya itu bukan mencetak uang. Sejak awal saya sampaikan. pelonggaran GWM, salah satunya bisa pelonggaran primer, bisa GWM sekunder, bisa FLR, itu. Dan ini adalah pelonggaran *quantitative easing* itu adalah bagian dari pelonggaran operasi moneter. Sekarang pertanyaan saya, kalau nanti pelonggaran itu mau dipakai oleh, untuk membeli pelonggaran

likuiditas yang ada saat ini, dipakai untuk membeli SBN, apakah kemudian SBN-SBN yang dimiliki oleh dunia Perbankan kita, kita ingat Pak, LDR Perbankan kita sudah sangat tinggi. Artinya apa? Aset kredit dan aset-aset mereka, likuiditas mereka itu sudah tergadaikan semua. Kan sudah tergadaikan semua. Yang mereka butuhkan pada saat ini adalah ketika mereka melakukan relaksasi, restrukturisasi dan sebagainya, kemudian melakukan aktivitas Perbankan harian mereka, mereka kan likuiditas *fresh*, Pak. Bukan me-repo lagi, itu. Nah inilah kalau menurut saya, maka usulan dari Badan Anggaran mengatakan bahwa *quantitative easing* itu harus dikombinasikan, dikombinasikan Pak.

F- PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM):

Mohon maaf, Badan Anggaran belum rapat.

F- PG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.):

Ah saya baca di itu. Nah, saya baca di media. Pelonggaran itu salah satunya dengan kuantitasi pelonggaran GWM, dan termasuk bantuan likuiditas lain yang disampaikan oleh Bank Indonesia, tapi bisa juga dengan mencetak uang. Lah mencetak uang ini inflatoir apa tidak? Pak, dunia sekarang, coba kita tanyakan, kalau tadi disampaikan oleh Bu Menteri, bagaimana Surat Utang menjadi sangat tinggi di pasar, tidak ada daya serap dari market, artinya apa? Market juga sedang mengalami kesulitan likuiditas. Untuk menyerap yang sudah dengan *rate* yang sangat-sangat tinggi. Makanya kalau menurut saya, harus *open end*. Harus dedikatif dibeli oleh BI. Dengan apa? Ya dengan kalau urusannya itu membayar, bagaimana pemerintah menyiapkan APD, meng*contain*, mengatasi pandemi itu sendiri, jaring pengaman sosial, ya mbok ya bunganya itu yang rendah, Pak. Supaya apa? Kalau bisa *zero compound* Pak. Karena apa? Ini yang kita katakan *sharing the pain*-nya Pak. Ini sudah dimasukkan dalam biaya krisis tadi. Walaupun nanti kita belum tahu proposal Pemerintah, bagaimana program pemulihan ekonomi seperti apa, karena lagi disiapkan oleh Menteri. Tapi saya ingin menyampaikan itu. Lah nanti kalau *recovery* di dalam dunia bisnis yang mau diambil, tapi kalau bisa ya jangan tinggi. Karena apa? Ini yang akan menentukan, kita akan bergeser keluar dari krisis itu dengan cara apa? Apalagi tadi, sangat optimis Pak Gubernur, akan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 itu menjadi 6,6-6,7. Tapi kalau kita tidak mendesain sejak awal, bagaimana cara kita bangkit dari dasar kurva ini, lah BI-nya sendiri masih mikir dengan operasi moneter, biaya operasi moneter dan sebagainya, nah inilah biaya krisis yang kita perlukan itu supaya *implemented* jadi kebijakan. Sama juga yang disampaikan, mengenai aset kredit Pak, Surat Berharga Negara. Surat Berharga Negara Perbankan ini semuanya kan sudah tergadai Pak, sudah tergadai semua, Pak Wimboh tahu. Itu, LDR kita sudah tinggi. Lah pada situasi seperti ini Pak, Pak Wimboh, kalau mau, saya interupsi sedikit Pak. Lah ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau perlu bantuan itu Pak, jangan melihat kondisi yang seperti itu. Saya setuju apa yang disampaikan

Pak Andreas, ini akan menjadi beban jangkar Pak, *bank anchomya* akan menjadi beban. Tidak bisa Pak.

Nah kalau menurut saya lebih baik, karena skema ini belum pasti dibicarakan di KSSK dan bagaimana negara ini keluar dari permasalahan Covid ini. Saya masih konsen soal tingkat suku bunga, Pak. Karena apa? Perpu Nomor 2 ini, eh Perpu Nomor 1 ini, memberikan beban kepada biaya krisis Pak, yang tidak pernah ada dalam terminologi kita sebelumnya. Kecuali pada saat LPS, uji Undang-undang LPS. Tetapi Perpu ini kemudian memberikan kita semua kepada biaya krisis yang sangat besar. Tinggal sekarang Menteri Keuangan mau menentukan berapa besaran yang akan ditanggung oleh Negara, dalam besaran krisis ini, itu. Ini Pak yang saya ingatkan lagi bahwa pelonggaran GWM itu tidak otomatis kemudian menjadi ruang fiskal karena jalur transmisinya tidak otomatis memberikan kekuatan likuiditas kepada Perbankan, karena dia keluar, likuiditas ini digunakan juga untuk relaksasi yang dijadikan program oleh OJK, digunakan untuk operasi harian mereka juga. Dan masing-masing Perbankan sangat berbeda kualitas SBN yang mereka punya. Apalagi direpokan, seperti situasi ini.

Itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih Ketua, diberikan kesempatan untuk melakukan interupsi.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Sebentar, sebentar, satu-satu, sebentar, karena ini kan ada PSBB.

Kita akan perpanjang sampai minggu depan. Tapi terakhir mungkin Pak Dolfie, silakan kalau mau bicara, Pak Dolfie.

F- PDIP (DOLFIE O.F.P.):

Terima kasih Pak Ketua.

Jadi dari pemaparan yang disampaikan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia khususnya, nampaknya ini belum ada kata sepakat di KSSK, terkait dengan yang disampaikan Misbakhun tadi, mengenai biaya ekonomi untuk penyelamatan ekonomi nasional itu berapa? BI punya persepsi, biaya ini bisa di-*recover* dengan mekanisme pasar biasa. Sementara Kementerian Keuangan merencanakan hanya Rp150 Triliun untuk pemulihan ekonomi. OJK mendata potensi *outstanding* kredit Rp1000 Triliun. Kalau kita berpatokan pada kredit yang di bawah Rp10 Miliar saja, tunggakan bunga dan pokoknya sudah Rp300 Triliun. Nah nampaknya KSSK ini perlu duduk bersama, Pimpinan, untuk merumuskan berapa sebenarnya biaya ekonomi untuk penyelamatan ekonomi nasional yang ada di Perpu itu, bahwa biaya yang dikeluarkan KSSK, termasuk dalam biaya penyelamatan perekonomian nasional. Nah angka ini belum ada. Kalau angka ini sudah ada, kita bisa tahu, berapa yang diserap melalui SBN dengan mekanisme pasar dengan bunga mekanisme pasar, berapa yang diserap dengan penjualan SBN di pasar luar negeri. Baru kemudian apa yang bisa dilakukan optimalisasi melalui BI,

quantitative easing yang diperluas. Mungkin baru ada gambaran, Pimpinan. Kalau hanya seperti sekarang, BI hanya mengandalkan krisis ini diselesaikan dengan mekanisme pasar, kan aneh ini Pimpinan. Harus ada intervensi yang lebih. Karena ini kan situasi yang normal.

Jadi menurut saya, dalam jawaban tertulis atau penjelasan Pemerintah yang akan datang, sudah ada rumusan, berapa sebetulnya perkiraan biaya ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian nasional di Perpu itu. Sehingga peran dari Kemenkeu, peran dari BI, peran dari OJK dalam menyediakan likuiditas pembiayaan dari biaya ... ini jelas, Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Oke, selesai, cukup Pak Dolfie?

Karena ini PSBB, kami sampaikan bahwa mungkin cukup sampai di sini, kemudian minggu depan akan kita *reschedule* sama dengan waktu hari Selasa lalu, KSSK, bahwa Pemerintah menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi XI. Kemudian kalau perlu pendalaman, kita sedikit pendalaman, kemudian dengan Kesimpulan.

Jadi untuk itu kita akhiri sampai di sini dulu Raker kita pada hari ini dengan Menteri Keuangan, dengan Gubernur Bank Indonesia, dengan Menteri PPN, kemudian OJK dan BPS, mengenai *refocussing* dan *realokasi* anggaran 2020 dan realokasi apa namanya, dan mengenai yang telah kita ... sudah mau buka puasa, sudah mulai krukuk-krukuk.

Baik, jadi mungkin begitu, nanti ada kesempatan yang lain untuk yang lain. Setelah kita tutup, nanti kita ... Sekretariat, setuju ya, diatur waktunya. Langsung Pemerintah memberikan jawaban, kalau ada pendalaman, silakan kita pendalaman sedikit. Nanti kita masuk ke Kesimpulan.

Dengan demikian maka, setuju ya? Setuju ya? Baik, mungkin ada *closing statement* dari Menteri Keuangan, sebelum kita tutup.

MENTERI KEUANGAN RI (SRI MULYANI):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu sekalian,

Saya rasa sekali lagi ini di dalam pertemuan dengan Komisi XI, selalu kami bisa mendapatkan perspektif-perspektif yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah. Seperti tadi disampaikan, bahwa seluruhnya ini dilakukan dalam suasana maraton dan sangat cepat. Jadi memang selalu ada saja perbaikan-perbaikan yang tentunya akan membantu.

Jadi Pak Dito untuk penjadwalan kembali, kami akan siapkan bahan-bahan serta dua tambahan tadi, dari Pak Misbakhun dan Pak Dolfie. Kebetulan juga KSSK masih juga akan bertemu Pak, tapi ini pandangan-pandangan tadi sangat bermanfaat untuk kami bisa mengukur suasana secara politik dan juga dari suasana kondisi ekonomi sosial masyarakat. Kami akan menggunakan masukan ini untuk terus memperbaiki *policy-policy* kami. Mungkin demikian dari kami hari ini Bapak, nanti kami akan siapkan untuk *rescheduling* pertemuan yang akan datang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. DITO GANINDUTO, M.B.A./F- PG):

Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Bappenas, kemudian Ketua OJK dan Ketua BPS, Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI yang telah mengikuti secara sabar Rapat Kerja pada hari ini, Kamis, tanggal 30 April tahun 2020.

Dengan mengucapkan hamdalah, maka Rapat Kerja pada sore hari ini saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.37 WIB)

Jakarta, April 2020
a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

ttd

Drs. Urip Soedjarwono
NIP. 196205211982031001